

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 237
10 - 23 Jumadil Akhir 1440 H
15 - 28 Februari 2019

media **umat**

mediaumatnews

Memperjuangkan Kehidupan Islam



SALING TUDING ANTEK ASING

■ **WAWANCARA**
Salamuddin Daeng,
Pengamat Ekonomi Politik
Tiga Pilar Ekonomi
Terindikasi Asing

■ **MANCANEGARA**
Lagi, Politisi
Anti Islam Belanda
Masuk Islam

■ **MEDIA NASIONAL**
Bupati PDIP
Mega Korupsi
Rp 5,8 Triliun

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Apa kabar Anda? Semoga senantiasa bersemangat dalam Islam, terus berjuang menyebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat yang kian permisif. Semoga Allah melindungi langkah-langkah dan niat baik kita, aamiin.

Pembaca yang dirahmati Allah, suasana politik semakin memanas menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif. Jalan-jalan kini penuh dengan potret para calon wakil rakyat. Mereka sangat antusias mengenalkan diri dan meminta dukungan. Senyumnya menghiasi setiap sudut jalan, bahkan hingga ke gang-gang. Tak jarang berbagi janji dilontarkan.

Namun sangat jarang, bahkan mungkin tak ada yang berani akan memperjuangkan Islam. Matimati akan menegakkan hukum Allah jika mereka duduk di parlemen. Atau akan menyuarakan suara Islam saja di lembaga legislatif serta mengubah sistem yang tidak islami menjadi sistem Islam.

Mungkin muncul di benak Anda, kalau mereka tak memperjuangkan Islam, lalu apa yang diperjuangkan? Pasti bukan islami. Nilai-nilai kebaikan ala universal? HAM? Kebebasan? Atau yang dianggap baik oleh sebagian besar manusia?

Pembaca yang dirahmati Allah, bila kita mau jujur, Allah telah menurunkan bagi kita umat manusia aturan yang sempurna. Aturan itu tak memihak siapapun. Tak ada kepentingan pembuatnya. Dan pasti, aturan itu mengandung keadilan karena berasal dari Dzat Yang Maha Adil.

Ini sangat berbeda dengan karakter aturan ala manusia. Sarat dengan kepentingan. Dapat dipastikan para pembuatnya dan orang-orang di belakangnya—bisa asing, aseng dll—lah yang berharap kepentingannya ada dalam aturan

dibuatnya itu. Sudah menjadi rahasia umum, parlemen bukanlah tempat yang netral. Partai-partai yang ada mempunyai kepentingan untuk dirinya. Kalau mereka bilang partai itu sebagai saluran aspirasi rakyat, itu sesungguhnya adalah klaim semata. Partai adalah partai. Bahkan anggotanya pun tak bisa dan tak boleh berbeda dengan partai, harus menyalurkan aspirasi partai. Sehingga rakyat dinomor sekian. Ini fakta sistem yang ada.

Pembaca yang dirahmati Allah, tak jarang kalau kita melihat bagaimana para kandidat ini bertarung, jauh nilai substansial. Malah kalau kita lihat debat calon presiden yang lalu, mereka hanya berbicara soal hal-hal yang ada di permukaan. Kadang kita dibuatnya tertawa, bagaimana nanti seorang kepala negara memimpin dan mengelola negeri ini kalau yang ada di benaknya hanya seperti itu?

Nah, di sela debat Capres kali ini, kembali kami sajikan isu yang panas yang dilontarkan oleh kedua kubu. Soal antek asing. Siapa yang sebenarnya antek asing? Bagaimana sebenarnya yang terjadi dan seperti apa faktanya? Ikuti pembahasan kami.

Di pembahasan Fokus, kami mencoba menyoro bagaimana keadilan diberlakukan di negeri ini. Mengapa seorang Ahmad Dhani dipenjara hanya gara-gara cuitannya, sementara banyak pendukung rezim Jokowi yang melakukan tindakan yang lebih berat dibiarkan begitu saja. Apakah aparat hukum sudah berpihak?

Akhirnya, kami berharap sajian kami ini mampu membuka cakrawala berpikir Anda. Umat Islam harus melek politik dan memahami tolok ukurnya secara islami agar kaum Muslim tidak lagi menjadi objek penderita. Terus berjuang menjadi penentu perubahan! Allahu Akbar! []

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA

Rezim PHP

Polemik wacana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir begitu mengecewakan umat Islam, umat Islam berharap pembebasan sang ustadz benar adanya, namun sayang semua itu hanya hoaks saja.

Namun sang ustadz tetap tegar dan kuat dengan prinsip ideloginya, yaitu ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT, mengalahkan iming-iming bebas dari jeruji penjara. Sebelumnya dengan penuh semangat Presiden dan pendukungnya mengatakan akan membebaskan sang ustadz dengan alasan kemanusiaan.

Dan ternyata benar saja ustadz kena PHP (pemberi harapan palsu) oleh rezim yang berusaha mempermainkan nasib seseorang. Dengan alasan harus ada pengkajian ulang. Dan yang lebih menyakitkan umat Islam, pengumuman pembatalan tersebut tidak disampaikan oleh Presiden tapi oleh Menkopolkum.

Itulah sudah nampak jelas rezim PHP yang terus represif anti Islam dengan mempermainkan perasaan umat Islam.

Semoga Allah membalas setiap perbuatan rezim pembohong dan pemberi harapan palsu. **Nur'aliyah. Jelekong. +6287839312xxx**

Tabloid Meresahkan

Baru-baru ini muncul tabloid Indonesia Barokah yang isi di dalamnya seolah memecah belah persatuan. Sangat disayangkan Bawaslu justru menyebutkan bahwa tabloid ini tidak melanggar kampanye.

Berkaca dari sekian banyaknya permasalahan di negeri ini, seperti munculnya tabloid Barokah, bukti diamnya rezim terhadap tabloid perusak persatuan, dengan membiarkan tabloid ini terbit dan disebar secara masif ke masjid-masjid. Pro kontra keberadaan tabloid ini pun semakin menggambarkan lemahnya rezim dalam menyelesaikan masalah, akibatnya suasana yang awalnya kondusif pun menjadi rusak.

Sudah saatnya masyarakat mendamba dan membutuhkan penguasa ataupun pemimpin yang mampu menjadi panutan umat, bukan hanya untuk segelintir orang tapi untuk seluruh rakyat. Umat sekarang butuh pemimpin yang tegas, yang cinta terhadap rakyatnya dan mampu menyelesaikan permasalahan umat, dan itu bisa terjadi jika syariat Allah ditegakkan dalam bingkai kehidupan, dalam naungan Khilafah. **Lilih Sholihah. Karawang. +6281385240xxx**

Kepemimpinan Orang Bodoh

Untuk saat ini pilpres menjadi satu-satunya ajang bagi rakyat di negeri ini untuk memilih pemimpin terbaik mereka. Namun sayang faktanya dari beberapa kali pilpres pemimpin yang terpilih tidak selalu yang terbaik bahkan lebih buruk.

Mengapa demikian? Sebab yang paling utama kapasitas dan kualitas para calon pemimpin tidak diukur dan ditakar oleh Alquran dan As Sunnah tetapi oleh konstitusi dan perundangan yang ada.

Sesungguhnya yang dituntut dalam Islam, sebagai seorang pemimpin dipilih dan dibiayai untuk menerapkan syariat Islam. Berbeda untuk saat ini mereka jauh dari Al quran dan As sunah. Untuk itu umat harus hati-hati dan mewaspadai adanya pemimpin yang bodoh dan dungu (*imarah assufaha*). Sebagaimana diketahui Rasulullah SAW bersabda : Aku mengkhawatirkan atas diri kalian enam perkara yaitu (salah satunya) kepemimpinan orang - orang bodoh (HR. Ahmad dan At Tabrani) .

Semoga kita dijauhkan dari pemimpin yang dicela yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. **Ummu Hanum. Bale Endah Kab. Bandung. +6281214889xxx**

Genderuwo Patah Hati

Panas sekali rasanya. Muncul pernyataan bergejolak dari salah satu keceboang, bahwa jika pasangan 02 sampai menang, maka mereka akan buat kerusuhan. Tetapi bila pasangan 01 yang menang, bukannya bikin adem atau



Koordinator Pusat LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin mengukuhkan LBH Pelita Umat Cabang Sidoarjo, Ahad (10/2) di Jalan Bogem Selatan Nomor 24 Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur.[]

MediaUmat tabloid
mediaumat.news | Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Kuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Gedung Menara 165 Lantai 4, JI TB Simatupang Kav 1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan. **Telp:** 021-50812002 ext 767 **Fax:** 021-50812003. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SMS/WA Media Pembaca/Komentar untuk MU: 089634912651. Sertakan Nama dan Asal daerah.

apalah. Mereka justru bilang akan menangkapi rival-rival politiknya, terutama para pengemban dakwah Islam.

Dungu sekali cara rezim dalam mempertahankan kursi. Segala cara dihalalkan dalam politik dungukrasi, tak terkecuali dengan tangan besi. Lengser dari kekuasaan pasti bisa membuat genderuwo patah hati sampai pada level panik tingkat tinggi. Tak heran cara kasar sebegini mau mereka ambil.

Wahai umat Islam, Rasulullah Al Amin idola Makkah saja dimusuhi oleh masyarakat, apalagi kita! Sunnatullah dakwah adalah dimusuhi para setan, genderuwo juga setan. Makanya penting sekali bagi kita untuk tetap bersabar dan teguh dalam jalan dakwah. **Mayuzuri. Ngawi. +6285235247xxx**

Penumpang Gelap RUU P-KS

Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual sedang dibahas di DPR. Sebenarnya RUU ini ditargetkan ketok palu 2018, namun karena masih tarik ulur dan pro kontra akhirnya belum dibahas lagi.

Bila menilik dari tujuan legislasi RUU PKS terkesan ada keprihatinan akan peningkatan terus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan yang angkanya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bila dibaca dengan teliti menggunakan paradigma Islam politik akan tampak jika muatan Barat yang memuja sekulerisasi dan liberalisasi turut mendominasi materi ini. Definisi kekerasan seksual yang digunakan terfokus pada klausul memberikan kesan bahwa perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan yang dikehendaki satu sama lain tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang patut dihukum. Di sinilah peran agama apalagi Islam dinafikan, karena bagi para pemuja liberalisme mereka memiliki doktrin "my body my otority" "aurat gue bukan urusan loe" yang artinya agama tidak boleh mengaturnya.

Beginilah bila pemerintah dan masyarakat tidak mau keluar dari konsepsi demokrasi sekuler, di mana kehidupan tidak boleh diatur oleh agama. Solusi yang didasarkan pada hukum ciptaan manusia hanya berujung pada persoalan baru.

Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual yang ada di sistem sekuler kapitalis wajib di kembalikan kepada syariah Islam yang diterapkan secara kaffah dalam sistem Khilafah yang mampu melenyapkan segala kejahatan sosial dimuka bumi dengan seizin Allah SWT. **Herra. Kab. Bandung. +6289697389xxx**

Sumber Daya Alam Diobral

Temuan KPK terkait maraknya pejabat pemerintah yang melakukan korupsi disektor sumber daya alam seharusnya membuat kita geram. Dan yang lebih membuat naik pitam adalah hanya segelintir yang ditangkap dan diadili. Contohnya di sektor kehutanan, berdasarkan data dari KPK terdapat lebih dari 20 pejabat disektor tersebut yang diproses terkait kasus korupsi, dan ada beberapa kasus yang telah merugikan negara dengan angka yang fantastis.

Itu baru dari satu sektor, apa kabar dengan kasus korupsi disektor-sektor lainnya?

Banyaknya kasus korupsi dalam bidang SDA menjadi hal yang lumrah pada sistem ekonomi kapitalis karna azasnya hanyalah manfaat untuk kepentingan pribadinya, inilah liberalisme kepemilikan yang menjadi pangkal kerusakan dan sulitnya mewujudkan kesejahteraan. Pejabat yang seharusnya amanah terhadap jabatan yang diembannya malah seenaknya "mengobral" apa yang bukan menjadi haknya.

Akan berbeda jika sistem Islam yang diterapkan. Sumber daya ditetapkan sebagai milik umat bukan untuk dimiliki pribadi apalagi dijual kepada pihak asing. Sehingga pemanfaatannya pun digunakan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat. **Rita. Bogor. 0813-2024-xxxx**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



Revolusi Islam Sejati

40 tahun sudah revolusi Iran yang diklaim pengikutnya sebagai revolusi Islam, berlalu. Tentu dalam beberapa aspek Iran tampak keislamannya dibanding dengan negeri-negeri Islam sekuler lainnya. Namun harapan utama umat Islam saat revolusi, munculnya negara adi daya yang benar-benar mengimbangi bahkan mengalahkan Amerika Serikat, negara penindas, masih jauh.

Ekonomi Iran masih dipengaruhi oleh tekanan Amerika, naik turunnya harga minyak internasional yang dikendalikan Barat. Dalam politik internasional Iran bahkan menjadi alat politik Amerika untuk kepentingan negara imperialis itu. Singkatnya, Iran dengan revolusinya, gagal menjadikan negara global yang mewakili umat Islam di seluruh dunia. Gagal melakukan pembebasan terhadap negeri-negeri Islam yang tertindas dan gagal menyatukan dan membangkitkan umat Islam.

Umat Islam saat ini membutuhkan revolusi yang sejati, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Revolusi yang didasarkan pada akidah yang shahih, bukan terjebak pada akidah yang cenderung sektarian. Akidah Islam inilah yang menjadi pondasi dasar dari revolusi Islam yang dilakukan Rasulullah SAW. Akidah inilah yang mempersatukan umat manusia, tanpa pandang ras, suku, bangsa, ataupun mazhab. Berdasarkan akidah ini, bersatulah orang-orang Arab dengan Afrika, Persia, Eropa, maupun Asia.

Revolusi sejati Islam juga membawa perubahan mendasar dari segala aspek. Mulai dari pandangan hidup, aturan hidup, ekonomi, politik, sosial hingga hubungan luar negeri. Semuanya berdasarkan syariah Islam yang totalitas, bukan parsial. Apalagi mengadopsi sistem kehidupan Barat. Sementara, revolusi Iran, dalam bidang politik, justru berupaya mengkompromikan sistem republik dan Islam. Sesuatu yang mustahil dilakukan karena asas dari republik, yaitu sekuler, bertolak belakang dengan sistem Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Sementara sistem ekonomi Iran, masih belum benar-benar lepas dari dominasi kapitalisme global. Inilah yang membuat kegaduhan dan ketidakstabilan politik dan ekonomi Iran.

Sementara sistem politik dalam Islam, didasarkan pada asas Islam dan diatur dengan syariah Islam. Sistem politik ini terwujud dengan sistem kenegaraan Khilafah ala minhajin nubuwah. Konsepsi kenegaraan yang bertolak belakang dengan sistem Barat seperti republik. Sistem Khilafah memiliki empat pilar mendasar: Kedaulatan ditangan hukum syara' (bukan rakyat seperti demokrasi), kekuasaan di tangan rakyat, rakyat berhak memilih pemimpin yang mereka hendaki. Sekaligus di tangan rakyat ada hak bahkan kewajiban untuk mengoreksi penguasa (*muhasabah lil hukkam*) yang menyimpang dari Islam. Khalifah juga memiliki hak untuk mentabanni (mengadopsi) hukum, yang tentu saja wajib berdasarkan syariah Islam, bersumber dari Alquran dan as Sunnah. Pilar keempat, adalah adanya kesatuan khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Dengan empat pilar penting ini, negara khilafah menjadi negara adi daya yang independen. Kedaulatan di tangan hukum syara' akan menutup intervensi politik maupun ekonomi negara-negara Barat, yang masuk melalui legalisasi hukum berdasarkan kedaulatan manusia. Dengan syariah Islam, negara khilafah benar-benar akan terbebas dari penjajahan negara imperialis yang masuk melalui pintu utama sistem dan penguasa boneka. Selama ini, demokrasi telah menjadi alat pemilik modal untuk mendominasi sistem politik dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Demokrasi juga melahirkan penguasa-penguasa boneka yang tunduk kepada Barat.

Sistem khilafah ala minhajin nubuwah inilah yang menjadi negara adi daya karena berhasil menyatukan potensi negeri-negeri Islam di seluruh dunia mulai SDM, kekayaan alam, geopolitik strategis, hingga warisan keilmuan. Sistem ini juga akan mengembalikan kedaulatan ekonomi umat Islam atas kekayaan alam negeri-negeri Islam yang selama ini dijajah oleh Barat.

Sistem Khilafah bukan menjadi negara statis, seperti Iran, tapi memiliki misi penting untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Sistem khilafah akan menjadi negara global yang kuat secara militer maupun politik, karena tugas untuk menaklukkan dunia. Bukan untuk menjajah, namun untuk menyebarluaskan Islam yang rahmatan lil alamin.

Seperti yang ditulis Will Duran dalam *The Story of Civilization*, negara khilafah akan menjadi negara adi daya yang melindungi dan menyejahterakan umat manusia: "Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka". Sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh Iran dengan revolusi sektarian dan parsialnya. Allahu Akbar! [] **farid wadjudi**

Antek Asing

Calon Presiden Joko Widodo melancarkan serangan kepada lawan politiknya, Prabowo Subianto. Isu antek asing menjadi senjatanya. Prabowo dituding telah menggunakan konsultan asing yang menerapkan strategi Propaganda Rusia.

Jokowi sendiri merasa dirinya bukan antek asing. Berbagai 'keberhasilan' rezimnya sebagai dasar argumentasinya. Misalnya, mengambil alih kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia, juga Blok Rokan di Riau.

Namun, serangan ini justru blunder. Kedubes Rusia protes keras karena merasa disangkutpautkan dengan hingar bingar Pemilu. Kedubes Rusia menegaskan tidak ikut campur tangan urusan Pilpres kali ini.

Blunder berikutnya, usut punya usut, ternyata Jokowi sendiri pada 2014 menggunakan konsultan asing. Jejak digitalnya masih ada dan kemudian diketahui diedit beberapa waktu lalu untuk menghilangkan nama Jokowi dari daftar konsultan asing tersebut.

Dan bila ditelusuri dalam aturan Pemilu, keberadaan konsultan politik itu tidak diatur. Secara hukum, sah-sah saja.

Lalu mengapa petahana mengeluarkan jurus serangan menggunakan isu ini? Ini yang menarik dicermati. Sebagian pengamat menilai ini adalah cara kubu Jokowi menjatuhkan lawan politiknya. Harapannya, masyarakat langsung menelan mentah-mentah tuduhan itu tanpa cek dan ricek sehingga bisa memalingkan mereka dari memilih Prabowo. Dan ini merupakan bagian dari kelanjutan strategi serupa sebelumnya yang menyebut Prabowo sebagai penyebar hoaks. Bahkan PSI menganugerahkan 'Kebohongan Award' kepada Prabowo.

Sebagian pengamat menilai, ini adalah cara Jokowi mengukur seberapa besar reaksi negara-negara yang disinggung. Tujuannya untuk mencegah adanya intervensi asing mendukung Prabowo, sebab diketahui bahwa para duta besar negara-negara Eropa 'mendekat' kepada kubu Prabowo.

Namun perang opini pun menimbulkan efek balik bagi Jokowi sendiri. Berbagai kebijakannya justru mulai dibongkar, yang mengindikasikan bahwa rezimnyalah yang justru menjadi antek asing. Banyak kebijakan selama 4 tahun belakangan yang justru pro asing, bukan pro rakyat.

Bahkan rakyat kecil di level paling bawah, seperti para petani, merasakan betapa Jokowi ini tidak berpihak kepada mereka. Padahal sebelumnya Jokowi mengidentikkan dirinya dengan orang *ndeso*, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Tapi begitu berkuasa, ia malah membuka kran impor bagi produk-produk pangan. Jelas saja impor ini mengganggu para petani. Apalagi dilakukan menjelang panen. Akibatnya harga di tingkat petani jatuh. Petani menjerit.

Belum lagi, Jokowi ini sangat gemar menambah utang luar negeri. Bahkan jumlahnya melebihi rekor presiden sebelumnya selama 10 tahun. Untuk apa? Membangun infrastruktur. Utang luar negeri dan harus dibayar dengan bunga. Dan masih banyak lagi.

Walhasil, serangan Jokowi dengan isu antek asing justru membuka tabir siapa sebenarnya Jokowi ini. Benarkah ia bukan antek asing, atau justru ia adalah antek asing yang sebenarnya? **emje**

SALING TUDING ANTEK ASING

Jurus bertahan dengan menyerang dilakukan oleh petahan Joko Widodo terhadap lawan politiknya Prabowo Subianto. Menjelang pemilihan presiden yang kian dekat, sekecil apapun isu dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menang kembali.

Saat bertemu dengan sejumlah pendukungnya di Solo, Ahad (3/2), Jokowi melancarkan tuduhan Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing. Mereka menerapkan strategi "Propaganda Rusia."

"Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu," kata Jokowi.

Ia menyebut Prabowo-Sandi menggunakan konsultan asing. "Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa," tambahnya.

Namun justru yang beraksi bukan Prabowo, malah Kedubes Rusia di Jakarta. "Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," demikian pernyataan Kedu-

bes Rusia untuk Indonesia melalui akun *Twitter* resmi mereka, Senin (4/2).

Kedubes Rusia menjelaskan bahwa istilah yang kini digunakan "oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu direkayasa oleh Amerika Serikat ketika pemilihan umum pada 2016 lalu.

Meski tidak menyebut nama seseorang, publik memahami bantahan Kedubes itu jelas ditujukan kepada Jokowi. Dikemas dalam bahasa yang halus, bahasa diplomatis itu harus dipahami sebagai reaksi yang sangat keras. Tuduhan yang dilakukan oleh presiden bisa membahayakan hubungan diplomatik kedua negara.

Menyadari hal itu Jokowi kemudian menjelaskan bahwa istilah "Propaganda Rusia" itu didapatkan dari sebuah artikel di jurnal *RAND Corporation*. Lembaga kajian global yang berbasis Amerika itu dalam salah satu jurnalnya pernah menurunkan artikel "The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model Why It Might Work and Options to Counter It." Untuk menguatkan jagoannya, para pendukung Jokowi di media sosial pun ramai-ramai memposting dan menjelaskan apa itu *Firehose of Falsehood* (FoF). Istilah

yang cukup berat ini mereka jelaskan dalam sebuah grafis yang mudah dipahami. Mereka menyebut FoF dapat memecah belah bangsa, dengan isu rasisme, agama, dan ultra nasionalisme.

Selain menuding Prabowo menggunakan konsultan Rusia, Tim Kampanye Nasional (TKN) menuding kubu Prabowo menggunakan jasa konsultan yang berhasil memenangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Jejak digital itu bisa ditemukan dengan mudah dalam bentuk foto, video, maupun informasi-informasi di *social media*," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (6/2/2019).

Reaksi

Tudingan Jokowi ini kontan mendapatkan reaksi kubu Prabowo. Jelas hal itu dibantah. Koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, menanggapi dengan santai. Dengan berkelakar ia mengatakan kampanye yang dilakukan pihaknya bukan ala Rusia, melainkan ala lokal Bojongsong, yang merupakan nama tempat tinggal Prabowo di Bogor, Jawa Barat.

"Kampanye kami itu ala-ala



Tuduhan yang dilontarkan oleh Jokowi terhadap Prabowo merupakan kampanye terencana. Ia menduga, kubu paslon 01 justru tengah melakukan propaganda name calling.

Bojongkoneng, jadi konsultannya dari Bojongkoneng. Bahkan *nggak* punya konsultan. Konsultannya ya di Bojongkoneng sana, yaitu Pak Prabowo sendiri. Bojongkoneng itu di Hambalang, Kabupaten Bogor, ya," tutur Dahnil.

"Jadi bohong kalau menyebut kami menggunakan konsultan Rusia. Yang benar adalah kami kampanye ala-ala Bojongkoneng. Dan kalau berdasarkan saran dari konsultan Bojongkoneng, ya khususnya harus joget-joget *dikit gitu* lo, joget-joget Gatotkaca," sambung eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Hal yang sama dikemukakan juru bicara BPN Ferdinand Hutahaean. "Saya pikir tuduhan itu tidak berdasar fakta dan data yang akurat," ujarnya kepada *Tirto*, Senin (4/2). Kalau *toh* itu benar, kata Ferdinand, apa salahnya bila Prabowo benar menggunakan konsultan asing. Ia menegaskan Prabowo tak menggunakannya. Ia menilai, penggunaan konsultan asing untuk kontestan Pemilu tak ada dalam aturan Pemilu.

"*Emang* apa salahnya pakai konsultan asing? *Kan* boleh? Tidak dilarang. Itu kalau bicara aturan, apalagi ini memang tidak pakai. Jadi saya pikir TKN sedang berupaya mencari kambing hitam agar tidak *dimarahin* oleh Jokowi," kata Ferdinand.

Ia menduga Jokowi tak mendapatkan informasi yang akurat dari timnya. Ini sangat memalukan bagi seorang Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden. "Ini memalukan untuk seorang Presiden mendapat info yang asal dan tidak tervalidasi," jelas Ferdinand.

Selain membantah, kubu Prabowo melakukan serangan balik. Juru bicara BPN Andre Rosiade menuntut penjelasan Jokowi tentang penggunaan konsultan asing yang pernah dilakukannya. Justru ada informasi dan jejak digital bahwa Jokowi pernah menggunakan jasa konsultan politik top asal AS Stanley Greenberg. Dalam web *www.Political-Strategist.com* nama Jokowi masuk dalam daftar klien Greenberg dari berbagai penjurur dunia.

Nama Jokowi juga tercantum di laman Wikipedia tentang Greenberg. Menariknya nama Jokowi saat ini sudah hilang. Padahal nama itu tercantum sejak 17 Jan 2017. Namun terhitung tanggal 24 Nov 2018, nama Jokowi hilang dari daftar klien Greenberg. Saat ditelusuri jejak digitalnya, yang mengubah data di Wikipedia adalah pengguna tanpa nama (*anonymous user*). Lokasi pengguna tertera pada 6°10'27.8"S 106°49'45.8"E, atau berada di perkantoran sekitaran Monas. Diduga

kuat yang mengubah adalah seseorang yang berada di Jakarta. Mereka tidak ingin ada nama Jokowi di situ.

Ini mengundang kecurigaan, mengapa nama Jokowi "dihilangkan." Padahal penggunaan konsultan asing biasa saja. Tak ada hubungannya dengan antek asing seperti disampaikan Jokowi. Isu Jokowi menggunakan jasa Greenberg sebenarnya sudah berembus lama. Pada Pilpres 2014 akun *@Triomacan* yang diketahui di kelola Raden Nuh, dkk sudah menyebutnya.

@Triomacan menyebut yang mendatangkan Greenberg adalah konglomerat James Riady. Greenberg dikenal sebagai konsultan top Partai Demokrat. Sejumlah presiden asal Partai Demokrat seperti Clinton dan Obama adalah klien yang dibantunya hingga sukses.

Bersama Clinton, Greenberg disebut sebagai "Arkansas Connection" mengacu pada kota asal Clinton. Keluarga Riady dikenal sangat dekat dengan Clinton sejak dia menjadi jaksa agung dan kemudian gubernur negara bagian Arkansas.

Tidak ada bantahan resmi, baik dari Jokowi maupun James Riady. Sempat muncul bantahan dari Projo, pendukung Jokowi.

Berkas Lama Intervensi Asing Dukung Jokowi

Menarik saat membuka jejak digital masa lalu ketika Jokowi dan Prabowo maju sebagai kandidat presiden 2014. Menurut Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman, Pemilu Presiden 2014 sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembunuhan karakter Prabowo Subianto.

"Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY" ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014). Berikut daftar delapan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014 yang dikumpulkan oleh NCID:

- 1) Pernyataan keberpihakan dari *Majalah TIME* dan *Majalah The Economist*. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.
- 2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI.
- 3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengampunyeakan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo.
- 4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette.
- 5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense.
- 6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.
- 7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta.
- 8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada *Wall Street Journal* bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. []

Strategi

Menurut konsultan media dan politik Hersubeno Arief, tuduhan yang dilontarkan oleh Jokowi terhadap Prabowo merupakan kampanye terencana. Ia menduga, kubu paslon 01 justru tengah melakukan propaganda *name calling*. Sebuah strategi propaganda memberi nama buruk. Tujuannya agar publik menolak apapun yang disampaikan Prabowo-Sandi, tanpa lebih dahulu mengecek faktanya.

Ia menyebut langkah itu, dalam bahasa Jawa, sebagai *waton suloyo*. Seenaknya sendiri. Yang penting beda. Kalau perlu bertengkar, ya dijabani.

Para jubar dan petinggi parpol pendukung paslon 01 secara massif selalu memberi label hoaks kepada paslon 02. PSI misalnya pernah memberi "Kebohongan Award" kepada Prabowo-Sandi. Ia kemudian mengutip pendapat mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli tentang operasi ini. Menurut Rizal, kubu paslon 01 punya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam empat tahap: *Pertama*, modal utamanya adalah

ngotot. Meskipun tidak punya dan tidak didukung dengan data, harus tetap ngotot. Apapun risikonya.

Kedua, harus dimintakan apa saja data-data, dan fakta di lapangan dari mereka yang tidak mendukung Jokowi tersebut.

Ketiga, kalau dijawab dengan diberikan data-data dan fakta yang merugikan Jokowi, maka data tersebut harus dibilang hoaks. Jangan keluarkan kata apapun dalam menghadapi data-data dan fakta lapangan, kecuali cepat-cepat bilang hoaks.

Keempat, kalau ngotot tidak kuat, minta data-data dan fakta lapangan juga tidak kuat, setelah itu dibilang hoaks juga tidak kuat, maka langkah selanjutnya adalah laporkan saja ke polisi.

Hersubeno menduga pernyataan Jokowi soal "Propaganda Rusia" tampaknya dimaksudkan untuk memberi pukulan pamungkas. Sayangnya kosa kata Rusia menjadi sangat sensitif ketika disampaikan oleh seorang kandidat yang juga presiden petahana. []

emje dari berbagai sumber



Rezim Antek Asing?

Jokowi saat ini memiliki konsultan asing Jack Ma, pendiri perusahaan berbasis teknologi Alibaba, dari Cina.

Presiden Jokowi membantah dirinya antek asing. Ini diucapkan di beberapa kesempatan. Namun, kebijakan yang diambilnya justru menunjukkan bahwa rezim yang dipimpinnya pro kepada asing dibandingkan kepada rakyat.

Pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengungkapkan indikasi rezim Jokowi sebagai antek asing. Ia menyebut ada tiga pilar ekonomi sebagai tanda-tandanya. *Pertama*, menyandarkan pembangunan pada investasi swasta dan asing; *kedua*, menyandarkan anggaran pada utang kepada swasta dan asing; dan *ketiga*, menyandarkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan rakyat pada barang industri, jasa, dan pangan impor.

"Ketiga hal tersebut sebagian besar dalam genggaman pihak swasta dan asing," jelasnya kepada *Media Umat*.

Bila dirinci, bau pro asing ini bisa dirasakan dari kebijakan-kebijakan ekonominya. Paket kebijakan ekonomi yang berjumlah 16 paket telah dirilis oleh pemerintah. Di dalamnya, daftar negatif investasi (DNI) yakni bidang usaha yang tidak boleh dimasuki oleh modal asing, dihapus. Asing boleh

memilikinya bahkan hingga 100 persen. Para pengamat menyebutnya ini sebagai jalan menuju liberalisasi paripurna.

Paket yang terakhir yang dikeluarkan akhir tahun 2018 memastikan ada 303 bidang usaha yang direlaksasi [baca: dibuka untuk asing]. Dengan adanya kebijakan paket baru ini, total telah ada sebanyak 87 bidang usaha yang telah dilepas ke asing.

Sebelumnya, rezim Jokowi membebaskan visa bagi warga asing dari 169 negara. Orang asing boleh memiliki properti. Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menilai, paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak berpihak kepada rakyat kecil kecuali untuk menyenangkan pihak-pihak asing.

"Pak Jokowi memberikan kebebasan yang luar biasa kepada TKA (tenaga kerja asing). Pada 2015 dalam kurun waktu hanya tiga bulan, pemerintah telah menerbitkan dua Permenaker mengenai TKA. Yaitu memperlonggar TKA masuk ke Indonesia. Dengan cara menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia. Kemudian menghapuskan ratio antara jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Jokowi menciptakan lapangan kerja bukan untuk orang Indone-

sia tapi untuk tenaga kerja asing," ujar Rusdi (4/2/2018).

Gemar Impor

Bukannya mewujudkan kedaulatan pangan, rezim Jokowi sangat gemar impor. Yang paling menyedihkan adalah impor bahan pangan. Padahal, barang tersebut diproduksi di dalam negeri.

Yang paling spektakuler adalah impor beras. Pada saat beras menumpuk di gudang-gudang Bulog, Kementerian Perdagangan justru membuka kran impor beras dan ini didukung sepenuhnya oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan mengatakan Indonesia akan tewas kalau tidak impor. Padahal Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Budi Waseso menegaskan, hingga Juni 2019 Indonesia tidak perlu mengimpor beras lantaran ketersediaan beras di Bulog masih mencukupi.

Kebijakan impor beras ini jelas akan memukul petani dalam negeri. Terlebih lagi impor beras ini dilakukan menjelang musim panen tiba. Harga beras petani pasti akan hancur. Sementara petani asing dan importir beras akan untung.

Selain itu, rezim Jokowi terus mengimpor gula, garam, dan daging sapi. Padahal itu semua sebenarnya bisa dihasilkan secara swasembada di dalam negeri bila pemerintah mau. Terakhir, pemerintah akan mengimpor jagung. Di tengah produksi jagung yang diperkirakan surplus, rezim Jokowi malah memutuskan akan mengimpor komoditas tersebut sebanyak 30 ribu ton Februari ini. Alasannya untuk stok pakan ternak. Ini makin menambah derita para petani jagung.

Perpanjang Freeport

Dan yang paling heboh dari keberpihakan Jokowi kepada asing adalah memperpanjang kontrak PT Freeport. Dengan dalih perusahaan itu telah diambil alih

oleh BUMN yakni PT Inalum, pemerintah memberikan perpanjangan izin usaha Freeport hingga 2041. Padahal, pemerintah Indonesia seharusnya bisa mendapatkan 100 persen kepemilikan tambang emas itu pada 2021 karena kontrak karya Freeport sudah berakhir.

Di sisi lain, pembelian saham itu terasa janggal. Sebab, PT Inalum tidak membeli saham Freeport tapi membeli hak kontraktor Rio Tinto di Freeport dengan harga mahal. Semua tahu, Rio Tinto bukan pemegang saham PT Freeport Indonesia. Jadi semua yang dilakukan pemerintah bukan hanya merugikan negara tapi menguntungkan Freeport McMoran.

Fakta kian terbuka ketika PT Freeport Indonesia sepenuhnya masih dikuasai oleh Freeport McMoran sebab kekuasaan tertinggi tetap di tangan mereka. Logika bisnisnya, kalau Indonesia yang memegang saham mayoritas, kekuasaan tertinggi seharusnya dipegang oleh Indonesia. Ini tidak.

Belum lagi, belum-belum PT Freeport sudah mengumumkan tidak akan membagikan deviden kepada pemerintah Indonesia dalam tiga dua tahun ke depan. Ini adalah rugi dua kali. Sudahlah 'membeli' dengan harga terlalu mahal, tidak dapat deviden lagi. Siapa yang untung?

Migas

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo pro pengusaha asing. Hal ini dia buktikan dengan wilayah kerja (WK) minyak dan gas (migas) Indonesia yang banyak dikelola perusahaan asing.

"Antek Asing itu adalah rezim Jokowi. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2018 yang TIDAK MEWAJIBKAN PERTAMINA sebagai BUMN yang wajib mengelola bekas Wilayah Kerja Migas yang habis kontrak. Ini antek asing. Dan karyawan

Pertamina harus menggugat pemerintah atas ini," cuit @Ferdinand_Haeen dikutip dari akun Twiternya, Senin (4/2/2019).

Melalui peraturan itu, wilayah kerja migas yang telah habis kontrak tak langsung dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, lagi-lagi, dikelola oleh perusahaan asing sehingga membuat Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPP) menggugat pemerintah.

"Pada masa sebelumnya, Permen mewajibkan seluruh Blok Migas yang habis masa kerja wajib diserahkan ke Pertamina. Tapi atas kebijakan rezim Jokowi maka Permen itu diubah dan tidak lagi wajib ke Pertamina. Ini antek asing namanya. FSPP akhirnya menggugat pemerintah ke MA dan dikabulkan," jelasnya.

BUMN harus berjibaku sendiri tanpa dukungan pemerintah untuk mendapatkan WK yang sudah habis itu. "Blok Mahakam di Kalimantan, Blok Rokan di Riau adalah Blok yang didapat @pertamina dengan mati-matian bukan karena kehebatan Jokowi menyerahkan ke Pertamina. Blok Rokan didapat Pertamina dengan tender keras dan harus membayar ke pemerintah Signature Bonus sebesar Rp11,3 triliun. Jadi di mana peran jasa Jokowi?," tanyanya.

Dan yang tak bisa ditutupi sebagai kepanjangan tangan asing, Jokowi saat ini memiliki konsultan asing Jack Ma, pendiri perusahaan berbasis teknologi Alibaba, dari Cina.

"Ini salah satu bukti Jokowi antek asing. Bila mengacu pada pernyataan Jokowi tentang konsultan asing diasosiasikan sebagai antek asing, maka Jack Ma jadi penasihat e-commerce Indonesia menunjukkan rezim ini antek asing. Bahkan untuk kebijakan saja di nasihatinya," tegas Ferdinand seperti dikutip akurat.co.

Dengan indikasi yang ada, Jokowi antek asing? **emje**

Ngakunya Pancasila, Tapi Pro Asing

Sudah tak terhitung lagi ucapan para petinggi rezim ini bahwa mereka adalah Pancasilais. Bahkan mereka menggalakkan istilah: "Saya Pancasila, Saya Indonesia".

Namun, fakta menunjukkan, kebijakan yang ada justru tak menunjukkan hal itu. Bagaimana mungkin disebut Pancasilais kalau membiarkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia di tengah pengangguran bangsanya sendiri?

Bagaimana mungkin disebut Pancasilais jika kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai asing? Tak ada kedaulatan ekonomi dan pro rakyat. Dan banyak lagi.



Bahaya, Pemimpin Antek Asing

Dalam pandangan Islam, pemimpin harus merdeka. Ia tidak boleh berada dalam pengaruh siapa pun, baik orang, lembaga, terlebih lagi negara lain.

Setuju atau tidak setuju, Indonesia selama ini masih dalam kungkungan asing. Indikasinya sangat kuat. Indonesia bukannya tambah kuat, malah tambah lemah. Kedaulatan yang diimpikan sejak dibentuknya negara Indonesia makin terkikis.

Pergantian kepemimpinan nasional tak mampu menghadapi intervensi asing yang sangat kuat. Rezim tak bisa berkulit. Ini karena asing telah memasang perangkap jebakan yang membuat siapapun penguasanya harus tunduk mengikuti kemauan asing tersebut.

Inilah bahaya terbesar yang akan dihadapi Indonesia bila terus menerus dipimpin oleh penguasa antek asing. "Bahaya yang paling utama adalah ketiadaan kemandirian dari negara tersebut," kata pengamat politik internasional Budi Mulyana.

Begitu tidak mandiri hingga semuanya diatur oleh kehendak asing. Siapa penguasanya, bagaimana arah kenegaraan dilajukan, demi kepentingan siapa perundang-undangan dibuat, bahkan hal teknis praktis apa yang dilakukan.

"Sebenarnya bisa dikatakan negara itu sudah kehilangan jati dirinya. Dia selayaknya hadir bukan untuk dirinya, namun untuk kepentingan asing," paparnya.

Ia mencontohkan kasus divestasi Freeport. Dilihat dari berbagai sudut, yang diuntungkan bukan Indonesia tapi justru Freeport McMoran, Amerika. Juga kasus impor pangan yang demikian besar. Pasti petani asing yang menikmati hasilnya, bukan rakyat.

Secara ekonomi, menurut pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng, Indonesia akan semakin liberal. Liberalisasi ekonomi ini memungkinkan asing masuk lebih dalam lagi. Ini karena

rezim menyiapkan suasana kondusif bagi bercokolnya kekuatan asing disana.

Itu bisa berjalan karena asing telah menjerat Indonesia dengan utang yang menggantung. Utang itu menjadi instrumen yang digunakan untuk menekan dan mengarahkan arah pembangunan Indonesia sesuai dengan kehendak mereka. Campur tangan itu dalam bentuk penyusunan atau legislasi perundang-undangan dan kebijakan negara lainnya. Kasus penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) di akhir masa jabatan Soeharto menjadi contoh paling nyata bagaimana asing mendikte kebijakan negara di semua lini.

Salamuddin menyoroti dampak yang nyata sekarang yakni pembangunan infrastruktur. Tanpa perencanaan matang, pembangunan dilakukan secara ugal-ugalan dengan mengandalkan utang melalui BUMN. Ini bisa menyebabkan anggaran BUMN jebol dan tak lama lagi bisa ambruk karena utang yang menumpuk tapi tak sanggup membayar.

Akibat lebih jauh, seperti di beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan, asing [baca; Cina] masuk secara sempurna mengambil alih aset negara karena negara tak mampu melunasi utangnya. Kalau sudah demikian, rakyat tak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima dampak buruk kebijakan penguasa.

Harus Kuat

Dalam pandangan Islam, pemimpin harus merdeka. Ia tidak boleh berada dalam pengaruh siapapun, baik orang, lembaga, terlebih lagi negara lain. Dengan kemerdekaannya itu ia akan mampu menjalankan amanah kekuasaan secara mandiri, tanpa intervensi.

Namun jika menjadi kepanjangan pihak tertentu, apakah partai, golongan, atau kelompok, ini akan menghilangkan independensinya sebagai penguasa.

Namun merdeka saja belum cukup. Seorang pemimpin harus berkepribadian kuat. Orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin. Orang lemah sangat memungkinkan dipengaruhi oleh orang lain. Dan penerapan hukum memerlukan ketegasan dan keberanian.

Sikap dan karakter ini hanya ada pada diri orang berkepribadian kuat.

Makanya dulu Nabi SAW menolak permintaan Abu Dzar agar dijadikan pejabat negara. Sabda Nabi: "Abu Dzar, kamu ini lemah, sementara jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Pembalasan amanah itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah tersebut sesuai dengan haknya

dan menunaikan kewajiban dalam kepemimpinannya." (HR Muslim).

Syeikh Taqiyuddin an Nabhani menambahkan, di luar syarat kepemimpinan, keutamaan seorang pemimpin yakni (1) mujtahid; (2) pemberani; (3) politikus ulung. [] **emje**

Butuh Sistem Kuat

Negara yang kuat yang bebas dari intervensi asing memerlukan kepemimpinan yang kuat dan sistem yang kuat. Dua-duanya harus bisa dipenuhi. Seorang pemimpin yang kuat, independen, tapi mengelola negara dengan sistem yang lemah, tak akan mampu menahan intervensi asing.

Sistem yang kuat adalah sistem yang mandiri, tidak mengekor pada sistem lain. Kalau sebuah negara hanya mengikut sistem negara lain, maka dapat dipastikan negara itu akan menjadi subordinat negara besar, si pemilik sistemnya. Inilah yang terjadi di dunia saat ini. Hampir semua negara, kecuali sebagian kecil negara, dalam dominasi Amerika.

Maka untuk bisa melepaskan diri dari dominasi asing, mau tidak mau, suka tidak suka, harus membangun sebuah sistem sendiri. Sistem itu tentu berbeda dengan sistem yang ada. Tapi bukan sekadar berbeda, lebih dari itu sistem yang diyakini mampu menghadapi segala kondisi dan keadaan.

Jika sistem komunis telah hancur, sistem kapitalis harus ditinggalkan, maka pilihan satu-satunya adalah sistem Islam. Fakta menunjukkan sistem ini memiliki perangkat yang paripurna dalam mengelola sebuah negara adidaya di semua aspek kehidupan. Sistem ini mempunyai landasan yang sangat jelas dan tegas yakni akidah Islam. Ideologi Islam sebagai asas bernegaranya.

Fakta empiris menunjukkan, sistem ini pernah diterapkan lebih dari 10 abad lamanya. Dengan sistem ini, independensi kepemimpinan terjaga. Sebab, pemimpin yang di dalamnya 'dipaksa' hanya

menjalankan aturan yang sudah ada yang berasal dari Alquran dan Sunnah. Sedikit saja keluar dari itu, maka rakyat akan mengingatkannya. Di sinilah intervensi asing akan sulit menembusnya karena negara dijaga oleh ideologi Islam.

Sistem pemerintah Islam ini dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafa' ar Rasyiddin dan para khalifah berikutnya. Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW meliputi asas negara, struktur, perangkat, mekanisme pemerintahan, serta kelengkapan-kelengkapan administratif.

Sistem ini didasarkan pada prinsip: kedaulatan di tangan syariah dan kekuasaan di tangan rakyat. Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum. Islam telah menggariskan bahwa kedaulatan tertinggi untuk membuat hukum hanya di tangan Allah SWT semata. Manusia, termasuk khalifah, tidak memiliki kewenangan dan hak sama sekali untuk membuat hukum. Khalifah hanya berkewajiban mengadopsi hukum yang digali oleh para mujtahid dari nash syariah melalui ijtihad yang benar, untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun kekuasaan adalah kewenangan untuk mengangkat kepala negara (khalifah). Kewenangan ini ada di tangan rakyat yang disalurkan melalui sebuah mekanisme yang bernama baiat. Dalam Islam, rakyat memiliki kewenangan mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi kepala negara yang akan mengatur urusan mereka dengan syariah Islam.

Inilah negara mandiri yang bebas intervensi! []

Salamuddin Daeng,
Pengamat Ekonomi Politik

Tiga Pilar Ekonomi Terindikasi Asing

Dalam pandangan Islam, sangat jelas Presiden Jokowi adalah antek asing dalam berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Lantas bagaimana bila dipandang dengan konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945? Untuk mengupasnya wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Jokowi, "Jangan nunjuk-nunjuk dia antek asing, padahal dirinya sendiri antek asing"?

Landasan dalam pengelolaan ekonomi kita adalah konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945 yang asli yang sekaligus visi, misi strategi dan program ekonomi Indonesia. UUD 1945 yang asli itu spiritnya adalah anti dominasi dan eksploitasi asing. Sedangkan UUD amandemen spiritnya adalah menghamba kepada kepentingan asing mulai dari sistem politik hingga sistem ekonominya. Jadi jika penguasa bekerja dengan dasar UUD amandemen maka otomatis masuk dalam perangkat dominasi dan eksploitasi kapitalisme.

Apa indikasinya bahwa rezim Jokowi merupakan antek asing?

Dalam bidang ekonomi ada tiga pilar ekonomi pemerintahan ini yakni (1) menyandarkan pembangunan pada investasi swasta dan asing (2) menyandarkan anggaran pada utang kepada swasta dan asing (3) menyandarkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan rakyat pada barang industri, jasa, dan pangan impor. Ketiga hal tersebut sebagian besar dalam genggamannya pihak swasta dan asing.

Seharusnya dalam bidang ekonomi Indonesia sudah memiliki landasan yang sangat operasional yakni UUD 1946 Pasal 33 ayat 1, dan ayat 3. Ketiga pasal itu menegaskan tata cara pengelolaan ekonomi Indonesia. Sementara sekarang ini

pengelolaan ekonomi nasional keluar dari prinsip prinsip yang diatur dalam Pasal 33 tersebut.

Presiden Jokowi juga kembali menyebut "propaganda ala Rusia" dan menuduh lawan politiknya terus menebar hoaks dan ketakutan. Tanggapan Anda?

Masalah propaganda Rusia, secara persis kita tidak tahu apa motivasi Presiden Jokowi, mungkin mau menarik minat Amerika Serikat untuk memberikan dukungan. Tapi kalimat itu sekaligus menyerang bahwa pemilu AS beberapa waktu lalu tidak demokratis. Artinya ini serangan kepada pemerintahan Donald Trump.

Apakah pernyataan tersebut sudah terkategori istilah "maling teriak maling"?

Saya rasa Pak Jokowi sekarang ini mesti memprioritaskan kembali pelaksanaan janji-janji beliau saat mencalonkan 2014 lalu. Hal yang cukup menggerus elektabilitas petahan adalah konsistensi pada janji dan kemampuan untuk menepati janji itu.

Tapi Jokowi menepisnya dengan kebijakan pemerintah mengambil alih Blok Rokan, Blok Mahakam, dan kepemilikan saham 51 persen di PT Freeport. Apakah itu tidak cukup menunjukkan bahwa rezim Jokowi bukan antek asing?

Soal Blok Rokan, memang kontraknya berakhir dan Chevron tidak mau melanjutkan. Pemerintah melelangnya, kemudian Pertamina harus membeli Blok Rokan kepada

pemerintah senilai USD 784 juta dan sumber dananya dari utang. Sama dengan Blok Mahakam, kontraknya habis dan Pertamina membeli dari tangan pemerintah.

Sementara kasus Freeport juga masalah, habis kontrak 2021 dan Inalum membeli hak kontraktor Rio Tinto di Freeport dengan harga mahal, padahal Rio Tinto bukan pemegang saham PT Freeport Indonesia. Jadi semua yang dilakukan pemerintah bukan hanya merugikan negara tapi menyimpang dari amanat konstitusi UUD 1945 asli.

Uang untuk beli saham Freeportnya juga dari utang luar negeri ya?

Iya, Inalum Holding Company mengambil utang dengan cara menerbitkan *global bond*. Utang tersebut digunakan untuk membeli *participating interest* (PI) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Utang besar ini merupakan buah atau hasil dari penggabungan atau *holding* BUMN tambang.

Kita tidak akan membahas soal sah atau tidak membeli PI yang akan berakhir tahun 2021 tersebut. Biarlah hal ini menjadi bahan bahasan ahli hukum. Karena seharusnya yang dibeli BUMN adalah saham PT Freeport Indonesia. Sedangkan Freeport mengatakan "Company Not For Sale" perusahaan tidak untuk dijual.

Kita akan bahas nilai utang sangat besar, setara dengan seluruh aset BUMN *holding* tersebut, yakni mencapai 4 miliar dolar. Nilai *global bond* tersebut setara dengan Rp 58 triliun pada kurs (14.700/USD). Utang ini sangatlah besar dibandingkan

aset keempat perusahaan *holding* tersebut. Adapun perusahaan *holding* tambang adalah PT Timah, PT Bukit Asam, PT Antam dan Pt. Inalum sendiri sebagai induk *holding*. Aset keempat perusahaan tersebut sekitar Rp 60 triliun.

Total utang awal seluruh perusahaan *holding* tersebut mencapai Rp 26 triliun. Maka jika ditambah dengan utang baru senilai Rp 58 triliun maka total utang Inalum *Holding* mencapai Rp 84 triliun. Dengan demikian maka utang perusahaan telah mencapai 1,5 kali aset.

Apa artinya?

Seluruh perusahaan ditambah setengahnya lagi adalah milik rentenir internasional. Artinya juga jika seluruh perusahaan dijual beserta seluruh asetnya tidak akan bisa buat melunasi utang, bahkan harus ditambah lagi dengan aset negara yang lain.

Sementara untuk mengoperasikan tambang Freeport Indonesia diperlukan investasi yang besar. Padahal uang hasil utang telah digunakan untuk membeli lahan tambang milik negara sendiri.

Sedangkan sisa tambang Grasberg ada pada posisi *underground* 600 km dari 1000 km yang akan digali. Tentu membutuhkan teknologi dan uang. Apakah akan ambil utang lagi? Termasuk untuk memperbaiki lingkungan yang hancur lebur akibat tambang. Risiko sebagai pemegang saham mayoritas. Jadi ini baik ya?

Jelas enggak. Bagaimana pendapat Anda dengan rezim yang mengaku Pancasila tetapi

faktanya malah menjual negara?

Agenda yang paling membahayakan dari pemerintahan ini adalah proyek-proyek infrastruktur yang sangat adiktif terhadap utang dan modal asing. Padahal infrastruktur adalah hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara agar tidak membebani masyarakat dan ekonomi. Sekarang infrastruktur menjadi instrumen untuk mengeruk uang rakyat di semua sektor baik infrastruktur transportasi maupun non transportasi. Sementara BUMN infrastruktur sangat adiktif terhadap mega proyek baru, karena sumber *revenue* atau penerimaan yang buruk karena proyek yang tidak *properly*.

Apa bahayanya kalau rezim seperti ini kembali berkuasa?

Sekarang pun kita dalam bahaya dikarenakan anggaran negara habis tersedot untuk membiayai ambisi penguasa dengan sederet mega proyek infrastruktur yang sebetulnya tidak layak secara ekonomi, tanpa perencanaan yang matang, dan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat. Masyarakat tidak akan sanggup membayar tarif berbagai macam infrastruktur tersebut.

Pada bagian lain anggaran negara dan anggaran BUMN akan jebol. Khusus BUMN tampaknya akan ambruk lebih dahulu karena dipaksa membiayai subsidi, dikarenakan APBN tidak lagi menyubsidi sektor publik.[]



Budi Mulyana,
Pengamat Hubungan Internasional

Lepaskan Campur Tangan Asing dengan Khilafah

Bukan hanya sejak Jokowi berkuasa tetapi juga rezim-rezim sebelumnya, bahkan ternyata campur tangan asing begitu kuat sejak proses awal perumusan sistem kenegaraan Indonesia. Pilihan sistem kenegaraan yang diambil pun, tidak terlepas dari pengaruh hegemoni global pada saat itu. Lantas apa bahayanya dengan sistem dan rezim seperti itu? Bagaimana agar negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini lepas dari campur tangan asing? Di seputar itulah wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai pengamat hubungan internasional Budi Mulyana. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Presiden Jokowi, "Jangan nunjuk-nunjuk dia antek asing, padahal dirinya sendiri antek asing"?

Saya menilai pernyataan tersebut adalah reaksi dari situasi perpolitikan menjelang Pemilihan Presiden April nanti. Setiap kandidat berupaya saling menjatuhkan lawannya dengan melakukan berbagai pengopinionan dan kampanye. Salah satunya adalah dengan *labeling* antek asing.

Labeling antek asing ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa seseorang itu adalah antek. Orang yang diperalat, atau boneka dari pihak lain. Dalam konteks politik, tentunya adalah demi memuluskan kepentingan asing di negeri ini.

Maka tuduhan antek asing merupakan tuduhan yang merugikan citra sebagai seorang pemimpin, maka dari itu tuduhan semacam ini harus ditepis.

Salah satu alasan mengapa lawannya disebut antek asing karena menggunakan konsultan asing dalam pilpres. Tanggapan Anda?

Itu salah satu indikasi saja. Indikasi yang terang. Walaupun bukan berarti, kalau tidak menggunakan konsultan asing, seseorang bukan antek asing. Belum tentu juga. Karena bisa saja secara langsung atau tidak langsung, dia sudah membawa kepentingan asing di negeri ini.

Memang apa masalahnya kalau asing dijadikan konsultan dalam pemilihan presiden?

Tentunya sesuai dengan namanya, seorang konsultan adalah tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatannya. Dalam konteks pemilihan presiden maka pasti jasa kepenasihatannya yang diperlukan adalah bagaimana bisa memenangkan proses pemilihan presiden. Dan presiden adalah jabatan politik. Jabatan yang teramat sangat penting dalam suatu negara. Maka seorang penasihat yang ditugaskan untuk memenangkan pemilihan presiden, tentunya sarat dengan berbagai konsekuensi politik.

Berarti campur tangan asing bukan hanya masalah konsultannya tetapi juga sistemnya.

Ya.

Mengapa?

Dalam era globalisasi ini keterlibatan asing dalam suatu negeri adalah hal yang tidak terelakkan. Baik dalam tataran teknis, maupun dalam hal yang lebih filosofis, lebih mendasar. Sistem kenegaraan Indonesia berproses sejak awal perumusannya pada masa sebelum kemerdekaan. Dan pilihan sistem kenegaraan yang diambil, tidak terlepas dari pengaruh hegemoni global pada saat itu.

Apa saja indikasinya bahwa sistem yang diterapkan negara ini merupakan campur tangan asing?

Penerapan sistem kenegaraan yang meniru negara lain merupakan salah satu dari adanya campur tangan asing. Apalagi ketika proses terbentuknya negara melibatkan negara asing. Itu adalah indikasi yang tidak terelakkan. Lebih jauh apabila dalam penyusunan konstitusi dan perundang-undangnya pun melibatkan negara asing. Maka campur tangan itu adalah benar-benar nyata.

Apa bahayanya dari setiap indikasi tadi? Dan mohon sebutkan contohnya masing-masing.

Bahaya yang paling utama adalah ketiadaan kemandirian dari negara tersebut. Negara tersebut berdiri diatur oleh kehendak asing. Siapa penguasanya, bagaimana arah kenegaraan dilajukan, Demi kepentingan siapa perundang-undangan dibuat, bahkan hal teknis praktis apa yang dilakukan, maka bila ada campur tangan asing. Sebenarnya bisa dikatakan negara itu sudah kehilangan jati dirinya. Dia selayaknya hadir bukan untuk dirinya, namun untuk kepentingan asing.

Apakah Anda melihat ada campur tangan asing dalam pemerintahan rezim saat ini?

Ya.

Indikasinya?

Banyak kebijakan yang menguntungkan asing. Salah satunya misalkan mengenai disvestasi saham PT Freeport Indonesia. Walau dikemas sedemikian rupa, kental adanya kepentingan asing di dalamnya. Demikian juga misalnya kebijakan pro impor produk yang sebenarnya negeri ini sudah cukup. Impor garam, jagung, bahkan beras saat panen raya.

Jadi siapa pun yang menjadi kepala negaranya, bila sistem yang diterapkannya sama, pastilah jadi antek asing?

Belum tentu juga. Bisa jadi kepala negara yang terpilih memiliki keberanian untuk melepaskan dari kehendak atau campur tangan asing. Bila demikian, maka harus nyata pula langkah-langkah untuk membangun kemandirian. Langkah-langkah untuk terlepas dari jeratan asing yang bisa jadi sudah membelit secara sistemik. Mulai dari landasan filosofisnya hingga pada tataran teknis praktisnya. Dan itulah yang diharapkan dari munculnya kepala negara yang secara lantang menantang pengaruh asing di negerinya.

Lantas sistem yang seperti apa yang harus diterapkan agar negeri ini berdaulat dan tidak jadi antek asing lagi?

Tentunya agar negeri ini benar-benar berdaulat dan tidak berada dalam pengaruh asing yang kuat, harus dibangun

sistem yang memandirikan negeri tersebut. Asas negara harus benar-benar dibuat secara filosofis berdasarkan jati dirinya. Bisa hidup sendiri tanpa bergantung negara lain, walau bukan berarti bersifat isolatif yang mengasingkan diri dari pergaulan internasional. Memiliki sistem kenegaraan yang benar-benar lahir dari kehendak sendiri tanpa ada sedikitnya kepentingan asing di dalamnya.

Apakah sistem khilafah memenuhi kriteria tersebut?

Tentu saja. Sepanjang sejarah keberadaan Khilafah Islam, negara warisan Rasulullah SAW ini, menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang lepas dari campur tangan asing. Negara yang benar-benar mandiri, berdaulat.

Mengapa?

Karena khilafah berdiri di atas asas Islam yang kokoh. Asas yang menjadikan hanya tunduk di bawah kedaulatan Allah SWT. Keberadaan khalifah, sang pemimpin negara, pun harus tunduk kepada aturan Allah SWT. Dan rakyat bisa mengoreksi dengan tegas bila ada penyimpangan. Maka jadilah sepanjang sejarah keberadaan Khilafah Islam, negara ini menjadi negara adidaya dunia pada masanya.[]



Mereka Bicara Tudingan Antek Asing



Said Didu,
Stafus Menteri ESDM 2014-2016

Bukan Keberhasilan

Hati-hati dengan pencitraan bahwa sudah mengambil tambang dan blok migas dari asing. Karena yang terjadi adalah pelaksanaan UU, lalu kontraknya habis, dan itu dibeli oleh BUMN lewat utang. Inalum beli saham Freeport dan Pertamina "membeli" ke pemerintah lewat utang.

Pengalihan blok migas dan perubahan kontrak pertambangan yang terjadi saat ini adalah pelaksanaan UU Migas dan UU Minerba sehingga siapa pun presidennya saat ini akan terjadi hal tersebut karena presiden harus melaksanakan undang-undang.

Beginilah kalau program ditujukan untuk sekadar pencitraan politik maka kelayakan akan dibaikan. Masalah potensi muncul seperti membebani rakyat, lalu membebani APBN/APBD, atau akan mangkrak dan semoga ini tidak terjadi.

Banyaknya kebijakan yang terkesan *grasa-grusu* akhir-akhir ini seperti kenaikan harga BBM, pembebasan investasi asing, pembebasan Abu bakar basyir, pengangkatan beberapa pejabat, dan lain-lain yang sudah diumumkan dan dibatalkan berarti kajiannya kurang komprehensif.

Kita harus membedakan antara sikap politik dengan kebijakan publik. Sikap politik adalah strategi yang ingin dijadikan landasan untuk membuat kebijakan publik, sementara kebijakan publik adalah landasan cara dan mekanisme untuk melaksanakan program.

Sebagai contoh, tidak akan menambah utang, tidak akan membagi-bagi jabatan, tidak akan impor adalah sikap politik, tapi menambah utang, membagi-bagi jabatan, dan melakukan impor adalah kebijakan.

Pemerintahan yang baik adalah yang membuat kebijakan sesuai dengan sikap politiknya.[]



Ahmad Redi,
Dosen Universitas Taruma Negara dan Pengamat Hukum SDA

Freeport yang Lebih Untung

Untuk kondisi sekarang, saya melihat, proses pengambilalihan saham Freeport jadi tidak tepat. Alasannya, lebih banyak mudaratnya. KK Freeport berakhir 2021 atau kurang dari tiga tahun lagi.

Kalau kita membeli saham dengan harga US\$ 3,85 miliar untuk sesuatu yang sebentar lagi berakhir, saya rasa tidak pas. Lebih banyak biayanya. Berbeda kalau ada opsi lain.

Misalnya, tidak divestasi hingga 51 persen tapi kita biarkan Freeport menambang sampai 2021. Setelah itu, kita tidak memperpanjang izinnya, maka 100 persen saham akan jadi milik Indonesia. Sayang, opsi ini tidak pernah muncul selama pemerintah bernegosiasi. Padahal, itu idealnya.

Pastinya, Freeport lebih banyak diuntungkan alias menang banyak malah. Alasannya, jika Inalum jadi menguasai mayoritas, maka kewajiban yang dulu dibebankan ke Freeport turut beralih. Mulai pembangunan *smelter* hingga dividen negara yang belum dibayarkan.

Jelas kemahalan. Harga itu juga karena faktor Rio Tinto. Menurut saya, yang riil maksimal US\$ 2 miliar saja.

Hitungannya, seharusnya dari 9,36 persen saham Indocopper untuk menjadi sekitar 40 persen, kan, dikalikan empat maka keluar angka sekitar US\$ 1,4 miliar. Lalu ditambah sisa 9,36 persen milik Indocopper jadi sekitar US\$ 1,75 miliar. Itu logika saya sebagai ahli hukum pertambangan.

Dengan berhasil mengambil alih mayoritas saham Freeport, maka seolah-olah menunjukkan nasionalisme pemerintah. Padahal, banyak tersimpan borok, mulai harga kemahalan hingga ada opsi lain yang seharusnya bisa pemerintah coba.

KPK dan BPK harus mengawasi betul prosesnya. Jangan sampai ada kerugian negara di sini.[]



Yusri Usman,
Direktur Eksekutif CERl Center Energi and Resources Indonesia.

Cuma Pencitraan

Ya, boleh saja klaim mereka melawan antek asing dalam kasus Freeport, tetapi faktanya meskipun kita berhasil mencapai mayoritas pemegang 51 persen namun operasinya masih di Freeport McMoran, itu fakta.

Meskipun dengan pertanyaan besar, apakah wajar pembelian *participating interest*-nya, mengingat fakta terbaru, khususnya dari buku Bapak Simon Simbiring mantan Dirjen Minerba, dia bukan orang sembarang, dan pada saat surat yang katanya persetujuan oleh Menteri ESDM saat itu, pada April 1966 bahwa di situ disebutkan kerja sama operasi antara McMoran dan Rio Tinto bukan di blok A, tapi blok B untuk pengembangan.

Memang dikesankan, dibuat pertimbangan-pertimbangan yang seolah-olah tidak ada pilihan, ini jadi pertanyaan, *kan* lucu.

Kita sedang memperjuangkan hak kita, namun diberikan pertimbangan kita seolah-olah tidak berdaya. Tentu di level atas itu ikutin saja, jadi banyak ketakutan nanti.

Ya, karena ada banyak hal dari fakta yang terungkap ini jadi bisa dipersepsikan bahwa ini hanyalah pencitraan, malah ada yang mencurigai pemburu rente, karena dari setiap perpanjangan kontrak itu sering ada pemburu rente. Mungkin sekarang tidak bisa dibuktikan tapi nanti pasti akan terbuka.

Jadi memang ini hanya pencitraan, tidak ada itu melawan antek asing.[]



Romo Syafii,
Anggota Komisi III DPR RI

Siapa yang Antek Asing?

Dia harusnya membantah kalau memang dia bukanlah antek asing, tapi *kan* kebijakan impornya menandakan dia tidak pro ke Indonesia melainkan ke asing, sehingga kebijakannya itu mematikan potensi dalam negeri dengan kebijakan impor yang luar biasa itu. Jadi dari situ sudah bisa dilihat dia bekerja untuk siapa.

Kemudian bahwa peraturan kita misalkan ketenagakerjaan itu lalu yang harusnya lapangan pekerjaan itu diberikan kepada warga Indonesia ini malah buat asing. Kemudian adanya bebas visa sampai ke 169 negara itu juga tidak diimbangi, sedangkan kita tidak dapat bebas visa ke negara mereka. Jadi ini *kan* menjadi pertanyaan kita pro siapa? Jadi itulah yang seharusnya kita

tahu bahwa indikasi yang sudah saya jelaskan sudah menjelakna siapa yang pro terhadap asing?

Akan tetapi kalau kebijakan Jokowi itu jelas pro asing dan itu tidak bisa dibantahnya. Makanya sering kita bertanya Jokowi ini Presidenya siapa? Indonesia atau negara asing.[]



Ferdinand Hutahaean,
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat

Tuduhan itu Tidak Berdasar

Tuduhan mengatakan ke lawan menyebut antek asing itu tidak berdasar. Harusnya petahana membuktikannya ketimbang sekadar bicara mengatakan bahwa mereka bukan antek asing. Saya pikir tuduhan itu tidak berdasar fakta dan data yang akurat. Dan saya melihat Jokowi bisa menuduh demikian karena tak mendapatkan informasi yang akurat dari tim suksesnya. Tindakan Jokowi jadi terlihat memalukan untuk seorang presiden mendapat info yang asal dan tidak tervalidasi.

Kalau kami mengikuti logika berpikir Pak Jokowi bahwa menggunakan konsultan asing itu, meskipun di dalam undang-undang tidak dilarang ya, boleh-boleh saja, tetapi kalau mengikuti alur berpikir (Jokowi) ini, justru Pak Jokowi sedang menjustifikasi dirinya adalah antek asing sesungguhnya.

Saya mengatakan tak ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan konsultan politik bagi setiap peserta pemilu untuk mengatakan siapa yang antek asing. Oleh karena itu kalau benar tim Prabowo-Sandi menggunakan jasa konsultan asing, sebetulnya tidak ada yang dilanggar sama sekali.[]



Hatta Taliwang,
Aktifis dan Pengamat Ekonomi

Emosi Presiden Tak Stabil

Saya menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Jokowi tersebut menunjukkan bahwa akhir-akhir ini memperlihatkan emosi Presiden RI itu yang tengah tidak stabil. Dia sekarang sering memperlihatkan kepada khalayak ketidakstabilan emosi.

Seorang yang tengah berada dalam keadaan kuat secara kejiwaan tidak akan menyerang lawan. Sehingga yang melakukan penyerangan biasanya orang lemah agar dapat menggerogoti pihak yang kuat, dalam hal ini yaitu Prabowo.

Kemudian saya melihat serangan yang dilakukan oleh Jokowi sebagai bentuk strategi pertahanan. Kondisi kecemasan yang membuat Presiden tertekan secara psikologis sehingga alam bawah sadar melakukan hal-hal sebaliknya dengan kepribadian yang ditunjukkan ke publik selama ini.

Untuk menutup gejala tekanan mental yang beliau hadapi tersebut, Pak Presiden menyerang kompetitornya dan menutupi kecemasan yang mendera batin Pak Jokowi.

Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika Jokowi dikelilingi oleh penasihat yang mampu memberikan saran dan pengarahan yang baik. Namun penasihat di sekelilingnya bukan meredakan, namun justru mengompromi dengan memberi input-input negatif, sehingga tekanan psikologi itu semakin kelihatan.[]ghifari-fatih



Meneladani Kesabaran Ulul 'Azmi

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik (TQS al-Ahqaf [46]: 35).

Allah SWT berfirman: *Fa[i]shbir kamâ shabara ulû al-'azm min al-rusul* (maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai

orang-orang kafir, maka bersabarlah seperti bersabarnya ulul 'azmi dari rasul-rasul).

Secara bahasa, kata *al-'azm* berarti tekad hati untuk menyelesaikan suatu perkara. Demikian menurut al-Asfahani. Sehingga

menunjukkan makna *al-tab'îdh* (sebagian). Sehingga yang dimaksud dengan ulul 'azmi itu adalah sebagian rasul.

Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang siapa yang termasuk dalam ulul 'azmi itu. Namun menurut Ibnu Katsir, pendapat yang paling terkenal adalah lima rasul, yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah menyebutkan nama-nama mereka di antara nabi-nabi lainnya dalam dua ayat yang terdapat di dalam surat al-Ahzab dan surat al-Syura.

Ada pula yang memahami bahwa huruf *min* dalam kalimat *min al-rusul* bermakna *libayân al-jinz* (untuk menerangkan jenis). Sehingga, yang dimaksud dengan ulul 'azmi adalah semua rasul.

Sebagaimana telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan ajaran tauhid, nubuwwah, dan hari Kiamat. Akan tetapi, tidak semua kaumnya menerima dan mengimannya. Sebagian ada yang menolak, mengingkari, dan menunjukkan permusuhan yang keras.

Ayat ini memerintahkan Nabi SAW agar mengokohkan kesabaran sebagaimana para utusan Allah SWT lainnya yang termasuk dalam ulul 'azmi. Jika beliau menghadapi berbagai tantangan berat dari kaumnya, hal yang sama juga dialami para ulul 'azmi. Menghadapi semua itu mereka bersabar, maka sikap yang sama juga diperintahkan Allah SWT kepada beliau.

Tak Minta Disegerakan Azab

Kemudian dilanjutkan: *Walâ tasta'jil lahum* (dan janganlah kamu meminta disegerakan [azab] bagi mereka). Seruan masih ditujukan kepada Rasulullah SAW. Selain bersabar, beliau juga diperintahkan agar tidak meminta disegerakan datangnya azab. Dijelaskan Fakhruddin al-Razi bahwa ada kata yang dihilangkan dalam ayat ini. Diperkirakan kalimat utuhnya adalah: Janganlah kamu meminta agar disegerakan bagi mereka azab).

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Jarir al-Thabari. Menurutnya, Allah SWT berfirman: "Janganlah kamu meminta hal itu kepada Allah SWT untuk mereka. Sebab, itu akan turun, dan bukan sesuatu yang mus-

tahil."

Ibnu Katsir juga berkata, "Artinya, janganlah kamu meminta agar azab segera ditimpakan kepada mereka. Ini semakna dengan firman-Nya: *Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar* (TQS al-Muzzammil [73]: 11). Juga firman-Nya: *Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar* (TQS al-Thariq [86]: 17)."

Kemudian Allah SWT berfirman: *Kaannahum yawmayarawna mâ yû'adûn lam yalbisûn illâ sâ'ah min nahâr* (pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka [merasa] seolah-olah tidak tinggal [di dunia] melainkan sesaat pada siang hari).

Ini menggambarkan tentang keadaan orang-orang kafir yang menentang Rasulullah SAW tatkala telah ditimpa azab. Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Ketika menyaksikan azab Allah SWT yang telah diancamkan kepada mereka benar-benar telah turun, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat di siang hari. Beratnya siksa yang ditimpakan kepada mereka membuat mereka lupa jangka waktu mereka tinggal di dunia. Padahal, mereka tinggal di dunia dalam hitungan tahun dan bulan, sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya: *Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung"* (TQS al-Mukminun [23]: 112-113).

Kemudian Allah SWT berfirman: *Balâgh* ([Inilah]) suatu pelajaran yang cukup. Di antara makna *al-balâgh* adalah *al-tabligh* (penyampaian). Ini seperti dalam firman-Nya: *(al-Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia* (TQS Ibrahim [14]: 52). Makna itu pula yang terkandung dalam ayat ini menurut Imam al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili. Wahbab al-Zuhaili berkata, "Ini adalah al-Quran yang dinasihatkan Allah SWT dan Nabi SAW sebagai *tabligh* atau penyampaian yang cukup untuk mematahkan hujjah orang-orang kafir. Ini sebagaimana disebutkan dalam QS Ibrahim [14]: 52 dan al-Anbiya' [21]: 106).

IKHTISAR:

1. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar sebagaimana *ulul 'azmi* dari kalangan rasul.
2. Rasulullah SAW juga diminta untuk tidak memohon disegerakan azab bagi orang kafir.
3. Ketika orang kafir ditimpa azab, mereka merasakan hidup di dunia amat singkat.
4. Perbuatan fasik yang dilakukan suatu kaum menjadi sebab ditimpakan azab kepada mereka.

Dibinasakan

Lalu diakhiri dengan firman-Nya: *Fahal yuhlaku illâ al-qawm al-fâsiqîn* (maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik). Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Tidaklah Allah SWT membinasakan suatu kaum dengan siksa-Nya ketika diturunkan-Nya melainkan karena mereka menentang perintah-Nya, menyimpang dari ketaatan kepada-Nya, dan kufur kepada-Nya. Maknanya adalah tidak ada yang dibinasakan Allah SWT kecuali kaum fasik.

Dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir bahwa tiada yang dibinasakan oleh Allah kecuali hanyalah orang yang binasa. Ini merupakan keadilan dari-Nya, yaitu bahwa Dia tidak mengazab kecuali hanya orang-orang yang berhak mendapatkan azab.

Demikianlah. Rasulullah SAW yang ditugaskan Allah SWT untuk menyampaikan risalah Allah SWT diperintahkan bersabar dengan segala gangguan yang beliau hadapi. Perintah ini juga berlaku pada semua pengemban dakwah yang meneruskan dakwah beliau. Beliau juga diminta untuk tidak meminta disegerakan azab-Nya. Pasalnya, ketika mereka tetap berada dalam kekufuran, mereka akan ditimpa azab. Dan ketika mereka ditimpa azab, maka rasanya sangat cepat. Seolah-olah mereka hanya hidup sesaat dalam sehari. Diingat juga bahwa tugas beliau adalah menyampaikan risalah dan nasihat. Dan ketika sudah disampaikan, mereka tetap menyimpang dari kebenaran, mereka akan dihancurkan Allah SWT. Sehingga, azab yang ditimpakan kepada mereka sesungguhnya adalah sikap dan tindakan mereka, yakni fasik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. *Wa'lam bi al-shawâb.* []



keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar). *Khithâb* atau seruan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman kepada beliau: *Fa[i]shbir* (maka bersabarlah), atas pendustaan yang dilakukan kaumnya. Demikian dikatakan Ibnu Katsir.

Menurut al-Syaukani, huruf *al-fâ`* di awal ayat ini merupakan *jawâb al-syarth* dari syarat yang kalimatnya dihilangkan. Ketika kamu telah mengetahui hal itu dan bukti-bukti atasnya telah ditegakkan, namun tidak mempan bagi

ketika disebutkan *ulû al-'azm*, maka menunjuk kepada pelakunya. Artinya, mereka adalah *arbâb al-tsabbât wa al-hazm* (orang-orang yang memiliki sikap kokoh dan teguh). Ibnu Abbas memaknainya *dzû al-hazm wa al-shabr* (orang yang memiliki keteguhan dan kesabaran). Dijelaskan Said bin Jubair, Allah SWT menamai mereka dengan ulul 'azmi lantaran kuatnya keteguhan mereka.

Dalam ayat ini disebutkan *min al-rusul* (dari rasul-rasul). Huruf *min* dalam ayat tersebut

*Pencekalan dai
tersebut ke luar negeri
bukan hanya perkara
hukum, melainkan
adanya politik.*

Over Phobia, Paspor Gus Nur Ditarik



Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk meninjau kembali kebijakan penarikan sementara paspor milik Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Diduga kuat paspor Gus Nur ditarik sementara karena ia status tersangka.

Kuasa Hukum Gus Nur, Chandra Purna Irawan memprotes keras tindakan penarikan sementara paspor a/n Sugi Nur Raharja

alias Gus Nur, sekaligus menyalahkan Kepala Kepolisian RI, sehingga Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI melakukan penarikan paspor sementara Gus Nur pada 18 Desember 2018.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan pasal 25, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ("Permenkumham 8/2014"), penarikan paspor biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam

atau di luar wilayah Indonesia. Penarikan paspor biasa dilakukan dalam hal: pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau *red notice* yang telah berada di luar wilayah Indonesia.

Setelah meminta kejelasan ke pihak imigrasi Jumat (8/2), Chandra menjelaskan bahwa yang meminta penarikan sementara paspor Gus Nur adalah Polda Jatim, bukan inisiatif imigrasi. Chandra menilai permintaan tersebut berlebihan karena dugaan pidana yang di Polda Jatim ancaman pidananya maksimal 4 tahun.

"Maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ("Permenkumham 8/2014"), paspor Gus Nur tidak dapat ditarik," jelasnya.

Selain itu proses penarikan paspor sementara bukanlah syarat tindakan yang wajib dilakukan oleh penyidik, sebagaimana proses penahanan tersangka yang tidak wajib dilakukan.

"Karena itu, tindakan penarikan paspor sementara terhadap Gus Nur ini tergolong tindakan berlebihan, *over phobia*, unjuk *power* sebagai aparat penegak hukum, padahal patut diduga berpotensi me-

langgar konstitusi dan Hak Asasi Manusia," terangnya.

Ia menambahkan, Gus Nur bukanlah tersangka seperti korupsi atau kejahatan yang terkategori luar biasa, ini hanyalah UU ITE karena dakwahnya.

Chandra menduga pencekalan dai tersebut ke luar negeri bukan hanya perkara hukum, melainkan adanya politik. Keberadaan dakwahnya dikhawatirkan berpotensi menggerus suara rezim dalam pemilihan presiden karena setiap ceramah dapat dipastikan dihadiri banyak jamaah.

Penarikan paspor Gus Nur ini dipastikan akan menghambat dakwah yang bersangkutan. Belum lagi dalam Gus Nur juga telah terjadwal akan melakukan ibadah umrah, mengunjungi Baitullah, dan telah memenuhi keseluruhan syarat dan kelengkapannya.

Jumat (8/2) tim kuasa hukum Gus Nur dari LBH Pelita Umat mendatangi Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, untuk mengajukan keberatan atas penarikan paspor Gus Nur.

"Kita akan melakukan audiensi dengan Polda Jatim agar memberikan dispensasi terhadap Gus Nur agar dipermudah melakukan ibadah umrah dan dakwah di Australia," pungkasnya. **ghifari**

*Secara hukum, mustahil
korupsi kepala daerah
dilakukan secara sendiri dan
mandiri. Pasti melibatkan
banyak pihak, baik pemerintah
maupun sektor swasta.*

Bupati PDIP Mega Korupsi Rp 5,8 Triliun

Kader-kader PDIP rupanya tak kapok-kapok makan uang negara. Pejabat daerah asal PDIP menempati rangking pertama yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anehnya, penangkapan itu tak menghentikan tindakan haram tersebut.

Lagi-lagi KPK menangkap Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi (SH) sebagai tersangka dalam dugaan perkara korupsi. Diduga Supian menyalahgunakan wewenangnya dan membuat negara menderita kerugian sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan 711.000 USDollar.

"Indikasi kerugian negara cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK, seperti KTP elektronik (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 5,58 triliun). KPK menemukan adanya dugaan korupsi dalam proses pemberian IUP terhadap 3 perusahaan di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur tahun 2010-2012," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers, Jumat 1 Februari 2019.

Politisi PDIP sekaligus diduga telah

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan IUP kepada 3 perusahaan, yaitu PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI) dan PT Aries Iron Mining (AIM). Penyelidikan dalam kasus ini dilakukan melalui metode *case building* di luar OTT (operasi tangkap tangan).

Pengamat hukum sekaligus Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin meyakini, bahwa itu baru fenomena gunung es. Artinya, yang tidak terendus KPK jauh lebih besar lagi.

Menurutnya, korupsi itu sudah menjadi gejala umum sebagai ciri sekaligus cacat bawaan sistem demokrasi. "Tidak ada satu pun penguasa dalam demokrasi yang jadi pemimpin tanpa biaya, padahal tidak mungkin mengandalkan gaji untuk menutup biaya politik. Jalan satu-satunya ya harus korupsi," ujarnya saat wawancara dengan *Media Umat*, Ahad (10/2), di Jakarta.

Kemudian, itu menunjukkan kinerja partai rusak, sistem politik partai gagal menyiapkan kader partai untuk menduduki kursi kekuasaan dengan cara yang bersih

dan bebas dari korupsi. Bahkan, dalam beberapa kasus partai juga menjadi salah satu penyebab korupsi pejabat.

Selain itu, lanjut Ahmad, ada isu mahar politik yang harus dibayar oleh calon jika ingin dimajukan partai dalam Pilkada, menjadi penyebab para petualang kekuasaan politik wajib merogoh kocek banyak, baik dari kantong sendiri atau melalui donatur para kapitalis.

"Secara hukum, mustahil korupsi kepala daerah dilakukan secara sendiri dan mandiri. Pasti melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta," jelasnya.

Ini berdampak membuat rakyat sengsara dan ditariknya pajak hanya untuk dikorupsi.

Ahmad melihat secara normatif semua partai memang anti korupsi. Secara fakta, nyaris tidak ada partai yang steril dari kasus korupsi. Apalagi khusus PDIP, pada faktanya banyak kader PDIP yang menjadi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Bahkan, PDIP menempati urutan pertama kepala daerah yang tersangka korupsi.

Maka dari itu Ahmad mengajak kepa-



da semua pihak yang terlibat, untuk mengurai persoalan ini. Karena secara akidah, negeri ini memang membutuhkan aturan yang berasal dari Dzat Yang Maha Pengatur. **ghifari**

Sebut Pilpres 2019 Pertarungan Melawan Kelompok Radikal Pernyataan Ma'ruf Memprihatinkan

Para tokoh nasional, demi kepentingan politik, janganlah gunakan pemikiran Barat untuk menstigmatisasi ajaran Islam.

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Pemilihan Presiden 2019 nanti adalah pertarungan melawan kelompok radikal yang ingin berkuasa. Ma'ruf menjelaskan, perang ideologi yang dimaksud berasal dari kelompok yang bergerak di tiap lini.

Ketua MUI nonaktif itu menilai gerakan yang bukan lagi sebatas organisasi dan dakwah semata, namun menunggangi politik sebagai alatnya. "Jadi salah satunya Pilpres ini, Pilpres ini digunakan gerakan radikal untuk memenangkan, untuk mengambil peran kekuasaan," kata Ma'ruf di Kantor PC NU Kendal, Jawa Tengah, Senin (4/2).

Menanggapi hal tersebut pengamat sosial dan politik Iwan Januar menilai bahwa pernyataan Ma'ruf tersebut memprihatinkan. Selain akan menambah ketegangan politik dan memecah nuansa persatuan, sebagai orang tua yang dipandang dan dikenal sebagai ulama, harusnya wakil dari calon presiden Jokowi tersebut membuat situasi politik yang sejuk dan menenangkan.

"Pasalnya sampai sekarang isu radikalisme itu lebih berisi tuduhan dan mendiskreditkan ajaran Islam dan umat Muslim ketimbang fakta. Kalau radikalisme yang

dimaksud Barat adalah ketaatan umat pada agama, apakah itu berarti menurut Ma'ruf Amin salah?" jelasnya kepada *Media Umat*.

Iwan juga menjelaskan apabila tuduhan radikalisme itu untuk kelompok yang sering menggunakan kekerasan dan intoleran, bukankah hal tersebut sering dilakukan oleh kelompok yang mayoritas pendukung capres dan cawapres nomor urut 01.

"Nah sekarang siapa yang belakangan suka membubarkan pengajian, persekusi ustadz, bahkan lakukan kekerasan pada kelompok lain yang beda haluan? Itu kan para pendukung kubu Pak Ma'ruf Amin? Yang bikin rusuh di depan Masjid Jogokariyan Jogja itu parpol mana? Nah, harusnya Pak Ma'ruf Amin bisa teliti dan buat *statement* yang menyejukkan," tegasnya.

Tuduhan radikalisme kepada pihak oposisi atau yang berseberangan dengan pemerintah adalah tuduhan keji dan tidak berdasarkan fakta. Sikap intoleransi dan menang sendiri justru sering dilakukan oleh pro pemerintah.

"Nah itu dia, kenapa tuduhan radikalisme dilemparkan pada kelompok oposisi? PA 212 dan tokoh-tokohnya. Padahal seperti yang saya bilang tadi, siapa yang paling banyak melakukan persekusi? Pak Ma'ruf Amin harusnya bisa menilai," kata Iwan.



Pernyataan Ma'ruf Amin lanjut Iwan,

jelas berbahaya karena meningkatkan ketegangan sosial antar kubu, warga akan saling curiga dan menambah permusuhan, tanpa pernyataan tersebut tensi sosial politik saat sudah sangat panas.

"Sebutan 'kampret' dan 'cebong' setiap hari bisa kita baca di medsos. Pak Ma'ruf Amin selaku tokoh agama harusnya jangan

melempar bensin ke api. Makin membara nanti," ungkapnya.

Iwan juga menambahkan para tokoh nasional demi kepentingan politik janganlah gunakan pemikiran Barat untuk menstigmatisasi ajaran Islam. "Jangan jual agama hanya untuk dunia yang fana ini. Justru bela agama dan tunjukkan bila Islam itu adalah rahmat semesta alam," pungkasnya. **fs**

Jangan mengharap pada antek-antek penjajah kapitalis asing dan aseng, mereka tidak akan menolong sebab merekalah sendiri memusuhi syariat Islam.

Seruan Persatuan dan Khilafah Terus Menggema

Seruan persatuan umat dalam naungan Khilafah terus menggema di beberapa tempat. Salah satunya di Kota Bogor Jawa Barat. Bertempat di Majelis Taklim Majmu'atul Amanah, Komplek Sari Inten Jl Desa Kelurahan Ciomas Rahayu Kec Ciomas, Kabupaten Bogor.



Acara ini merupakan kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Majelis Islam Kaffah, Ciomas, Bogor, Pimpinan Ustadz Yusdian. Hadir sebagai shahibul bait adalah Ustadz Ikhwaniul Hakim, dan pembina Majelis Islam Kaffah: Ustadz H. Adilin dan Ustadz Adhi Maretnas.

KH Harun Al Rasyid, mudir salah satu pesantren di Bogor, menyatakan bahwa masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Bahkan masalah yang sangat vital dan strategis. Karena kepemimpinanlah yang menentukan hitam putihnya masyarakat.

"Kepemimpinanlah yang akan memutuskan sistem apa yang akan dijalankan di

bawahnya, baik sistem ekonominya, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya," ungkapnya.

Di Lampung para ulama menyatakan bahwa persekusi terhadap ajaran Islam seperti khilafah adalah bentuk kezaliman. Acara 'Ngopi Kampung' yang diadakan oleh majelis Dzikir Al-Muhajirin kali ini dihadiri beberapa tokoh umat antara lain Kiai Bambang, pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda 628, Ustadz Kholidin, pengasuh Kajian Jamiatus Shalihin Sragi, Ustadz Mufid Majelis Ta'lim Nurul Huda Tanjung Sari, dan Misbahul Anam, Ketua LBH Pelita Umat Korwil Lampung. Acara ini juga dihadiri oleh Bang Alfian selaku *Lawyer* serta hadir pula anggota penasehat pusat PS Bandrong Banten, KH Komaruddin Hasan.

Kholidin menjelaskan, Islam adalah



sebuah ideologi. Pernah diterapkan secara nyata selama berabad-abad lamanya. Keberadaannya memiliki fakta empiris yang tak bisa dipungkiri oleh peneliti Barat se-



kalipun. Di luar itu, ada ideologi lain yang berkuasa yakni komunisme dan kapitalisme. Komunisme telah runtuh tahun 1990-an. Sedangkan kapitalisme di ujung tanduk. Karenanya ia mengajak para tokoh umat berjuang menegakkan ideologi Islam dengan membangun peradaban baru melalui khilafah Islam.

Di Rembang Pasuruan, para kiai dan ustadz pengasuh majelis taklim menggelar acara Majelis Bisyaroh Nabawiyah yang mengambil tajuk "Kepemimpinan Dalam Islam", dilaksanakan pada pukul 06.30 WIB di kompleks Madrasah Nurul Mas'ud, Orobulu, Rembang.

"Antum itu sebagai ulama jangan berdiam diri! Sebab ke depan guncangan dalam membela agama Allah akan semakin besar. Jangan menjadi penonton saja. Jadilah benteng umat untuk melawan para pengusung paham-paham sesat, seperti

sekulerisme, kapitalisme, dan liberalisme," kata Gus Rohibni saat membuka acara.

Acara inti Majelis Bisyaroh Nabawiyah yakni penyampaian kalimat minal ulama. "Kondisi umat sekarang ini di berbagai negara, termasuk di Ghazali, Suriah, Uighur, dan juga Indonesia sendiri sangat menegaskan. Di sana menangi, mereka bersedih bukan karena bom dan penyiksaan tetapi karena saudara-saudaranya tidak ada yang memberikan pertolongan," kata Gus Fauzan Bisri, tokoh Rembang.

"Di manakah persaudaraan Islam saat terjadi penindasan kaum Muslimin di berbagai negara? Jangan mengharap pada antek-antek penjajah kapitalis asing dan aseng, mereka tidak akan menolong sebab merekalah sendiri memusuhi syariat Islam dan para ulama yang memperjuangkan," lanjut Gus Fauzan penuh semangat. **fs**

Ahok Perjelas Posisi PDIP

Umat Islam telah memahat di sanubari dengan kokoh, bahwa partai-partai pendukung Ahok adalah barisan partai pendukung penista agama.

Resmi sudah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau yang kini lebih akrab dipanggil BTP resmi bergabung dengan PDIP. Kabar-nya ia bergabung dengan partai banteng tersebut Januari lalu.

"Beliau sudah anggota PDI Perjuangan, sudah punya kartu PDI Perjuangan mulai tanggal 26 Januari (2019). Sudah resmi," kata Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama seperti dikutip *Tribun Bali*.

Tentu bergabungnya Ahok ini disambut gembira oleh kalangan banteng dan pendukungnya. Mereka berharap Ahok bisa terjun kembali ke dunia politik seperti sebelumnya.

Ketua HRS Center Abdul Choir Ramadhan menilai, langkah Ahok itu sebenarnya hak dia untuk memilih masuk partai yang mana. Padahal sebelumnya Ahok sempat mengatakan dirinya tidak ingin berpolitik lagi. Bahkan sempat menjelek-jelekkan partai lain yang akan maju ke Pilkada. Tapi sekarang dia ingin masuk ke politik lagi, kata Abdul Choir, itu sah-sah saja.

Menurut dia, setiap warga negara ber-

hak berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan, masuk ke partai politik mana pun. Karena itu, pilihan yang dilindungi undang-undang."

Jika Ahok memilih partai lain sebagai kendaraan politiknya tidak akan tepat. Hal itu dikarenakan banyak pandangan yang berbeda dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu kepada partai yang lain.

Ia menilai, masuknya Ahok ke PDIP tak akan menaikkan elektabilitas paslon dari nomor satu. "Tidak, malah menguntungkan untuk partai lain. Saya kira masyarakat semakin solid, bagaimana pun dia sudah menyakiti sebagian umat Islam," ujarnya.

Abdul Choir pun mengatakan, masuknya Ahok yang dulu pernah didukung oleh Partai Gerindra, juga tak akan menurunkan elektabilitas Prabowo. Tidak terpengaruh. Menurutnya, umat Islam pasti akan bersatu untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Sandi sebagai mana yang dihimbau oleh Habib Rizieq Shihab yang menyeru untuk tidak memilih partai yang mendukung penista agama.

Hal yang sama dikemukakan oleh pe-

ngamat hukum Ahmad Khozinudin. Menurutnya, umat Islam telah memahat di sanubari dengan kokoh, bahwa partai-partai pendukung Ahok adalah barisan partai pendukung penista agama. Dengan atau tanpa melibatkan Ahok, umat akan mengunggah perlawanan sengit kepada barisan partai penista agama, karena partai ber-lambang banteng itu ada di barisan paling depan.

"Umat Islam adalah kunci kekuasaan. Haram bagi umat, memberikan kunci kekuasaan kepada barisan penista agama," katanya.

Sikap PDIP yang memborong tokoh dari kalangan Islam berada di barisannya, menurutnya, tidak akan mengubah pandangan umat Islam terhadap barisan penista agama. "Penindasan dan kezaliman, tidak mungkin sirna dengan rayuan dan pencitraan," ucapnya.

Ia melihat saat ini PDIP sedang kesulitan untuk mengkonsolidasi suara umat, padahal beberapa gerbong sudah berhasil ditarik ke kubu rezim. Ternyata, ketika tokoh Islam ditarik ke kubu rezim, mereka hanya membawa gerbong kosong.



Komitmen uang dan sejumlah kepentingan politik, diyakini menjadi sebab merapatnya gerbong tokoh umat kepada rezim. "Tetapi yakinlah, mereka akan kehilangan umat. Mereka hanya membawa gerbong kosong, mereka akan dikecewakan rezim dan ditolak umat. Mereka, para oportunis yang akan teralienasi dari umat," paparnya. **ghifari**

Slamet Ma'arif Jadi Tersangka Tokoh Islam kembali Dikriminalisasi

Masyarakat pada tahap tertentu akan selalu mengaitkan peristiwa hukum penangkapan tokoh-tokoh di lingkaran Prabowo-Sandi dengan opini pembungkaman oposisi.



Ketua Presidium Alumni 212 Ustadz Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta, Jawa Tengah. Ia dituduh melakukan tindak pidana pemilu dalam acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jl Slamet Riyadi, Solo pada Ahad (13/1).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo, Poppy Kusuma,

menjelaskan, dalam acara itu Slamet sempat menyampaikan seruan "2019 Ganti Presiden". Selain itu, Slamet juga sempat menyampaikan supaya tak mencoblos gambar presiden dan kiai, tapi hendaknya mencoblos gambar di samping presiden dan kiai.

Penetapan Slamet sebagai tersangka ini menimbulkan banyak reaksi. Wakil Ketua MPR RI 2014-2019 Hidayat Nur Wahid menilai, tindakan kepolisian ini menambah

bukti bahwa hukum saat ini tajam kepada pihak oposisi dan tidak terhadap pihak-pihak pro pemerintah.

"Bandingkan dengan laporan-laporan yang sudah lama diadukan oleh Neno Warisman, Fadli Zon dan lainnya, tak kunjung ada prosesnya. Padahal hukum seharusnya ditegakkan dengan adil," ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mencermati, kondisi kali ini bisa menjadi blunder bagi kubu Jokowi jika opini yang berkembang di masyarakat tidak dikelola atau dikonsolidasikan dengan baik.

Pemerintah dalam hal ini harus mampu mengantisipasi perkembangan opini yang menyebutkan bahwa proses penegakan hukum terhadap sejumlah tokoh di lingkaran Prabowo-Sandi merupakan upaya membungkam oposisi.

Masyarakat pada tahap tertentu akan selalu mengaitkan peristiwa hukum penangkapan tokoh-tokoh di lingkaran Prabowo-Sandi dengan opini pembungkaman oposisi, meskipun pemerintah atau kubu Jokowi-Ma'ruf mengaku tidak mengetahui atau ikut campur dalam hal tersebut.

"Kalau narasi ini kuat di bawah tentu jadi *warning*, sekalipun [kubu] 01 atau pemerintah tidak tahu apa-apa. Tapi instrumen hukum dianggap sebagai bagian pemerintah saat ini, tentu orang mengaitkan,"

kata Adi.

Penetapan Slamet Ma'arif sebagai tersangka dilakukan setelah Tim Kemenangan Daerah (TKD) Jokowi-Amin Ma'ruf menganggap orasi Slamet pada acara tabligh akbar bermuatan kampanye sehingga mereka melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu di Solo.

Bawaslu Solo kemudian memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Bawaslu Solo juga sempat memanggil Ketua PA 212 Slamet Ma'arif untuk dimintai keterangan terkait ceramahnya dalam tabligh akbar tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu Surakarta membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tabligh akbar ke Polresta Surakarta.

Menurut pengacara Slamet Ma'arif, Mahendradatta, apa yang disampaikan kliennya dalam tabligh akbar di Solo tidak ada unsur pelanggaran.

Apa yang dilakukan Slamet juga dilakukan oleh para kepala daerah di berbagai tempat. Mereka sama sekali tidak disentuh oleh Bawaslu, meski sudah dilaporkan dan pidato mereka menyebar di tengah masyarakat melalui media sosial.

Tidak salah jika masyarakat beranggapan bila kepolisian telah menjadi alat kekuasaan. **fs**

Keuangan Negara 2015-2018 Bocor Diduga Lebih dari Seribu Triliun

Riset kecil-kecilan yang dilakukannya menemukan ada 26 item potensi kebocoran yang dapat dikaitkan dengan kebocoran potensi penerimaan negara.



Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran negara ratusan triliun per tahun bukan hal yang mengada-ada. Berdasarkan data-data yang ada, kebocoran itu masuk akal.

Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pemanangan Nasional (BPN) Harryadin Mahardika mengungkapkan ada potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp 1.000 triliun lebih. Kebocoran tersebut dikal-

kulasi sejak 2015 hingga 2018.

Ia memaparkan sejumlah data terkait kebocoran tersebut untuk menjawab tantangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pernyataan Prabowo Subianto ada kebocoran keuangan negara sebesar 25 persen atau dengan potensi Rp 500 triliun.

"Joko Widodo menantang hal yang disampaikan Prabowo tersebut dibuktikan dengan data agar tidak dianggap hoaks," katanya seperti dikutip *detikFinance*, Senin (11/2).

Riset kecil-kecilan yang dilakukannya menemukan ada 26 poin potensi kebocoran yang dapat dikaitkan dengan kebocoran potensi penerimaan negara maupun kebocoran akibat potensi pemborosan APBN serta korupsi.

Harryadin memerinci ke-26 poin yang dimaksud yakni 5 poin terkait korupsi, 10 poin terkait potensi kehilangan penerimaan negara, 6 poin terkait potensi denda yang tak tertagih atau diturunkan nilainya, 4 poin terkait potensi pemborosan anggaran, dan 1

poin terkait potensi piutang pemerintah yang tak tertagih.

"Pada akhirnya jumlah yang berhasil saya identifikasi adalah potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 triliun selama 2015-2018, atau sebesar Rp 278 triliun per tahun," sebutnya.

Ia menjelaskan, poin-poin dengan nominal kebocoran besar di antaranya dihapusnya denda kerusakan lingkungan oleh Freeport sebesar Rp185 triliun, potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor batu bara yang tidak dilaporkan Rp 133 triliun.

Berikutnya potensi pemborosan di kementerian/lembaga berdasarkan evaluasi Kemenpan-RB Rp 392 triliun, potensi piutang tak tertagih pemerintah pusat yang disisihkan Rp 127,3 triliun.

"Juga ada potensi pemborosan yang terkait pencabutan aturan larangan rapat di hotel, dan potensi kehilangan pendapatan akibat pembatalan kenaikan cukai rokok," lanjutnya.

Harryadin mengumpulkan informasi tersebut menggunakan sumber-sumber referensi yang ada di publik, di antaranya hasil kajian, laporan audit, vonis pengadilan, wawancara, materi seminar dan rilis media.

Ia berharap, informasi awal ini dapat menjadi bahan diskusi awal bagi masyarakat, media, LSM, dan pihak-pihak yang tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut. Dengan adanya data ini, ia berharap diskusi menjadi lebih objektif serta dapat memberi manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan dan anggaran negara.

Publik berharap, adanya temuan ini rezim Jokowi berani menyelidikinya sesuai dengan apa yang pernah disampaikan dalam Debat Capres I. Saat itu, ia meminta kalau ada pelanggaran hukum, laporkan. Pemerintah, katanya, akan menindaklanjutinya.

Beraniakah? **humaidi**

MUAMALAH

Akad di Atas Akad Orang Lain



Banyak kasus dalam transaksi bisnis, orang yang sudah melakukan akad, seperti jual-beli, misalnya, telah terjadi akad jual-beli antara seseorang orang dengan orang lain, dengan harga tertentu. Tiba-tiba, muncul orang lain, yang mencoba menawarkan dengan harga yang lebih tinggi.

Dalam kondisi seperti ini, haram hukumnya bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli untuk membatalkan akad jual-belinya, kemudian dialihkan kepada orang lain, dengan akad baru, dengan harga yang lebih tinggi, atau lebih rendah. Meski, masing-masing pihak tersebut sama-sama merelakan akad tersebut dibatalkan, tetapi mereka sama-sama berdosa di hadapan Allah SWT.

Jika keduanya melakukan jual-beli baru dengan pihak ketiga, tanpa membatalkan akad yang pertama dengan pihak kedua, maka akad pihak ketiga dinilai batal.

Yang berlaku adalah akad pihak kedua. Sedangkan akad pihak ketiga, yang datang kemudian, dinyatakan tidak sah, dan batal. Karena dinyatakan dengan tegas dalam hadits Nabi SAW, "*Hendaklah seseorang tidak menjual di atas jual-beli saudaranya*." [HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah]

Dalam hadits lain, Nabi SAW juga menyatakan, "*Hendaknya salah seorang di antara kalian tidak membeli atas jual-beli saudaranya*." [HR Ahmad dan an-Nasa'i dari Ibn 'Umar]

Sebenarnya, larangan jual-beli ini tidak hanya berlaku untuk kasus jual-beli, tetapi juga akad-akad yang lain. Dalam konteks akad yang mengikat [*lazim*], antara kedua belah pihak, seperti jual-beli, akad *ijarah*, begitu juga *khitbah* dan akad nikah, maka akad yang telah dilakukan antara kedua belah tidak boleh dibajak oleh orang lain.

Karena itu, seseorang yang telah melakukan akad

ijarah dengan pihak lain, tidak boleh dibajak oleh orang lain, dengan iming-iming gaji yang lebih mahal dan seterusnya. Begitu juga dengan akad *khitbah*, dan nikah. Ini dinyatakan dalam hadits Nabi SAW, "*Hendaknya salah seorang di antara kalian tidak mengkhitbah atas khitbah saudaranya, dan tidak pula melakukan penawaran atas penawaran saudaranya*." [HR Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat lain dinyatakan, "*Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, maka tidak dihalalkan untuk membeli atas jual-beli saudaranya, dan tidak mengkhitbah atas khitbah saudaranya*." [HR Muslim]

Karena itu, para imam empat mazhab sepakat, tentang keharamannya. Jual-beli adalah akad pertukaran barang dengan barang, sedangkan *khitbah*, adalah akad pertukaran jasa. Dua konteks ini dinyatakan menjadi satu, karena hukumnya sama-sama haram. Meski berbeda, yang satu terkait dengan akad barang dengan barang. Satu lagi, akad yang terkait dengan jasa.

Meski para ulama' membedakan, antara akad *ijarah* dengan nikah, dari aspek *tamlik* [memindahkan kepemilikan] dan *tamalluk* [kepemilikan] atas jasa, lantaran dalam *ijarah*, jasa bisa dimiliki dan dipindahkan kepada orang lain, sedangkan dalam akad nikah tidak, karena status jasa [*manafi*]-nya hanya sebatas dihalalkan untuk yang pasangannya. Tetapi, dua-duanya, *ijarah* dan nikah, sama-sama memiliki objek akad [*ma'qud 'alaih*] yang sama, yaitu jasa.

Karena itu, larangan keharaman jual-beli atas jual-beli orang lain, dan *khitbah* atas *khitbah* orang lain, bisa juga diberlakukan untuk larangan membajak akad *ijarah* orang lain. *Wallahu a'lam*. **har**



Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani masuk penjara. Ia divonis gara-gara menulis di media sosial. Rupanya ada yang melaporkan cuitan itu. Tanpa ada korban cuitan itu, ia pun dinyatakan bersalah. Hukum sudah jadi alat kekuasaan? Ikuti uraian Fokus.

TIRAN BERWAJAH LUGU?

Aparat begitu sigap menanggapi laporan yang memperkarakan pihak-pihak yang berseberangan dengan petahana.

"Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter," tutur Presiden Jokowi. Dalam penutupan ajang debat perdana capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, calon nomor urut 01 itu menyatakan

bahwa dirinya dan sang cawapres, Ma'ruf Amin tidak punya jejak rekam pelanggaran HAM.

Bukan kali itu saja Presiden Jokowi menepis anggapan kalau dirinya otoriter. Saat bertemu dengan santri dan pengurus Ponpes Minhajurusyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur,

dua tahun lalu, ia melontarkan bantahan kalau dirinya diktator. "Banyak di media sosial, orang-orang mengatakan Pak Jokowi otoriter, diktator. *Masak sih* wajah saya kayak begini diktator?" tutur Jokowi disambut tawa hadirin.

Boleh saja Jokowi berbicara demikian, tapi fakta menunjukkan sebaliknya. Semenjak berkuasa, pemerintahan Jokowi sudah beberapa kali mencokok kalangan yang berseberangan dengan kekuasaannya. Misalnya apa yang dialami Ahmad Dhani Prasetyo. Pentolan grup musik Dewa ini masuk hotel prodeo setelah dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara dengan tuduhan ujaran kebencian. Caleg Gerindra itu dinyatakan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian.

Kasus Ahmad Dhani ini bermula dari laporan Jack B. Lopian yang mengaku pendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Ia melaporkan tweet Dhani pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017.

Pada 7 Februari, misalnya, Dhani menulis: "*Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin...*" Pada 6 Maret, Dhani kembali menulis: "*Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya.*" Terakhir, pada 7 Maret, ia menulis: "*Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur... Kalian waras???*"

ADP juga dituntut di Jawa Timur oleh Koalisi Elemen Bela NKRI dengan tuduhan berlapis. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menyatakan, Dhani dijerat delik pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana pasal tersebut usai direvisi ialah maksimal 4 tahun kurungan penjara dan denda paling ba-

nyak Rp 750 juta. Dia juga dikenai Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran kebencian berbasis SARA.

Setelah ADP, tokoh lain yang juga terancam masuk bui adalah Rocky Gerung. Mantan dosen filsafat kampus UI yang kerap melontarkan kalimat-kalimat pedas pada kubu petahana, dilaporkan ke kepolisian oleh orang yang sama melaporkan ADP, Jack B Lopian. RG dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentang penistaan agama dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.

Selanjutnya adalah Ustadz Slamet Ma'arif, koordinator 212, yang dipanggil Mapolresta Surakarta atas laporan Bawaslu dengan dugaan melakukan pelanggaran kampanye saat mengisi agenda tabligh akbar PA 212 di Gladak, Solo.

Apa yang dialami ADP, RG dan Ustadz Slamet Ma'arif memang atas laporan warga, namun ada dua hal yang kemudian janggal untuk dipahami. *Pertama*, aparat begitu sigap menanggapi laporan yang memperkarakan pihak-pihak yang berseberangan dengan petahana. Hal yang tidak terjadi bila pihak yang dilaporkan adalah kalangan pro Jokowi. Fadli Zon menuturkan ia sudah melaporkan 8-9 orang namun belum ada satu pun yang ditindaklanjuti oleh aparat keamanan. Ini menguatkan keyakinan terjadinya diskriminasi hukum.

Soal pelanggaran kampanye, Bawaslu juga sigap menangani Slamet Maarif sebagaimana sigap menginvestigasi Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun sikap yang sama tidak diberlakukan pada Ridwan Kamil dan pejabat lainnya yang juga berkampanye dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

Kedua, pemerintah berulang kali memanfaatkan pasal

karet untuk menjerat kalangan yang berseberangan ke ranah hukum. Di antara UU yang rentan dijadikan pasal karet adalah UU ITE. Data yang dihimpun Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), hingga 31 Oktober 2018 setidaknya ada 381 korban yang dijerat dengan UU ITE.

Berdasarkan data itu, 90 persen dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik, sisanya dengan tuduhan ujaran kebencian. Umumnya pelapor berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan modal atau kekuasaan politik.

Peneliti ICJR Erasmus mengatakan, salah satu alasan UU ITE menjerat banyak korban adalah karena rumusannya yang masih belum jelas. Hal ini menciptakan ruang-ruang penafsiran yang membuat aturan ini jadi karet. Salah satunya soal definisi menyebarkan kebencian yang membuat Ahmad Dhani terjerat. Erasmus membandingkan rumusan ujaran kebencian di Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan Pasal 156 KUHP. Salah satu perbedaannya adalah, dalam KUHP terdapat kalimat "di muka umum".

Selain itu, Erasmus menjelaskan ujaran kebencian yang dimaksud dalam KUHP adalah ujaran kebencian dalam rangka menghasut. Sementara, penjelasan ini tidak disebut di dalam UU ITE.

Pernyataan Jokowi bahwa ia tidak punya 'tampang' diktator, bisa menjadi sebuah satire. Apakah seorang diktator ditentukan oleh wajahnya? Faktanya tidak. Di beberapa negara banyak diktator tidak bertampang bengis layaknya Mussolini atau Saddam Husein. Pol Pot, diktator Khmer Merah ini sudah membantai hampir 2 juta warga Kamboja, dikenal punya wajah *boyish*. Kekanak-kanakan.[]

iwan/ls

LAIN ADP LAIN LAISKODAT



Apa kabarnya Ge Pamungkas? Joshua Suherman? Nathan Suwanto?

Banyak orang mungkin sudah lupa dengan sebagian nama-nama di atas. Padahal mereka adalah orang-orang yang bermasalah secara hukum. Komika Ge Pamungkas dan Joshua Suherman pernah dilaporkan oleh sejumlah orang karena melakukan pelecehan terhadap ajaran Islam. Nathan Suwanto malah lebih parah, dalam akun medsosnya ia menyatakan rencana untuk menghabisi tokoh-tokoh Muslim seperti Habib Rizieq, Fahira Idris dan Fadli Zon. Bagaimana hasilnya? Nihil. Tak ada tindak lanjut dari kepolisian.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, sempat menyatakan kegemasannya pada perilaku aparat penegak hukum di tanah air. Fadli mengaku sudah melaporkan 8 sampai 9 orang, "Saya yang melaporkan, (saya) Wakil Ketua DPR RI. Ada banyak lagi, Ananda Sukarlan, Raja Juli, tetapi tidak ditindaklanjuti. Memangnya saya bukan warga negara Indonesia?" kata Fadli.

Belum lagi nama-nama seperti Victor Laiskodat, Ade Armando, Deni Siregar, Abu Janda, dan seorang pemuda warga keturunan Tionghoa yang menghina dan mengancam Presiden Jokowi, sampai sekarang tak ada kejelasan status hukumnya.

Beda dengan apa yang dialami seorang ibu rumah tangga asal Bandung yang langsung ditindak dan dijebloskan ke sel karena menyebarkan foto hoaks yang menyindir PDIP di medsos. Atau Ahmad Dhani yang dipaksa meringkuk di sel tahanan.

Tapi nama-nama yang disebut di atas? Damai sejahtera. Laiskodat malah terpilih menjadi Gubernur NTT. Semua aman karena sekubu dengan petahana, dan menyerang kelompok Islam dan oposisi. Jadi, masih tidak malu bilang ini adalah keadilan?[]



SAAT PANGlima SUDAH PENSIUN

Hukum kini dijadikan sebagai alat perang politik. Padahal seharusnya lembaga hukum tak boleh dicampuradukan dengan kepentingan politik.

Setiap warga negara pasti menginginkan keadilan. Namun belakangan, keadilan itu kian jauh dari harapan. Hukum tak lagi menjadi panglima. Supremasi hukum telah digantikan oleh supremasi kekuasaan. Akibatnya, hukum tidak netral dan menghambakan kepada kekuasaan.

Superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*), kini tinggal jargonnya saja.

Coba lihat langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang begitu cepat memproses Gubernur DKI Anies Baswedan karena salam dua jarinya dalam acara Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12). Anies dituding melanggar aturan kampanye karena posisinya sebagai kepala daerah.

Meski kemudian Anies lolos dari jerat hukum, tapi perlakuan Bawaslu ini mengundang keanehan. Sebelum Anies, sejumlah kepala daerah termasuk Ridwan Kamil terang-terangan berkampanye menyatakan dukungan pada Jokowi. Kejadian paling menghebohkan adalah ucapan Menkominfo Rudiantara "Yang gaji kamu siapa?" pada seorang PNS. Pak Menteri kesal karena anak buahnya memilih gambar 02 dalam acara internal yang diadakan Kemoinfo. Ucapan sang menteri langsung disambar para netizen dan sempat menjadi *trending topic* twitter nasional, juga dunia. Meski sudah dilaporkan, di antaranya oleh ACTA, tapi sampai sekarang belum ada tindakan dari Bawaslu.

Fenomena tumpulnya pisau hukum pada kubu rezim memprihatinkan. Keadaan ini memperburuk citra petahana dan membalikkan jargon dan kampanye Jokowi yang meminta warga untuk taat hukum. Per-

lakukan hukum yang tidak berimbang pada kubu oposisi dan kelompok Islam seolah membenarkan satire persoalan hukum, "Bila palu keadilan sudah berada di mulut anjing, maka keadilan menjadi milik majikannya."

Berat Sebelah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik sikap aparat kepolisian yang sigap apabila mengungkap kasus yang menyangkut kubu Prabowo Subianto. Sebaliknya santai apabila dihadapkan pada kasus kubu petahana.

"Itulah orkestrasi dari awal bahwa yang bermasalah tim Prabowo, *cepat* proses, bahkan dipakai untuk *nyerang* balik. Polisi pun bertindak hebat semua aparat bertindak sigap, tapi begitu ada nampak dari tim petahana melakukan perbuatan yang sama, kok santai," kata Fahri Hamzah seperti dikutip *tribunnews.com* (4/1/2019).

Fahri mencontohkan kasus La Nyalla Mattalitti yang mengaku menyebarkan fitnah Jokowi. Polisi tidak memproses La Nyalla, padahal kasusnya serupa dengan Ratna Sarumpaet.

"Kurang ribut apa yang dibuat oleh La Nyalla, dia *udah ngaku* seperti Ratna Sarumpaet kok *enggak* diproses? Kurang ribut apa laporan yang dibuat oleh orang Pak Fadli, bikin 9 laporan, ada orang namanya apa itu Janda dilaporkan, *enggak* diproses," katanya.

Termasuk, menurut Fahri, sikap polisi terhadap perkara Wasekjen Demokrat Andi Arief. Polisi mengerahkan pasukan untuk mendatangi rumah politikus ini. Padahal kesalahannya dibilang ringan.

Ia merasakan, hukum kini dijadikan sebagai alat perang politik. Padahal seharusnya lembaga hukum tak boleh dicampuradukan dengan kepentingan politik.

"Hukum sebagai alat untuk perang, maka pertama-tama kita harus mencemaskan, karena artinya lembaga hukum kita se-

dang dikoyak-koyak oleh kepentingan politik, yang ada dari kedua belah pihak yang bertarung," kata Fahri Hamzah.

"Dan keprihatinan ini harus menjadi pikiran semua orang, tidak boleh karena kita bersemangat pada salah satu kubu lalu mengesahkan penggunaan hukum sebagai alat politikya."

Menurut Fahri, netralitas dan lembaga sebuah penegakan hukum yang adil dan netral, bagi semuanya itu adalah segala-galanya. "Itu yang permanen, sementara politik ini sangat temporer sifatnya," sambungnya.

Untuk itu Fahri Hamzah menginginkan kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan arah kepada bangsa untuk segera mengambil sikap.

Netral

Fahri menyatakan bahwa aparat penegak hukum harus tampak bersikap netral. Dalam hukum tidak boleh ada kesan yang kuat didominasi oleh kubu tertentu menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

"Saya dalam posisi ingin menetralkan panggung hukum karena itulah yang paling penting dimiliki oleh suatu negara," papar Fahri Hamzah.

"Aparat penegak hukum tidak saja harus netral, tapi dia harus tampak netral."

"Dan saya ingin sekali agar dalam pertarungan ini aparat penegak hukum harus tampak netral, tidak boleh membiarkan ada kesan yang sangat kuat, bahwa yang diproses itu dan dikirim ke ruang sidang itu hanya berasal dari satu kubu," sambungnya.

Pasalnya, menurut Fahri Hamzah hal itu bersinggungan dengan keselamatan dari lembaga penegak hukum.

"Tolong penggunaan undang-undang, pasal-pasal karet dalam undang-undang yang telah teridentifikasi membuat sengketa di antara warga negara ini menjadi satu pertarungan

yang menyeret satu pertarungan penegakan hukum ini dihentikan, sebab ini berbahaya," jelasnya.

Menurutnya, ini berbahaya bagi keselamatan dan kebaikan dari lembaga penegak hukum dan juga sistem hukum yang ada. "Yang kedua, presidenlah yang paling punya banyak alat yang bisa digunakan untuk menghentikan ini karena presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan," imbuhnya.

Terkait hal itu, lantas dirinya menyinggung soal ujaran

kebencian yang tengah ramai diberitakan.

"*Hate speech* terutama yang ingin saya soroti itu sebagai mana artinya itu adalah bukan ujaran kebencian tapi pidato kebencian," papar Fahri Hamzah.

"Kalau kita baca *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) itu, ini dikaitkan dengan ajakan perang dan itu menggunakan panggung atau menggunakan panggung untuk menyerang kelompok berdasarkan suku, agama, dan lain-lain. Ini sedikit-sedikit dibawa makar, begitu," tambahnya.[] Is

SUARA AHMAD DHANI DARI PENJARA

Ahmad Dhani menulis surat terbuka (11/2) dari Rutan Madaeng, Surabaya. Berikut kutipannya.

Selama 14 hari ini telah terjadi salah persepsi soal pemberitaan Ahmad Dhani di Penjara. Perlu saya luruskan kembali, Bahwa saya, Ahmad Dhani tidak dipenjara karena menjalani VONIS 1,5 TAHUN.

Saya, Ahmad Dhani Ter PENJARA karena PENETAPAN PENGADILAN TINGGI YANG MENETAPKAN SAYA DI PENJARA 30 HARI.

Tolong ini di GARIS BAWAHI.

Kami melakukan upaya BANDING atas VONIS PENGADILAN NEGERI, maka seharusnya saya tidak ditahan seperti LAZIM nya.

Contohnya dalam Kasus Buni Yani yang dieksekusi di tingkat KASASI.

Jadi tolong media tanyakan kepada PENGADILAN TINGGI, Kenapa saya ditahan selama 30 hari?

Kenapa yang lainnya ketika Banding tidak ditahan, kok saya ditahan 30 hari?

Lalu di hari yang sama keluar KETetapan BARU yaitu AHMAD DHANI DIPINDAH KE RUTAN MEDAENG HINGGA PERSIDANGAN SELESAI.

Menurut saya ini adalah KETetapan YANG TIDAK LAZIM Karena saya bukan

PEMBUNUH

PERAMPOK

TERORIS

KORUPTOR

Demikianlah surat ini saya buat semoga ada PEMBERITAAN YANG JERNIH

*Terima kasih
Ahmad Dhani
Rutan Medaeng Surabaya*

Menjelang Perang Badar

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Jumlah kaum Muslim di Madinah bertambah. Mereka juga semakin kuat, tetapi kondisi ekonomi mereka mundur, karena harus berbagi dengan kaum Muhajirin yang meninggalkan Makkah, demi mempertahankan akidah mereka, dan tak membawa harta bendanya. Kaum Anshar pun hidup bersama kaum Muhajirin dengan berbagi dengan harta yang tidak banyak. Karena itu, kaum Muslim berpikir serius, bagaimana caranya mengambil harta mereka dari tangan Quraisy itu.

Kaum musyrik sendiri sangat terpengaruh dengan terbunuhnya 'Amru bin al-Hadhrani, yang dilakukan kaum Muslim, maka mereka ingin mengembalikan harga diri dan wibawa mereka di kalangan bangsa Arab.

Di sisi lain, jalur perdagangan antara Syam dan Makkah telah dikontrol kaum Muslim dan sekutunya. Itu artinya merupakan sinyal kematian perdagangan Quraisy, dan merosotnya pusat perekonomian mereka. Sebaliknya, cengkaman kaum Muslim, hari demi hari semakin meluas, yang jelas tidak sejalan dengan keinginan kaum Quraisy dalam menguasai bangsa Arab.

Faktor-faktor inilah yang menjadikan kaum Quraisy berpikir serius untuk pertama kali menghentikan pengaruh agama [ideologi] baru ini. Kaum Yahudi di Madinah, ketika itu, telah memprovokasi terjadinya perang dingin melawan kaum Muslim. Mereka berusaha terus-menerus menciptakan masalah bagi kaum Muslim. Mereka melakukan kewajiban sebagai barisan kelima [cadangan] bagi kaum Quraisy.

Setelah Rasulullah mengutus Datsan bin Abdullah bin Jahsy untuk memata-matai kekuatan kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW menyusun personel yang akan diajak berperang menghadapi mereka. Jumlahnya ketika itu 315 orang, terdiri atas kaum pria, baik Muhajirin maupun Anshar, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Ada dua orang penunggang kuda, 70 unta, unta satu dinaiki bergantian untuk dua, tiga hingga empat orang.

Kaum musyrik berjumlah 950 personel, mayoritas dari suku Quraisy. Mereka terdiri atas 200 penunggang kuda, dan sejumlah besar unta, dengan membawa logistik mereka. Pasukan ini dikomandoi oleh sejumlah tokoh sentral Quraisy.

Target kaum Muslim, adalah, pertama menguasai kafilah dagang Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dikawal oleh 30-40 orang. Kedua, bertahan di Badar, setelah penghadangan kafilah ini, sehingga kekuatan tentara kaum Muslim ini sampai ke telinga kaum Quraisy, sehingga mereka disegani, dan membiarkan kaum Muslim berdakwah, mendakwahkan agama mereka.

Sebaliknya, di pihak kaum musyrik, mereka mempunyai target melindungi kafilah dagang yang datang dari Syam. Kedua, setelah kafilah dihadang, hanya ada pilihan

berperang, atau kembali. Maka, mereka yang mengusulkan berperang, karena menuntut balas atas kematian 'Amru bin al-Hadhrani, sekaligus untuk menghancurkan kekuatan kaum Muslim, serta menyatakan kekuatan kaum Quraisy di hadapan bangsa Arab.

Rencananya kaum Muslim ingin menghadang mereka saat berangkat dari Makkah ke Syam, tetapi mereka terlambat. Akhirnya, mereka menghadang saat kafilah Abu Sufyan ini kembali dari Syam ke Mak-

bin Hasyim. Kemudian faksi Anshar, yang benderanya dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dua bendera ini sama-sama berwarna hitam.

Ketiga, pasukan belakang dipimpin oleh Qais bin Abi Sha'sha'ah.

Keempat, bendera kaum Muslim secara umum berwarna putih, dipegang oleh Mush'ab bin 'Umar bin Hasyim.

Pasukan kaum Muslim telah menempuh perjalanan, antara Madinah dan Badar, menyusuri jalur kafilah, yang jaraknya men-

Dan aku pun tidak lebih membutuhkan pahala ketimbang kalian." Nabi SAW ingin diperlakukan sama dengan yang lain.

Setelah Nabi SAW mendapat informasi tentang kaum Quraisy, dengan kafilahnya, maka Nabi SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan 'Umar. Kemudian al-Miqdad bin al-Aswad menyatakan, "Melangkahlah sebagaimana yang Allah titahkan kepadamu. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tak akan mengatakan, sebagaimana yang dikatakan kaumnya Nabi Musa as kepadanya, "Berperanglah kamu bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk saja di sini. Tetapi, pergilah bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan menyertaimu."

Nabi SAW menginginkan dukungan kaum Anshar yang telah membaiahnya di Aqabah. Ketika kaum Anshar menyadari, bahwa Nabi SAW menginginkan dukungan mereka, Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri, seraya berkata, "Kelihatannya Tuan menginginkan kami, wahai Rasulullah!" Jawab Nabi, "Iya." Sa'ad bin Mu'adz pun berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengimanimu. Membenarkanmu. Kami telah bersaksi, bahwa apa yang Tuan bawa, adalah haq. Kami telah memberikan janji kami kepada Tuan, untuk mendengar dan menaati. Melangkahlah, sebagaimana yang Tuan inginkan. Kami akan selalu bersama Tuan. Demi Dzat yang telah Mengutus Tuan, kalau Tuan menawarkan kepada kami untuk mengarungi lautan ini, kami pasti akan mengarunginya bersama Tuan. Tidak akan ada seorang pun yang meninggalkannya. Sesungguhnya kesabaran dalam peperangan adalah bentuk kejujuran dalam pertemuan, semoga Allah menunjukkan Tuan dari kami apa yang membuat Tuan bahagia. Melangkahlah bersama kami dengan berkah Allah."

Kata-kata Sa'ad bin Mu'adz itu membuat wajah Nabi SAW berseri-seri. Nabi pun mengajak pasukan kaum Muslim bergerak sampai di dekat Badar. Nabi berjalan di depan pasukannya bersama Abu Bakar, sehingga berhenti dan bertemu dengan orang tua Arab. Dia bertanya kepada Nabi tentang Quraisy, Nabi Muhammad dan sahabatnya, dan berita tentang mereka yang sampai kepadanya. Orang itu mengatakan, "Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian tentang semuanya itu, sampai kalian memberi tahu aku siapa kalian berdua?"

Nabi Muhammad bersabda, "Jika kamu memberitahu kami terlebih dahulu, kami akan memberitahu kamu." Dari orang Arab itu Nabi SAW tahu, bahwa kafilah Quraisy itu sudah dekat. Tetapi, Nabi SAW mengatakan kepada orang Arab itu, "Kami dari air." Setelah itu langsung pergi meninggalkannya, orang Arab itu penasaran, "Air mana? Air Iraq?" Begitu, intinya Nabi SAW sama sekali tidak membocorkan rahasianya, sehingga orang Quraisy tidak tahu posisi kaum Muslim. Wallahu'alam.[]



"Melangkahlah sebagaimana yang Allah titahkan kepadamu. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tak akan mengatakan, sebagaimana yang dikatakan kaumnya Nabi Musa as kepadanya, "Berperanglah kamu bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk saja di sini. Tetapi, pergilah bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan menyertaimu."

kah. Kaum Muslim tidak menduga, kalau Rasulullah akan mengarungi pertempuran sengit. Untuk melakukan serangan ini, Rasulullah pun melakukan sejumlah langkah:

Pertama, pengintaian, untuk mendapatkan informasi tentang arah kedatangan kafilah dagang ini, serta motif kaum Quraisy.

Kedua, kelompok terbesar terdiri dari dua faksi. Faksi Muhajirin, yang benderanya dipegang oleh 'Ali bin Abi Thalib, dan 'Umar

capai 110 km. Rasulullah SAW membagi unta yang ada, jumlahnya 70 unta kepada para sahabat baginda SAW. Orang yang mendapat giliran dengan 'Ali dan Mu'tsidd bin Mu'tsidd al-Ghanawi, satu unta digunakan bergiliran, sama seperti yang lain.

Nabi sendiri yang mendapat giliran, teman gilirannya merelakan untuk Nabi, "Kami jalan kami saja, dan biarlah bagianku untukmu, ya Rasulullah!" Dijawab Nabi, "Kalian berdua tidak lebih kuat daripada aku."



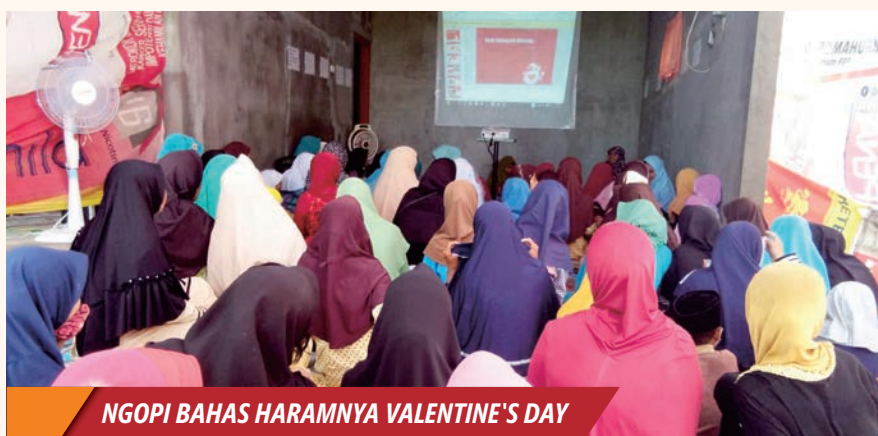
KOMUNITAS SAINS TOLAK PERGAULAN BEBAS

Lumajang. Dalam rangka membendung arus pergaulan bebas, puluhan siswa hadir kajian komunitas Sahabat Inspiratif Islam (Sains), Selasa (5/2) di Auditorium Denny's Bunch, Lumajang.[]



ULAMA BANJAR: TAAT SYARIAH WUJUDKAN BERKAH

Banjar. Majelis Riyadhus Sholihin gelar Jalsah Ammah: Mewujudkan Negeri Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur dengan Menerapkan Syariat Islam, Sabtu (9/2) di Masjid Multazam Pusdai, Kota Banjar, Jawa Barat.[]



NGOPI BAHAS HARAMNYA VALENTINE'S DAY

Pamekasan. Sekitar 200 remaja hadir kajian haramnya Valentine's Day yang diselenggarakan komunitas Ngobrol Inspiratif (Ngopi), Ahad (10/2) di Rumah Tahfidz Al-Ikhlas, Jhumiang, Pademawu, Pamekasan.[]



ULAMA PASURUAN: KHILAFAH SOLUSI UNTUK INDONESIA

Pasuruan. Dalam acara *Multaqa Ulama*, sejumlah kiai, ustadz dan tokoh masyarakat Pasuruan sepakat khilafah solusi untuk Indonesia, Ahad (10/2) di Aula Utama Kompleks Madrasah Nurul Mas'ud, Pasuruan.[]



KAJIAN ISLAM KAFAH: MEWASPADAI KEPIMPINAN ORANG-ORANG BODOH

Bogor. Sekitar 35 ustadz menghadiri Kajian Islam Kaffah: Mewaspadaai Kepemimpinan Orang-orang Bodoh yang diasuh KH Harun Al-Rasyid, Ahad (3/2) di Ciomas, Bogor.[]



MD AL-MUHAJIRIN BAHAS PELUANG WUJUDKAN KHILAFAH

Lampung. Majelis Dzikir Al-Muhajirin menggelar kajian bertajuk *Khilafah dan Peluang Mewujudkannya*, Selasa (5/2) di kediaman Kiai Bambang Jalan Pasir Sakti, Lampung Timur.[]



KOREAPI UNGKAP RAPOR MERAH VALENTINE'S DAY

Konawe. Komunitas Remaja Pejuang Islam (Koreapi) selenggarakan *Daurah Remaja Islam: Rapor Merah Valentine's Day*, Ahad (10/2) di Masjid Al-Huda Humboto, Konawe, Sulawesi Tenggara.[]



BEDAH BUKU SULTAN SURIANSYAH: PERUBAHAN EKSTRA PARLEMENTER

Banjarmasin. Forum Komunikasi Majlis Taklim Banjarmasin menggelar *Diskusi Bedah Buku "Sultan Suriansyah, Pionir Dakwah di Tanah Banjar"* karya Ahmad Barjie, di Gedung Yayasan Tahfizul Quran Ummul Qura, Komplek Bumi Indah III, Banjarmasin, Ahad (10/2).[]

Pemikiran Harus Dilawan dengan Pemikiran

Ketika Sultan Sulaiman merasa Mulla Qabiz, yang sesat itu harus segera ditangkap, maka Shadr al-A'dham berkata, "Wahai Paduka, pemikiran tidak boleh diperangi kecuali dengan pemikiran. Bukan dengan kekuatan fisik. Kita di Majelis ini memang tidak bisa menundukkannya, karena itu hamba biarkan dia pergi." Kata Sultan, "Kalau begitu bagaimana menurutmu? Apakah kita akan biarkan dia bebas menebarkan racunnya?"

Shadr al-A'dham menjawab, "Paduka, pertama-tama kita harus bisa menundukkannya. Setelah itu, barulah kita tegakkan sanksi had murtad kepadanya, jika dia tidak bertaubat." Sultan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa menundukkan dia, sementara dia penentangannya begitu rupa?" Shadr al-A'dham menjawab, "Paduka, hanya ada seorang ulama' yang bisa menundukkannya, wahai Paduka!" Tanya Sultan, "Siapa?" Jawab Shadr al-A'dham, "Beliau adalah Syekhul Islam, al-'Allamah Ibn al-Kamal!"

"Kalau begitu, segera panggil, dan biarkan beliau berdebat dengannya di depan kita," kata Sultan.

Akhirnya, forum debat ini pun berhasil direncanakan di Majelis Sultan Sulaiman al-Qanuni untuk kedua kalinya. Mulla Qari pun menghadiri majelis tersebut. Dia pun merasa besar kepala, dan senang dengan ketenaran ini. Tetapi, yang

dihadapi di depannya kini seorang ulama' yang berbeda. Dia sekarang harus menghadapi seorang ulama' yang sangat masyhur, Syekh Ibn al-Kamal.

Perdebatan kali ini tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba Ibn al-Kamal menutup semua pintu dan jalan di depan Mulla Qabiz. Dia pun dikurung dengan ilmu dan nalar ulama' hebat ini sehingga benar-benar tidak bisa berkutik. Syekh Ibn al-Kamal berhasil membuatnya tak berdaya, hingga tak sanggup berkata sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya, dan terdiam. Sultan telah mendengarkan debat tersebut dengan seksama. Ketika Mulla Qabiz ini kalah, dan tak berkutik, perasaan Sultan pun kembali senang dan tenang.

Ibn al-Kamal menunggu beberapa saat. Ketika Mulla Qabiz lama terdiam, maka Syekh menawarkan kepadanya agar bertaubat, dan meminta ampunan kepada Allah. Jika tidak, maka dia akan dinyatakan murtad. Kepalanya akan diberlakukan sanksi murtad. Namun, Mulla Qabiz merasa terhina dengan kekalahannya. Alih-alih mau bertaubat, justru sebaliknya, dia memilih kehinaan dengan bertahan dalam kemaksiatannya.

Jangankan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dia justru meledak kemarahannya dan memaki dan mengumpat Syekh Ibn al-Kamal yang dihormati itu. Saat itu, Syekh Ibn al-Kamal tidak peduli dengan umpatannya.

Kali ini, Mulla Qabiz tidak dilepaskan lagi. Dia ditangkap, dan digiring untuk mendapatkan ganjaran dari perbuatannya, sehingga bisa dijatuhi vonis dengan vonis murtad.

Apa yang dilakukan Khilafah 'Utsmani ini menarik, dan menjadi pelajaran berharga. Pemikiran, betapun menyimpangnya, tidak bisa diberangus dengan tindakan fisik, sebelum pengemban pemikiran tersebut dihadapi juga dengan pemikiran, sampai benar-benar kalah. Ketika sudah kalah, tetapi keras kepala, maka tidak ada tindakan yang tepat bagi orang seperti itu, kecuali dijatuhi hukuman mati. Namun, ketika hukuman mati itu dijatuhkan, orang itu terlebih dahulu sudah diberikan kesempatan bertaubat.

Begitulah, Islam memperlakukan orang murtad. Mereka memang harus dibunuh, tetapi dengan tahapan.

Pertama, disadarkan akan kekeliruan dan kesalahannya. Jika sudah sadar, tetapi tetap saja bertahan dengan kekeliruannya, dan tidak mau bertaubat, maka dikenai sanksi *had riddah*. Dalam proses itu, dia bisa ditahan.

Kedua, jika sudah disadarkan, dan diberi waktu tiga hari untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya dia bertaubat, dan memohon ampunan kepada Allah, maka dia tidak boleh dikenai sanksi *had riddah*. Sebaliknya dibebaskan.[]

KRISTOLOGI

14 Februari Hari Apa?

Oleh: **Hj Irena Handono**, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center



D i bulan Februari ini ada sebuah perayaan anak-anak muda yang sangat terkenal. Hampir di tiap tempat majlis taklim yang saya datangi, tidak hanya di Indonesia, bahkan saat saya berkesempatan dakwah di Singapura, Sabah-Malaysia, Hongkong, Bangkok, Amerika tiga belas negara bagian, semuanya ketika ditanya, "14 Februari, hari apa?" pasti dijawab, "Hari Valentin", "Hari Kasih Sayang", "Valentine Day". Dan tidak ada satupun yang menjawab, "Hari Selasa", "Hari Rabu" atau nama hari yang lainnya. Padahal saya yakin audiens yang datang dalam pengajian tersebut tidak ikut-ikutan merayakan Hari Valentin. Padahal saya menyebut *Valentine's Day* adalah *maksiat berkemas kasih sayang*.

Lalu kenapa dijawab 14 Februari sebagai 'Hari Kasih Sayang'? Inilah hebatnya sebuah 'pencitraan'. Kita pada saat ini masuk pada sebuah era yang disebut Era Pencitraan. Di mana sebuah

kebatilan yang dibungkus rapi dan sangat menarik, maka akan diterima begitu mudah dan dianggap sebagai sesuatu yang benar dan baik. *Valentine's Day* sesungguhnya merupakan kebatilan besar yang akan merusak generasi muda Muslim.

Sejarah Valentine's Day

Banyak tulisan yang beredar yang mengaitkan asal-usul *Valentine's Day* dengan perayaan zaman Yunani Kuno yakni Lupercalia, sebuah perayaan pagan yang dilakukan pada Februari, yang sangat tidak bermoral namun justru digandrungi masyarakat saat itu. Lalu gereja pada zaman Paus Gelasius meresmikan 14 Februari sebagai hari Valentine pada tahun 498 M sebagai bentuk sinkretisme perayaan pagan. Dengan harapan menarik orang masuk ke gereja dan mengurangi budaya amoral pada bulan Februari.

Namun jika diteliti lebih jeli lagi, *Valentine's Day* baru diperingati dan men-

jadi sebuah perayaan pada abad ke-19 Masehi. Dan yang makin mengejutkan, awal budaya peringatan ini justru dimulai dari Amerika.

Valentine's Day Hari Raya Nasional Amerika

Kisahannya sebagai berikut. Di Inggris pada tahun 1797 M, sebuah buku terbit dan terjual 'best seller' dengan judul "*The Young Man's Valentine Writer*". Buku ini sangat menginspirasi para remaja tentang bagaimana mengungkapkan cinta dengan kata-kata, tulisan, dan hadiah. Berikutnya beredar juga kartu-kartu ucapan yang dijual di toko-toko buku di Inggris. Hingga kemudian awal abad ke-19 di Inggris separuh populasi penduduknya menghabiskan uang untuk acara *valentine* sekitar 1,3 juta pounds pertahun hanya untuk kartu, bunga dan coklat. Dan sekitar 25 miliar kartu terkirim.

Budaya ini menyebar juga ke Amerika. Baru kemudian pada tahun 1840-an Leigh Eric

Schmid seorang penulis Amerika mencari asal mula sejarah Valentine dan ia membuat sedemikian rupa sejarah Valentine sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Dan kemudian sejak 1849, *Valentine's Day* ditetapkan sebagai hari raya nasional Amerika. Mulai tahun 1847, Esther A Howland (1828-1904) dari Worcester, Massachusetts memproduksi kartu *valentine* secara massal dan disebar di toko-toko buku di Amerika.

Sejak abad ke-19, bisnis perdagangan saat hari *valentine* menjadi bisnis yang sangat komersial. Tidak hanya kartu yang menjadi produk terjual tetapi juga bunga, coklat, pita, boneka Teddy Bear. Dan tak mau ketinggalan, mulai pada tahun 1980-an industri berlian mulai mengkampanyekan menghadihkan cincin berlian saat hari *valentine*. Dan menurut The US Greeting Card Association memperkirakan sekitar 190 miliar kartu *valentine* terkirim di Amerika.

Demikian, betapa lihaihnya kapitalis memanfaatkan kemaksiatan menjadi sumber uang.

Masyarakat Amerika sesungguhnya tidak mempunyai sejarah dan budaya asli. Mereka adalah bangsa penjajah yang merampok tanah bangsa Indian. Jika hal tersebut menarik dan populer, maka diadopsilah.

Senjata Perang Budaya

Yang paling penting dan harus disadari, dahulu di masa Paus Gelasius, Valentine dijadikan pancingan orang masuk gereja. Lalu mulai abad ke-19, Valentine dijadikan komoditi bisnis. Dan sekarang, abad ke-21, Valentine dijadikan sebagai alat perang budaya.

Budaya *Valentine's Day* menjadi gerbang masuknya budaya-budaya barat lain yang penuh dengan 'kebebasan' (baca: kemaksiatan). Dan inilah, sebuah cara yang sangat murah untuk menghancurkan sebuah bangsa, sebuah peradaban.[]



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Biro Humas Pemprov Sulawesi Selatan mengatakan banjir dan longsor awal 2019 ini menjadi bencana terbesar yang dialami Sulawesi Selatan selama satu dekade terakhir.



■ Banjir Sulawesi Selatan, awal 2019

Hingga Jumat (25/1) pukul 12.00 WIB atau tiga hari setelah banjir melanda, BPBD Sulawesi Selatan mencatat 106 desa terdampak bencana di 61 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Ke-13 kabupaten/kota itu mencakup Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar dan Sinjai.

Banjir mengakibatkan setidaknya 79 unit rumah rusak, 4.857 unit rumah terendam, 11.876 hektare sawah terendam banjir, 10 jembatan rusak, dua pasar rusak, 12 unit fasilitas peribadatan rusak, enam fasilitas pemerintah rusak dan 22 unit sekolah rusak. Sebagian besar permukiman yang tidak tergenang, terputus aksesnya, sehingga penghuninya terpaksa ikut mengungsi.

Banjir di Sulawesi Selatan, diakui Kabiرو Humas Pemprov Sulawesi Selatan, merupakan bencana tahunan. Namun tak pernah dalam satu kabupaten yang mengungsi sampai ribuan. Ia menjelaskan perlunya perbaikan di beberapa daerah aliran sungai (DAS) di sejumlah wilayah yang sudah berada dalam kondisi sangat kritis, akibat pembalakan liar di hutan-hutan di hulu Sungai Jeneberang di Gowa dan hulu Sungai Kelara di Jeneponto.

Banjir memang fenomena yang memerlukan "ilmu bumi" dan "ilmu langit".

Para ahli sumber daya air sudah berabad-abad memahami, bahwa ada empat jenis banjir, yaitu "banjir bandang" (biasanya di pegunungan akibat longsor menanggul air hujan, yang kemudian jebol), "banjir rob" (di pesisir akibat air pasang), "banjir luapan" (di tepi sungai), dan "banjir genangan" (di kota, akibat debit air oleh hujan dan limpahan, jauh lebih besar dari air yang diserap tanah).

Bagaimana banjir saat Daulah Islam masih tegak?

Sebenarnya wilayah Daulah Islam yang amat luas juga bersentuhan dengan berbagai potensi bencana alam. Wilayah sekitar gurun di Timur Tengah dan Afrika

Utara amat rawan kekeringan. Lembah Sungai Nil di Mesir atau Sungai Efrat-Tigris di Irak amat rawan banjir. Sementara itu Turki, Iran dan Afghanistan sampai sekarang juga masih sangat rawan gempa. Selain itu kadang-kadang wabah penyakit

yang hingga abad 18 belum diketahui pasti penyebab maupun obatnya datang menghantam, misalnya cacar (variolla) atau pes. Namun toh Daulah Islam tetap berdiri tegak lebih dari 12 abad.

Kalaupun Daulah ini kemudian

sirna, itu bukan karena kelaparan, penyakit, atau bencana alam, tetapi karena kelemahan di antara mereka sendiri, terutama elit politisnya, sehingga dapat diperalat oleh para penjajah untuk saling bertengkar, membunuh dan memusnahkan.

Ketika kota Baghdad didirikan tahun 758 M, bulan Juli dipilih sebagai waktu mulai karena dua astronom, Naubakht Ahvaz dan Masyallah percaya bahwa itu saat yang tepat, sebab air pasang sungai Tigris sedang maksimum, sehingga tanah yang tidak tergenang dijamin untuk seterusnya aman dari banjir.

Meski demikian, para penguasa



■ Nilometer yang dibangun al-Farghani untuk peringatan dini banjir Sungai Nil.

Muslim tetap membangun bendungan, terusan dan alat peringatan dini. Insinyur Al-Farghani (abad 9 M) telah membangun alat yang disebut *Nilometer* untuk mengukur dan mencatat tinggi air sungai Nil di berbagai tempat. Setelah bertahun-tahun mengukur, Al-Farghani berhasil memprediksi banjir sungai Nil baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Peradaban Islam memiliki jasa tak ternilai dalam mengendalikan air. Abu Rayhan al-Biruni (973-1048)

mengembangkan teknik untuk mengukur beda tinggi antara gunung dan lembah guna merencanakan irigasi.

Sementara itu Abū Zayd 'Abdur-Rahman bin Muhammad bin Khaldūn Al-Hadrami, (1332-1406) menulis dalam kitab monumentalnya "Muqadimah" suatu bab khusus tentang berbagai aspek geografi iklim.

Jadi, di mana manusia sebaiknya bermukim, memang seharusnya mempertimbangkan keberadaan sumber air serta iklim di situ dalam jangka panjang, sehingga kekurangan air maupun banjir bagi suatu negeri yang didiami manusia sudah dari awal dapat diantisipasi.

Pada 1206 al-Jazari menemukan berbagai variasi mesin air yang bekerja otomatis. Berbagai elemen mesin bukannya ini tetap aktual hingga sekarang, ketika mesin digerakkan dengan uap atau listrik.

Industri irigasi menjadi perhatian utama di negeri-negeri Islam, baik untuk air minum, wudhu, kebutuhan rumah tangga maupun pertanian pada umumnya. Ini berbeda dengan Eropa Utara yang relatif memiliki curah hujan



■ Noria untuk menaikkan air yang masih ada di Suriah

yang tinggi dan banyak sungai. Alat irigasi yang pertama-tama dikembangkan adalah *shaduf*, yaitu semacam katrol pemberat dengan ember pada ujungnya untuk menaikkan air dengan mudah. Katrol ini masih digerakkan dengan tenaga manusia. Alat yang lain adalah *saqiya* dan *noria*

(atau *na'ura*). *Saqiya* digerakkan dengan tenaga hewan (seperti keledai), sedang *noria* dengan tenaga air. Kedua alat ini sudah menggunakan roda gigi yang cukup rumit. Meski alat-alat ini sudah dikenal sejak sebelum kelahiran Islam, namun ilmuwan Islam telah menaikkan efisiensinya hingga lebih dari 60 persen. Al-Jazari, membuat lima jenis pompa air yang berbeda dari rancangan tradisional. Saat ini, sisa-sisa *saqiya* maupun *noria* masih bisa ditemui di beberapa desa di

Syria maupun Mesir, meski pompa listrik telah banyak menggantikannya.

Kemampuan peradaban Islam bertahan berabad-abad, bahkan terhadap berbagai bencana alam termasuk kekeringan dan banjir adalah buah sinergi dari keimanan, ketaatan pada syariat, dan ketekunan mereka mempelajari sunnatullah sehingga mampu menggunakan teknologi yang tepat dalam mengelola air. Inilah paduan antara ilmu langit (akherat) dengan ilmu bumi (dunia)

Jadi bencana dihadap lebih dulu

dengan ikhtiar. Daerah aliran sungai dijaga. Hutan-hutan di hulu dijaga. Pendangkalan sungai diantisipasi. Sebelum suatu daerah disulap menjadi kawasan permukiman, dimodelkan dan dihitung dulu dampak lingkungannya ke depan, jangan sampai kebanjiran, terdampak banjir atau bahkan menyebabkan banjir di tempat lain.

Penguasa Daulah Islam menaruh perhatian yang besar agar tersedia fasilitas umum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana. Mereka membayar para insinyur untuk membuat alat dan metode peringatan dini, mendirikan bangunan tahan bencana, membangun cadangan logistik, hingga melatih masyarakat untuk selalu tanggap darurat. Aktivitas jihad adalah cara yang efektif agar masyarakat selalu siap menghadapi situasi terburuk. Mereka tahu bagaimana harus mengevakuasi diri dengan cepat, bagaimana menyiapkan barang-barang yang vital selama evakuasi, bagaimana mengurus jenazah yang bertebaran, dan bagaimana merehabilitasi diri pasca kedaruratan.

Mereka bukan orang-orang yang hanya pandai pencitraan dalam seremonial yang dibumbui kata-kata "Ayo Tawakkal" atau pun orang-orang yang terlalu percaya diri lalu sombong menantang bencana.[]

Monogami, Alat Penjajah Belanda Mengkristenkan Nusantara

Meskipun tujuan mengkristenkan seluruh penduduk jajahan tidak tercapai setidaknya ajaran-ajaran Kristen diamalkan masyarakat Muslim Hindia Belanda. Dengan begitu, secara nonformal, Muslim Indonesia ialah sangat Kristen (baca: mimicry) dalam ajarannya.

Tidak berpoligami memang mubah, tetapi sejarah menunjukkan monogami merupakan upaya penjajah Belanda mengkristenkan Nusantara. Fakta tersebut diungkap Arief Muthofin dalam skripsinya yang berjudul *Christiaan Snouck Hurgronje Arsitek Urusan Perdata Kolonialistik Hindia Belanda* untuk meraih gelar sarjana Ilmu Syariah Jurusan Ahwalul Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada 2010.

Sepanjang peradaban Islam tegak, mulai dari Negara Islam pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh Khilafah Rasyidah, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah hingga Khilafah Utsmani termasuk berbagai Kesultanan Islam di Nusantara, poligami merupakan praktik pernikahan yang halal (legal), lazim dan bukan sebagai penyebab timbulnya masalah. Justru poligami dipermasalahkan ketika Belanda berhasil menjajah Nusantara tatkala berupaya mengkristenkan penduduknya untuk meminimalisir perlawanan terhadap kolonialisasi.

Arief Muthofin mencatat lima hal penting terkait monogami yang dipaksakan penjajah tersebut. *Pertama*, ide pernikahan harus monogami merupakan upaya kolonial ikut campur tangan dalam persolan ibadah atau agama murni. Padahal, Hurgronje dalam nasihatnya menyatakan, bahwa dalam hukum yang murni agama pemerintah hendaknya netral. Poligami merupakan hukum yang murni agama.

Justru poligami dipermasalahkan ketika Belanda berhasil menjajah Nusantara tatkala berupaya mengkristenkan penduduknya untuk meminimalisir perlawanan terhadap kolonialisasi.

Tetapi anehnya Hurgronje menginginkan kaum Muslimin melakukan monogami. Pernikahan harus monogami seperti diinginkan Christiaan Snouck Hurgronje ialah bentuk reduksi atas hukum Islam. "Kekayaan khazanah hukum Islam benar-benar dikerdilkan olehnya, hanya untuk mendukung cita-cita kolonialisme," tulis Arief.

Kedua, agar Muslim Hindia Belanda menjadi pelaksana amaliah orang (Kristen) Eropa yang hanya boleh menikahi seorang perempuan (memiliki satu istri). Karena kolonialisme tidak hanya untuk kepentingan kekayaan (*gold*) yang ada di Nusantara tetapi juga kristenisasi

(*gospel*).

"Meskipun tujuan mengkristenkan seluruh penduduk jajahan tidak tercapai setidaknya ajaran-ajaran Kristen diamalkan masyarakat Muslim Hindia Belanda. Dengan begitu, secara nonformal, Muslim Indonesia ialah sangat Kristen (baca: *mimicry*) dalam ajarannya. Sekaligus pengikut tertib hukum keluarga yang juga Kristen (Eropa). Sehingga 'tidak ada bedanya' antara Muslim dan Kristen karena kedua-duanya sama pelaksana ajaran sekaligus kepentingan Kristen (Eropa)," bebernya.

Ketiga, pernikahan monogami, seperti ini disebutkan Hurgronje akan mendorong Indonesia, ke arah dunia modern (kemajuan). Asas monogami sedang ingin memajukan Muslim Pribumi yang 'terbelakang' agar lebih dekat (seperti) kehidupan modern (Eropa) yang 'lebih maju'.

"Di sini, umat Islam pribumi, benar-benar sedang dikebiri oleh Abdul Ghaffar atau Hurgronje sebagai manusia 'terbelakang'. 'Terbelakang' dalam maksud kolonialisme adalah lebih mirip dengan moyangnya (kera). Asas monogami berupaya menjadi Muslim yang mirip kera bodoh ini semakin maju dengan mengikuti konsep keluarga Eropa yang keseluruhannya hanya monogami. Satu orang pun dilarang (haram) berpoligami (kira-kira) dengan alasan apa pun," terang Arief.

Keempat, alasan kebudayaan juga menjelaskan kepentingan di balik asas monogami. Para ulama Nahdlatul Ulama pernah memberikan pendapatnya dari sisi budaya ini. Yakni, Eropa dan Indonesia memiliki budaya yang berbeda dan masyarakatnya juga disusun atas sistem yang berbeda. Keliru jika Indonesia kemudian disamaratakan dengan Eropa bahwa segala bentuk pernikahan harus monogami.

Dalam Berita Nahdlatul Ulama No. 16, 1 Juli 1937, diterangkan suatu akibat laki-laki dilarang beristri lebih dari satu orang perempuan. Hal ini dicontohkan di Eropa, masyarakat yang anti poligami, memunculkan budaya baru. Yaitu, laki-laki biasa memiliki perempuan lagi dengan cara yang tidak benar atau pergundikan. Bahkan, muncul perkumpulan-perkumpulan hotel (*hotel-societeit*) yang melegalkan pergundikan.

Praktik pergundikan seperti itu pula seperti yang telah dilakukan Hurgronje dengan menikahi secara Islam perempuan pribumi: Sangkana dan Sadijah. Bagaimana tidak? Terbukti setelah pernikahan-pernikahan dalam Islam dengan dua perempuan pribumi tadi, Hurgronje pada 1906 kembali ke Belanda, lalu dia menikahi Ida Maria pada 1910. Ida Maria merupakan putri Dr. AJ Oort pensiunan pendeta liberal di Zutphen.

Hubungan pernikahan dengan Ida Maria tetap terjalin sampai Hurgronje meninggal dunia (26 Juni 1936) di Leiden. Sedangkan anak-anaknya dari mengawini perempuan pribumi dilarang ke Belanda (meskipun untuk belajar) sekaligus tidak boleh memakai 'Snouck Hurgronje' pada tiap-tiap namanya.

"Fakta ini merupakan bentuk Christiaan Snouck Hurgronje tidak mengakui anak-anak Indonesianya," simpul Arief.



■ Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) menyamar sebagai Muslim dengan nama Abdul Ghaffar, penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam masalah kelslaman.

Warisan Penjajah

Arief pun menilai asas monogami dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kepanjangan tangan kolonial. Karena asas itu sebagaimana yang pernah direncanakan Hurgronje yang menghendaki pernikahan monogami dan menghapus poligami. Sebagaimana cita-citanya yang ingin melihat masyarakat Indonesia, terutama Jawa, menjalani hidup wajar dengan monogami.

"Artinya, poligami tidak wajar," ujar Arief menyimpulkan logika berpikir Hurgronje.

Ia juga menyebutkan asas monogami ini juga selaras dengan Ordonansi Mengenai Pencatatan Pernikahan pada 1937 yang merencanakan pernikahan monogami dan dicatat. Artinya, asas monogami dalam pernikahan di Indonesia (UU No. 1/ 1974) merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan kolonialisme.

Hukum perkawinan Indonesia memang tidak mengharamkan poligami. Bagi laki-laki, masih diberi kesempatan punya istri lebih dari seorang. Namun, asas monogami tidak bisa mengingkari dari sejarah kolonialnya.

"Jika Christiaan Snouck Hurgronje masih berusia panjang hingga saat ini pasti dirinya akan berbangga buah pikirannya dipakai dalam hukum Indonesia," pungkasnya. □ **joko prasetyo**



Melawan Kezaliman

Oleh: Dr M Kusman Sadik

Pada dasarnya kezaliman itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun kezaliman yang dilakukan seorang penguasa terhadap rakyatnya tentu memiliki konsekuensi yang paling besar. Sebab kezaliman seorang penguasa dapat berdampak buruk pada negeri dan rakyatnya secara meluas.

Dalam lintasan zaman, banyak penguasa zalim yang lahir dan dicatat dalam sejarah. Bagi penyakit, kezaliman itu terus menular hingga kini. Karenanya Islam memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah kezaliman ini. Termasuk sikap perlawanan yang harus diambil ketika kezaliman itu terjadi. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa hal.

Pertama, Alquran mengabadikan berbagai kisah para nabi dan rasul. Salah satu yang dapat porsi besar adalah terkait perjuangan mereka dalam menghadapi para penguasa zalim. Di antaranya adalah Fir'aun yang menjadi salah satu ikon penguasa zalim. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk melawan kezaliman

Fir'aun yang telah melampaui batas itu.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 129, *"Mereka (kaum Musa) berkata, 'Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang.' (Musa) menjawab, 'Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi; maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu'."*

Ayat tersebut menceritakan kezaliman Fir'aun yang telah bertahun-tahun menindas rakyatnya. Allah SWT kemudian mengutus Nabi Musa untuk membebaskan kaumnya dari kezaliman Fir'aun tersebut. Akhirnya melalui tangan Nabi Musa, Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah.

Apa yang dikisahkan dalam Alquran tersebut sebagai *'ibrah* bahwa kezaliman itu harus dilawan. Sekuat dan sekokoh apa pun, pada titik tertentu sebuah kezaliman pasti akan hancur. Itu sebagai *sunnatullah* yang telah berjalan dari zaman ke zaman.

Kedua, Rasulullah Muham-

mad SAW juga menghadapi kezaliman penguasa Quraisy di Makkah. Saat itu Rasulullah SAW melakukan perubahan pemikiran yang ada di masyarakat. Pemikiran tauhid *laa ilaaha illallaah* beliau sampaikan untuk mengubah pemahaman mereka yang sebelumnya menyembah berhala beralih pada penyembahan kepada Allah SWT semata.

Rasulullah berhasil mengubah tolak ukur aktivitas kehidupan masyarakat dari manfaat ke tolak ukur halal dan haram, dari standar hawa nafsu ke standar wahyu. Pada titik ini penguasa Quraisy sudah kalah secara intelektualitas karena masyarakat mulai menerima dan memahami kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Kekalahan itulah yang kemudian memunculkan perlawanan fisik yang dilakukan oleh penguasa Quraisy. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Rasulullah seorang tukang sihir. Tidak sebandar itu mereka bahkan berupaya untuk membunuh Rasulullah.

Ketiga, kezaliman berupa intimidasi dan ancaman tersebut

tidak mampu menyurutkan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Hal ini tercermin dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan Imam Bukhari tentang para pemuka Quraisy yang pernah secara khusus menemui Abu Thalib. Mereka membujuk Abu Thalib untuk menekan Rasulullah SAW agar menghentikan dakwahnya.

Ketika Abu Thalib menyampaikannya hal tersebut, Rasulullah menanggapi dengan sikap penuh ketegaran dan kewibawaan. Beliau bersabda, *"Wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan usaha dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa dalam perjuangan itu."*

Keberanian dan keteguhan dakwah Rasulullah SAW tersebut akhirnya berbuah kemenangan. Khususnya setelah beliau berhasil mendirikan negara Islam di Madinah. Dari sanalah kemudian cahaya Islam itu dipancarkan menembus benua Asia, Afrika, hingga Eropa. Selama 13 abad per-

adaban Islam dalam institusi khilafah menjadi payung yang mencerdaskan dan menyejahterakan umat manusia.

Jadi Rasulullah SAW serta para nabi dan rasul lainnya telah memberikan teladan dalam keteguhan dan keberanian dalam berdakwah. Ini sebagai cermin bagi para aktivis dakwah yang mungkin saja berhadapan dengan kezaliman. Baik berupa fitnah, kriminalisasi, persekusi, hingga penangkapan dan penyiksaan.

Bagi umat Islam, dakwah untuk tegaknya ajaran Islam secara kaffah merupakan kewajiban. Karenanya tidak mungkin ada kekuatan yang mampu membendunginya. Kezaliman bisa saja datang menghadang. Namun dakwah akan terus mengalir tanpa henti hingga tegak kebenaran dan tenggelamlah kebatilan. Ini bukan survei, namun sejarah yang membuktikan bahwa segala bentuk kezaliman itu pasti hancur. *Wallahu'lam biash-shawab.*[]

MEDIA GAUL

Valentine's Day? No Way!



Oleh: Ihsan, Penulis dan Pemerhati Remaja, tinggal di Bandung

Di bulan Februari ini, ada hari yang paling ditunggu oleh sebagian remaja sedunia, termasuk remaja Muslim. Hari itu disebut-sebut sebagai Hari Kasih Sayang, nuansanya mendedak serba *pinky*, coklat dan alat kontrasepsi dijual sepaket, serta penjual bunga mawar menjajakan dagangannya di sekolah dan kafe remang-remang. Yups, hari itu adalah *Valentine's Day* atau Hari Valentine.

Valentine's Day yang jatuh pada 14 Februari setiap tahunnya selalu mengundang perhatian dan kegalauan para remaja. Ada yang berencana menembak gebetannya di malam itu. Ada yang harap-harap cemas menanti coklat dari pacarnya. Ada yang udah *booking* hotel melati sambil masih mengenakan seragam putih abu-abu. Dan ada juga remaja-remaja yang kumpul bukan untuk merayakan *Valentine's Day*, justru untuk mengajak teman-teman mereka untuk meninggalkan budaya impor yang kufur *nan* merusak ini.

Bagi kamu remaja yang cerdas tentunya tidak akan merayakan *Valentine's Day* karena alasan berikut:

1. Sejarah Gelap *Valentine's Day*

Valentine's Day berasal dari perayaan Lupercalia dari Imperium Romawi Kuno yang didedikasikan untuk Faunus, dewa agrikultur dan Romulus-Remus, pendiri imperium Romawi. Festival ini dimulai dengan menguliti kambing, mencelupkannya dalam darah persembahan, lalu menggunakannya untuk mengoles wanita-wanita Roma. Alih-alih merasa jijik, para wanita Roma ini merasa senang karena dipercaya akan membuat mereka semakin subur. Setelah itu, mereka memasukkan nama mereka ke dalam bejana yang

malamnya akan diundi oleh para pemuda. Nama yang terpilih akan menjadi pasangan zina selama satu tahun, dan jika keduanya merasa puas akan berlanjut ke jenjang pernikahan. (reff: *history.com*)

Sejarah juga mencatat saat Imperium Romawi mengalami kristenisasi seluruh budaya pagan dihapus, 'Hari Kasih Sayang' ini tetap dilestarikan walaupun dengan dalih yang berbeda. Para pendeta Belgia menemukan bukti konkrit mengenai siapa Saint Valentine yang namanya dijadikan hari tersebut. Ia adalah misionaris dan martir yang dieksekusi oleh Kaisar Claudius pada abad ke-3 SM, yang memperjuangkan pernikahan kristiani para prajurit yang sangat tidak disukai Kaisar karena dapat menghambat keberanian para prajuritnya ke medan perang akibat menikah. (reff: *washingtonpost.com*). Hari eksekusinya pada tanggal 14 Februari itulah yang hingga kini dirayakan para remaja, termasuk remaja muslim, dalam ritual *Valentine's Day*.

Hal ini sangat berbahaya bagi para remaja muslim, guys. Hal ini karena Rasulullah saw. memberikan peringatan yang keras bagi siapa saja yang latah ikut-ikutan budaya (hadlarah) kufur maka mereka termasuk golongannya, termasuk juga merayakan *Valentine's Day*.

"Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menyerupai selain golonganku." (HR at-Tirmidzi)

2. Mengantarkan pada Perzinaan

Sudah jadi rahasia umum bahwa yang namanya *Valentine's Day* identik dengan pergaulan bebas. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai berita, bahwa produk-produk paling laris menjelang *Valentine's Day* adalah coklat, bunga,

dan alat kontrasepsi. Yang membuat hati makin miris adalah sebagian besar pembelinya adalah pelajar. Padahal mendekati zina saja sudah diharamkan oleh Allah, apalagi melakukan zina tersebut, bahkan secara masal dalam malam *Valentine*!

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (al-Isra': 32)

3. Memperkuat Penjajahan Barat atas Muslim

Selain negara Barat menjajah negeri-negeri Muslim dengan tank dan senjata, mereka juga menjajah kita dengan budaya atau yang disebut westernisasi. Mereka mengenal berbagai gaya hidup mereka dan memaksakannya di negeri-negeri Muslim melalui berbagai media, seperti tayangan televisi, musik, hingga regulasi. Mereka menginginkan remaja Muslim mengadopsi gaya hidup liberal, sekuler, hedonis, permisivisme, seks bebas, termasuk melalui *Valentine's Day* ini. Mereka mengagungkannya dalam kata-kata Hari Kasih Sayang sehingga remaja muslim mau mengikutinya atau berkompromi dengannya.

Dengan berbagai alasan di atas, sudah saatnya bagi kita remaja dan pemuda Muslim meneriikkan *Valentine's Day, No Way!* Yuk pelajari Islam ini dengan sungguh-sungguh sehingga kita memahami bagaimana Islam mengatur mengenai penyaluran cinta yang sejati sehingga tidak terjerumus pada jurang kemaksiatan akibat ber-*Valentine's Day*, dan tentunya ajak setiap teman kita untuk ikut meninggalkan budaya kufur *nan* merusak ini. Semoga Allah melindungi kita semua.[]



Melindungi Perempuan dari Kejahatan Seksual

Kekerasan seksual menjadi isu agar dihapuskan. Cukupkah hal itu melindungi perempuan? Lantas siapa yang melindungi laki-laki?

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) masih jadi pro dan kontra. Sebab dari dasarnya saja, soal filosofi kekerasan seksual sudah ambigu. Ada perbedaan mendasar antara harapan umat agar kejahatan seksual terhapuskan, bukan sekadar kekerasan seksualnya saja.

Sebab, berbicara tentang kekerasan seksual, sebenarnya hal itu hanya bagian kecil dari lingkup kejahatan seksual. Sehingga, menghapuskan kekerasan seksual, akan lebih komprehensif jika sekaligus menghapuskan kejahatan seksual. Baik dari pencegahan, maupun penanganan atau hukuman jika sudah terjadi. Dan, hanya Islam satu-satunya perangkat komprehensif yang mampu melakukan hal itu.

Cakupan Definisi

Berangkat dari definisi, Islam memiliki penjabaran yang jelas tentang apa saja yang disebut kejahatan seksual. Yaitu, segala jenis perilaku seksual yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini antara lain mencakup, *pertama*, segala hal yang berkaitan dengan hubungan seks di luar pernikahan yang sah. Seperti zina, pelacuran dan seks bebas. Juga, pernikahan dengan sesama jenis, benda atau boneka. Itu semua adalah kejahatan seksual. Baik dilakukan sama sama suka, maupun ada kekerasan di dalamnya.

Kedua, segala jenis penyimpangan seksual adalah kejahatan seksual. Seperti hubungan seks dengan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbianisme. Hubungan seks dengan mahram (inses), berhubungan badan dengan binatang atau benda, *nudity* (ketertelanjangan), *swinger* (tukar menukar pasangan), dan sebagainya. Banyak sekali jenis penyimpangan di era liberalisme seks saat ini. Perilaku seks liar yang di luar nalar manusia.

Ketiga, segala jenis kekerasan seksual adalah kejahatan. Baik dilakukan di dalam lingkup pernikahan yang sah maupun di luar pernikahan. Seperti pencabulan, pemerkosaan dan sodomi. Jadi, apabila suami menyodomi istri, itu adalah kejahatan seksual karena sodomi diharamkan dalam Islam.

Jadi, kekerasan seksual itu hanya

bagian kecil dari kejahatan seksual yang luar biasa banyak dan tumbuh subur di era liberal ini. Jika ingin kekerasan seksual tersingkir, maka seluruh kejahatan seksual juga harus dihapuskan. Maka tidak cukup jika membuat undang-undang hanya sekadar menghapus kekerasan seksual, tapi juga mencakup penghapusan penyimpangan seksual dan kejahatan seksual lainnya.

Inilah yang seharusnya dirancang dalam undang-undang. Aturan semacam ini, bukan saja untuk melindungi perempuan yang notabena hanya dia yang dianggap rentan mengalami kekerasan seksual. Tetapi juga melindungi kaum laki-laki yang saat ini pun rentan menjadi korban kejahatan seksual. Bahkan melindungi seluruh jenis umat manusia, juga makhluk lain seperti binatang agar tidak menjadi korban kejahatan seksual.

Sanksi

Islam menghukum tegas pelaku kejahatan seksual. Bagi pelaku zina, termasuk perselingkuhan dan pelacuran, maka hukumannya didera 100 kali jika belum menikah atau dirajam jika sudah menikah. "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*" (An-Nur [24]:2).

Kasus pemerkosaan, hukumannya sama dengan pezina, kecuali korban yang dipaksa, maka dibebaskan dari hukuman. Dari Abu 'Abdirrahman as-Sulami, ia berkata, "Dihadapkan kepada 'Umar bin al-Khaththab r.a seorang wanita (yang dipaksa berzina). Pada suatu hari wanita tersebut sangat kehausan, lalu ia mendatangi seorang penggembala untuk meminta air. Namun penggembala itu enggan memberinya, kecuali jika ia mau berzina dengannya, maka wanita itu pun terpaksa melakukannya. Lalu orang-orang berunding untuk merajamnya. Kemudian 'Ali r.a berkata, 'Ia dalam keadaan terpaksa, pendapatku hendaklah kalian membebaskannya.' Maka beliau ('Umar r.a) pun melepaskannya."

Pelaku penyimpangan seksual berupa berzina dengan binatang juga mendapat sanksi tegas. Dari Ibnu 'Abbas r.a ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia, dan bunuh pula binatang tersebut."

Sedangkan pelaku sodomi, *hadd* keduanya adalah dibunuh, baik *muhshan* (sudah pernah menikah) ataupun belum. Dari Ibnu 'Abbas r.a, ia menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW: "Siapa saja yang kalian melakukan perbuatan kaum Luth (sodomi), maka bunuhlah orang yang menyodomi dan orang yang disodomi."

Hukum *hadd* ditetapkan dengan salah satu dari dua hal; yaitu jika ada pengakuan dari pelaku atau adanya saksi yang melihat perilaku kejahatan seksual. Dengan segala bentuk sanksi tegas di atas, masyarakat akan terjaga dari berbagai jenis kejahatan seksual. Perilaku seksual bebas ala liberalisme pun akan tersingkir. Baik anak-anak, remaja, laki-laki maupun perempuan. Semua terlindungi dari kejahatan seksual.

Liberal

Bandingkan dengan aturan liberal. Yang tidak dilarang adalah adanya kekerasan seksual. Jika hanya ini yang diatur dalam undang-undang khusus, maka bisa diinterpretasikan bahwa seks itu harus dilakukan tanpa ada kekerasan alias suka sama suka. Cuma itu.

Menikah atau tidak, tidak dianggap persoalan. Apakah dengan lawan jenis atau sejenis, tidak dianggap persoalan. Apakah dengan sesama manusia atau makhluk lain, tidak dipersoalkan. Yang penting tanpa kekerasan. Dengan demikian, segala jenis penyimpangan seksual, asal tanpa kekerasan, menjadi dibolehkan.

Inilah titik kritis dalam RUU P-KS yang menjadi persoalan. Meski secara tertulis tidak ada kata-kata melegalkan seks bebas atau penyimpangan seksual, namun interpretasi dari konten UU itu sendiri bisa diartikan demikian.

Jelas hal ini tidak sejalan dengan syariat Islam. Juga, tidak akan efektif menghilangkan kejahatan seksual yang sangat luas cakupannya. Apalagi faktanya, kekerasan seksual itu justru banyak terjadi dalam kasus-kasus "seks bebas" alias di

luar legal pernikahan. Seperti pemaksaan hubungan seksual dalam pacaran dan perzinahan.

Harapan umat, RUU itu seharusnya mengatur juga persoalan kejahatan seksual yang selama ini tidak tercakup dalam KUHP. Misal, pasal perzinahan yang di KUHP belum bisa dijerat hukum, kecuali orang yang sudah menikah. Itupun hanya jika pasangan sahnya melaporkan. Jika yang berzina masih jomblo, tidak kena sanksi. Juga pasal *liwath* (homoseksual) yang tidak dijerat hukum.

Demikian pula pria hidung belang atau tante girang yang membeli layanan seksual, yang selama ini bebas melenggang. Nah, ini harusnya yang diatur dalam RUU yang baru. Untuk apa ada undang-undang *lex specialis* (aturan khusus) yang mengatur soal seksual, jika persoalan zina dan penyimpangannya tidak *include* di dalamnya?

Itulah mengapa RUU P-KS ini alih-alih menghilangkan kekerasan seksual, yang ada disinyalir melanggengkan perilaku seksual bebas. Alih-alih melindungi perempuan, bahkan kaum hawa akan terus menerus menjadi objek kejahatan seksual. Sebab, akar masalahnya tidak dicabut. Yaitu, liberalisasi seksual.

Perlindungan Paripurna

Peradaban liberal saat ini menjadi wadah yang menyuburkan perilaku kejahatan seksual. Berbagai bentuk penyimpangan seksual kian liar, kekerasan seksual merajalela, homoseksual dan lesbianisme kian menjulang, perzinahan dan pelacuran pun seolah tak bisa dihapuskan.

Semua jenis kejahatan seksual tersebut kian menjauhkan manusia dari perilaku beradab. Hampir setiap hari kita disuguhi berbagai jenis berita menjijikkan seputar urusan seksual saja. Hal ini menjauhkan umat dari produktivitas dan pemikiran yang bersih dari sekadar urusan seks yang seharusnya tabu diperbincangkan.

Karena itu, untuk melindungi manusia dan mengembalikan peradaban mulianya, aturan liberalisme harus disingkirkan. Hanya Islam saja aturan dari Sang Pencipta yang mampu melindungi eksistensi manusia dari kepunahan akibat kejahatan seksual. **kholda**



Menjaga Hubungan dalam Pernikahan

Menjalani pernikahan adalah ujian panjang. Ada saja kondisi tidak ideal yang menimbulkan petaka dan air mata. Sebab, tidak ada teori eksak tentang bagaimana memperlakukan pasangan dengan ideal. Karakter, latar belakang pendidikan, budaya dan pemahaman memengaruhinya. Karena itu, hubungan pernikahan memerlukan rasa pengertian yang mendalam antara suami-istri. Beberapa tips untuk menjaga hubungan itu:

1. Suami bukan Penguasa

Meskipun Islam menjadikan suami sebagai pemimpin rumah tangga, tapi bukan kepemimpinan diktator atau tiran. Suami harus melayani istri dengan baik. Nabi SAW bersabda *"Sebaik-baik kalian ialah orang yang paling baik perilakunya terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian dalam memperlakukan istri"* (HR At Tirmizi).

2. Istri adalah Partner

Suami bukan satu-satunya yang berhak mengambil keputusan, demikian pula sebaliknya. Sebaiknya, buatlah keputusan bersama untuk keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud jika keputusan yang diambil tidak sepihak dan semua anggota keluarga menjadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut. Suara istri didengar. Pendapat anak-anak ditampung. Namun, suami sebagai pemimpin keluarga yang memutuskan.

3. Menjaga Emosi

Rumah tangga memang tidak ideal. Ada saja ketidaksempurnaan yang berujung amarah. Entah sikap pasangan yang menyebalkan, atau perilaku anak-anak yang sulit dikendalikan. Pekerjaan besarnya adalah mengendalikan emosi. Mencegah amarah baik secara fisik maupun mental. Nabi SAW tidak pernah menyakiti istrinya. Nabi SAW pernah bersabda, bagaimana suami bisa berbuat menjadikan istri-istri mereka di siang hari sebagai budak, dan tidur dengan istri mereka di malam hari.

4. Tunjukkan Apresiasi

Jangan pernah membuat pasangan merasa dia gagal. Merasa tidak cukup baik pada keluarga. Merasa tidak memuaskan dengan apa yang dia lakukan atau pekerjaannya. Nabi SAW bersabda *"Pada Hari Kiamat nanti, Allah tidak akan melihat wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya"*. Sebaliknya pun begitu, suami harus mampu membesarkan hati istrinya. Apalagi beban urusan rumah tangga tidak ada habisnya. Daripada menyesali ketidakbecusan istri, lebih baik membantu dan membimbingnya. Memujinya dan berterima kasih atas pengabdianya.

5. Berkomunikasilah

Komunikasi adalah hal yang penting. Bicara. Ngobrol. Ini banyak disarankan para pakar dalam konseling rumah tangga. Tampaknya memang hal tersebut perlu dilakukan. Sebab, bicara dari hati ke hati itu tak semudah teori. Sulit mengungkapkan. Padahal suami istri harus saling berbicara. Menghadapi masalah dengan

bicara lebih dini dan terbuka.

6. Banyak Bersyukur

Setiap rumahtangga memiliki ujian yang berbeda. Tidak pas jika cemburu dengan rumahtangga lain yang tampak lebih baik ddi mata kita. Sebaliknya, melihat orang lain yang hidup kurang dari kita, akan membuat lebih bersyukur. Ternyata, banyak rumahtangga yang ujiannya lebih berat dari kita. Jangan merasa paling menderita di dunia.

7. Waktu untuk Sendiri

Pasangan terkadang membutuhkan waktu untuk sendiri dengan berbagai alasan. Ingin membaca, memikirkan masalah pribadi atau hanya ingin rileks. Jangan membuat mereka merasa berdosa ketika ingin sendiri. Biarkanlah. Sediakan waktu untuknya. Sebab sebelum menikah dia adalah sendiri, punya waktu untuk melakukan apa yang dia sukai.

8. Jaga Rahasia Berdua

Suami-istri adalah pasangan terdekat. Paling tahu aib dan kekurangan masing-masing. Paling intim dalam pandangan, pembicaraan dan interaksi. Menjaga ini sebagai rahasia berdua. Jangan mendiskusikan pernik pernikahan dengan orang lain, kecuali jika ada alasan syar'i untuk mencari solusi.

Begitulah, pernikahan yang baik memerlukan kesabaran dan keramahan, pengorbanan, empati, cinta, pengertian, kerja keras dan saling meridhoi. Semuanya dapat dirangkai dalam satu kalimat: selalu memperlakukan pasangan dengan cara seperti kita ingin diperlakukan pasangan. **kholda dari berbagai sumber**



Baby Blues Adakah?

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi yang saya hormati, saya ibu rumah tangga dengan empat anak. Apakah *baby blues* itu benar adanya Bu? Enam bulan lalu saya baru melahirkan anak ke-4. Belakangan ini saya merasa aneh saja. Jadi sering uring-uringan. Kurang sabar menghadapi anak-anak, dengan segala tingkah polahnya. Usia anak-anak memang berdekatan jaraknya. Saya harus bagaimana ya Bu? Pernah bicara ke suami, ingin menemui ahli, tapi malah dertawakan. Intinya tidak ditanggapi. Saya merasa jadi tidak normal. Bahkan anak sering jadi sasaran emosi saya yang kurang terkendali. Misal kena marah, bentak, cubit bahkan pernah saya memukulnya. Saya ini terkena *baby blues* atau memang tidak sabaran. Mohon sarannya.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

IN-Jabar

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu IN yang baik,

Baby Blues adalah gangguan psikologis berupa sedih, cemas dan emosi meningkat yang dialami sebagian besar perempuan setelah melahirkan khususnya anak pertama. Biasanya terjadi pada dua minggu pertama setelah melahirkan. Namun terlihat lebih berat pada hari ke-3 dan hari ke-4 setelah persalinan, apalagi jika si ibu dan bayi sudah

kembali ke rumah dan mulai merawat bayinya sendiri. Dampaknya, enggan untuk memperhatikan si kecil. Kondisi ini umum dialami oleh ibu melahirkan, sehingga menimbulkan kelelahan secara psikis. Beberapa ahli mengatakan, penyebab *baby blues* terkait dengan perubahan hormon, fisik, psikis dan sosial.

Ibu IN yang baik,

Pasca melahirkan terjadi perubahan hormon yang menyebabkan mudah lelah, penurunan *mood*, dan perasaan tertekan. Hal ini si kecil menyebabkan pula perubahan ritme kehidupan. Mengasuh si kecil sepanjang siang dan malam sangat menguras energi ibu, hingga bisa jadi kurang waktu istirahat. Ini bisa menyebabkan penurunan ketahanan dalam menghadapi masalah. Perubahan fisik ibu dan rasa sakit pasca melahirkan juga ikut menjadi pemicunya. Kece- masan terhadap berbagai hal, seperti ketidakmampuan dalam mengurus si kecil, ketidakmampuan mengatasi berbagai permasalahan, rasa tidak percaya diri, kurangnya perhatian keluarga terutama suami ikut memengaruhi terjadinya keadaan ini. Peran baru menjadi ibu, memang butuh adaptasi.

Ibu IN yang baik,

Jika *baby blues* pasca kelahiran ini tidak tertangani dengan baik memang bisa berlan-

jut. Bisa menimbulkan depresi yang sering diistilahkan dengan *postpartum depression*. Perbedaan antara *baby blues syndrome* dengan *postpartum depression* terletak pada frekuensi dan lama durasinya. *Postpartum depression* akan berlangsung lebih lama, lebih kuat, dan lebih keras gejalanya. Ibu akan merasakan rasa sedih yang berlebih, cemas yang sangat dalam dari biasanya. Melihat dari gejala yang Anda ceritakan dan berlangsungnya cukup lama, bisa jadi memang mengarah ke sana. Ditambah kemudian jarak usia anak yang berdekatan tentu cukup merepotkan dan melelahkan. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedudukan anak dalam Islam, serta dukungan dari lingkungan utamanya suami memang bisa saja menimbulkan tekanan dan masalah. Anak yang terkena dampaknya.

Ibu IN yang baik,

Mengasuh dan mendidik anak memang tugas utama ibu, tapi diperlukan juga kerjasama untuk meringankan tugasnya. Sekali waktu suami membantu atau menghendel pekerjaan rumah dan anak-anak dengan mengajak orang-orang terdekat yang bisa diminta bantuannya. Luangkan waktu khusus bersama suami untuk membicarakan persoalan anak-anak dan mencari solusinya, terutama yang sekiranya bisa menimbulkan tekanan. Mempekerjakan pembantu rumah

tangga juga akan sangat membantu meringankan pekerjaan rutin. Sehingga Anda bisa punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan anak-anak. Jika selama ini suami tidak menanggapi masalah yang Anda alami, bisa jadi memang ada masalah terkait dengan komunikasi dan relasi yang selama ini berjalan. Secepatnya segera diperbaiki jika memang ada masalah.

Ibu IN yang baik,

Selain pemahaman akan kedudukan anak, dukungan dari orang-orang sekitar, juga penting ilmu tentang pengasuhan. Dan yang tak kalah penting adalah kesabaran. Kesabaran akan meringankan dalam menghadapi polah tingkah anak. Jika tidak dengan kesabaran, bagaimana mungkin Anda akan sanggup menghadapi setiap masalah anak-anak dengan baik dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Sabar disertai dengan niatan ikhlas hanya semata-mata untuk mencari ridlo Allah akan menjadi energi yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Termasuk saat menghadapi anak-anak. Berdoa selalu agar Allah berikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu. Maka seberat apapun beban yang diemban dalam menghadapi polah tingkah anak-anak, insya Allah akan dapat dilakukan dengan ringan. Doa akan menguatkan kita dalam menghadapi masalah seberat apapun. Semoga Allah mudahkan semua urusan Anda.[]

Hukum *Kanzul Maal* (Menimbun Harta)

Diasuh Oleh: **Ustadz M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustadz, afwan mau bertanya larangan menimbun harta (*kanzul maal*), apakah sebatas harta emas dan perak, atau sebagai mata uang? (Abu Aisyah, Bogor)

Jawab:

Menimbun harta (*kanzul maal*) haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT (yang artinya), "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS At-Taubah [9]: 34).

Imam Taqiyuddin An Nabhani menafsirkan ayat di atas dengan berkata, "Ketika turun ayat yang melarang menimbun emas dan perak, saat itu emas dan perak adalah alat tukar dan standar untuk menilai pekerjaan dan manfaat pada harta, baik yang tercetak seperti koin dinar dan dirham, maupun yang tidak tercetak seperti emas atau perak batangan. Jadi larangan yang ada lebih tertuju pada emas dan perak sebagai alat tukar." (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 251).

Berdasarkan itu, jelaslah larangan menimbun harta (*kanzul maal*) tidak hanya berlaku untuk emas dan perak saja, melainkan juga termasuk semua jenis mata uang (*an nuquud*). (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 250-251).

Secara lebih detail, menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani, larangan menimbun harta (*kanzul maal*) meliputi 3 (tiga) macam penyimpanan harta sbb;

Pertama, menyimpan emas dan perak secara umum, baik yang dicetak sebagai uang seperti koin dinar atau dinar, maupun yang tidak dicetak sebagai uang, seperti emas batangan, baik dikeluarkan zakatnya maupun tidak dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Taqiyuddin An Nabhani, berbeda dengan pendapat ulama lain yang membolehkan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya. (*Al Mausuw'ah Al Fiqhiyyah*, 2/346-348).

Dalilnya hadits dari Abu Umamah ra, bahwa ada seorang laki-laki dari *Ahlus Shuffah* yang meninggal, ternyata dia menyimpan uang 1 dinar di sarungnya. Nabi SAW bersabda, "Ini sepotong api neraka (*kayyah*).". Lalu meninggal laki-laki lain dan ternyata dia menyimpan 2 dinar di sarungnya. Nabi SAW pun bersabda, "Ini dua potong api neraka (*kayyataani*).". (HR Ahmad, dengan isnad yang sahih). Hadits ini menunjukkan haramnya menyimpan dinar dan

dirham secara mutlak, baik yang belum mencapai nishab (di bawah 20 dinar atau 200 dirham) maupun yang sudah mencapai nishab. (Taqiyuddin An Nabhani, *Muqaddimat Al Dustuur*, 2/77).

Kedua, menyimpan emas dan perak yang berupa perhiasan (*al hulli*), seperti kalung atau cincin dari emas/perak. Hanya saja ada hukum khusus untuk emas atau perak yang berbentuk perhiasan ini, yaitu jika tidak dikeluarkan zakatnya (ketika telah memenuhi kriteria nishab dan haul), hukumnya haram. Adapun jika dikeluarkan zakatnya, menyimpannya tidak berdosa. (Taqiyuddin An Nabhani, *Muqaddimat Al Dustuur*, 2/80; Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Daulat Al Khilafah*, hlm. 167-168).

Ketiga, semua jenis mata uang (*an nuquud*) yang berfungsi sebagai alat tukar, baik dikeluarkan zakatnya maupun tidak. (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 251).

Hanya saja, perlu dipahami yang dimaksud menimbun harta yang diharamkan adalah menyimpan harta tanpa suatu hajat. Adapun jika menyimpan harta karena ada suatu hajat masa depan, hukumnya boleh, asalkan dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi kriteria nishab dan haul. Menyimpan harta untuk suatu hajat masa depan itu disebut dengan *al iddikhaar* (menabung, *saving*), misalnya untuk dijadikan mahar nikah, atau akan digunakan naik haji, atau akan dijadikan modal usaha, dsb. (Taqiyuddin An Nabhani, *Al Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, hlm. 251; Ibrahim Abdul Lathif Al 'Ubaidi, *Al Iddikhaar Masyru'u'iyatuhu wa Tsama-raatuhu*, hlm. 18). Wallahu a'lam.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami
atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat tabloid
mediaumat.news Memperjuangkan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :
Alamat Pengiriman 1 :
Alamat Pengiriman 2 :
Telpon/ No. Hp-WA :
Jumlah Langganan : eksemplar
Dikirim Mulai edisi :
Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks



Angka 5,17 Persen, Antara Klaim Presiden dengan Fakta

Oleh: **Yuli Sarwanto**, Direktur Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (FAKTA)

"Ya patut kita syukuri Alhamdulillah, 5,17 (persen) itu sebuah angka yang baik kalau dibandingkan negara-negara lain. Bandingkan dengan negara-negara lain, yang G20," ujar Presiden Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2) seperti diberitakan *republika.co.id*. Jokowi pun menegaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh dua hal, yakni ekspor yang semakin meningkat dan pengurangan impor.

Pemerintah memaparkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2018. Selain itu, ia menyebutkan barang substitusi impor yang diproduksi di dalam negeri juga dinilainya turut mendorong peningkatan angka pertumbuhan ekonomi.

Beda klaim beda fakta. Indonesia masih terkenal sebagai pengimpor produk teknologi asing. Mayoritas pabrik-pabrik di negeri ini, sejatinya, hanya memproduksi barang dengan merek atau teknologi yang dilisensi dari induknya di luar negeri. Meski alih teknologi telah dijalankan, dan kita mampu membuat sendiri produk tersebut, tetap saja aturan-aturan paten dan rahasia dagang akan membentengi, sehingga kita hanya boleh membuat produk itu sesuai aturan lisensi pemilik paten.

Secara struktural sejak Indonesai tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan perekonomian global, secara bertahap sumber daya ekonomi, produksi dan jejaring distribusi perekonomian beralih ke tangan swasta domestik dan asing. Nixon Shock pada Juli-Agustus 1971 bermula dari kebijakan

Saudi Arabia yang menggunakan pasokan minyak ke pasar dunia sebagai senjata sehingga harga minyak naik. Akibatnya perekonomian AS menyusut 27 persen dari 35 persen terhadap volume ekonomi global dan dolar AS terdepresiasi.

Namun hal ini tidak membuat orang-orang kepercayaan Washington di Jakarta yang menampuk kekuasaan ekonomi dan moneter, mengambilnya sebagai pelajaran bahwa model ekonomi Barat adalah rapuh (*fragile*). Dalam bahasa yang lain, kebijakan Bretton Woods yang lahir di AS pada 1944 telah gagal. Artinya integritas sistem ekonomi terbuka yang dibangun Bank Dunia, IMF dan General Agreement Trade and Traff (GATT) –sekarang WTO— tidak utuh dan tidak tangguh. Penyebabnya, antara lain, perilaku rakusnya pemodal, tidak jujurnya pasar dan bangunan persepsi manusia merupakan basis rujukan transaksi pada sektor riil dan sektor keuangan.

Industri besar yang ada sering diorientasikan untuk mengeruk kekayaan alam (migas, tambang, hutan dan laut) atau menguasai sektor publik (air minum, listrik, telekomunikasi, jalan tol) dengan kontrak konsesi, yang akhir-akhir ini beralih juga ke tangan asing.

Sementara itu, bersama-sama dengan pariwisata, ratusan ribu TKI juga menjadi andalan devisa, sekalipun di luar negeri sering terzalimi. Di sisi lain, beberapa ribu tenaga ahli asing yang bekerja di Indonesia "menguras" kantong kita lebih banyak dari sekian juta pegawai negeri, termasuk dosen-dosen dan peneliti yang notabene banyak yang merupakan lulusan sekolah di luar negeri. Belum lagi dengan utang yang luar biasa

besar.

Selain persoalan ekonomi yang terkait dengan luar negeri, sistem perbankan kita juga harus memiliki kualifikasi "internationally compatible" (sesuai "standar internasional"). Hal itu berarti bahwa perbankan kita harus mengakui sistem riba (sekali pun sistem syariah "ditolerir", tapi tidak menjadi satu-satunya). Negeri ini juga harus menjalankan sistem moneter kurs mengambang untuk valas, selain harus membuka pasar modal yang sangat memungkinkan investor asing leluasa memborong saham perusahaan-perusahaan yang *go public*.

Di sisi lain, sistem ekonomi yang ada membuat banyak industri yang semula dinilai strategis, bahkan untuk keperluan militer di saat perang, justru dilego untuk menutup defisit APBN akibat krisis perbankan. Masih segar dalam ingatan kita tentang penjualan Indosat ke STT Singapore, atau sekarang yang masih dalam wacana adalah penjualan PT Dirgantara Indonesia. Hasilnya, strategi ekonomi yang ada selama ini belum pernah berhasil menjadikan kita sebagai bangsa yang benar-benar mandiri.

Pembangunan kita gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bahkan, tidak berhasil membangkitkan kemampuan teknologi yang mendukung produktivitas industri. Selain itu, teknologi yang telah kita kuasai ternyata sulit menjadi andalan perindustrian kita sendiri.

Jadi apakah artinya klaim pertumbuhan 5,17 persen tersebut? Kalau yang bertumbuh adalah bisnis asing di negeri ini.[]



Lawan! Lawan Penindasan!

Oleh: **Eko Susanto**, Koordinator Barisan Advokasi Rakyat (Bara)

Kaum Muslim terus menerus menjadi sasaran pensitaan dan kebencian historis terhadap umat Islam yang berakar pada pemahaman fobia Islam yang telah menjadi epidemi di kalangan gerakan-gerakan rasis, *xenophobia*, dan *proto-fascist*. Kaum rasis anti-Muslim yang menikmati dukungan luas di kalangan nasionalis *xenophobia*. Dan ini menjadi gejala global.

Stigmatisasi itu juga sering kita temukan di Indonesia, saat pelaku kriminal ditangkap, maka langsung mengenakan jilbab dan kerudung hitam, lelakinya berpeci putih. Bahkan beberapa tahun terakhir terdapat *framing* negatif terhadap ajaran khilafah, bendera tauhid dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Di AS, UU anti-Muslim telah memberikan *carte blanche* (kebebasan) untuk melakukan monsterisasi dan penganiayaan terhadap umat Islam. Dalam film-film Hollywood, pelaku teror pasti diambil yang berjanggut dan bersurban, seorang Muslim, dengan latarnya kumandang adzan dan takbir. Di Indonesia sendiri, saat pelaku teroris ditangkap, *framing* media dengan menyorot Alquran, sajadah, buku-buku islami di rumah orang-orang, seolah Islam sebab terorisme. Hasilnya? Fobia Islam. Orang-orang Barat takut ketika melihat janggut dan jilbab, khawatir saat mendengar adzan dan takbir, tertanam di bawah sadar mereka.

Di Myanmar kelompok Muslim telah menjadi sasaran, komunitas minoritas Muslim Rohingya telah menjadi kelompok yang paling menderita. Para biksu Budha radikal juga memainkan peran penting di sini. Myanmar dituduh melakukan pembersihan etnis di negara bagian Rakhine. Lebih dari 650.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak kekerasan meletus Agustus lalu. Mereka bawa berbagai cerita mengerikan tentang pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penyiksaan. Penduduk menuding militer, didukung oleh massa Budha setempat, membakar desa mereka dan menyerang serta membunuh

warga sipil.

Sejak 2001, Thailand juga menjadi tempat kekerasan berulang, terutama di provinsi-provinsinya di selatan. Seperti di Sri Lanka dan Myanmar, biksu Budha adalah bagian dari konflik di Thailand. Thailand memiliki sejumlah biksu tentara yang menghabiskan waktu di biara, mengambil jubah dan mangkuk sedekah, namun tidak meletakkan senjata mereka. Pada bulan Oktober 2015, biksu Thailand yang terkenal, Phra Maha Apichat, menyerukan di Facebook untuk menyatakan bahwa sebuah masjid harus dibakar hingga rata atas setiap biksu yang terbunuh dalam konflik itu. Meskipun jelas bahwa para biksu radikal di ketiga negara tersebut adalah kelompok minoritas, namun mereka minoritas yang bersuara vokal.

Kaum Muslim, ketika minoritas menjadi sasaran dari komunitas Hindu radikal. Dilansir dari *aljazeera.com*, di AS, Koalisi Hindu Republik, sebuah kelompok dengan kaitan kuat dengan gerakan nasionalis Hindu di India, telah mendukung kebijakan-kebijakan imigrasi kontroversial Presiden Donald Trump, seperti larangan terhadap masuknya kaum Muslim dan tembok perbatasan Mexico.

Di India, kelompok nasionalis Hindu sayap kanan bernama Hindu Sena, yang telah dikaitkan dengan serangkaian insiden antar-komunal di India, telah mengadakan pesta untuk menandai ulang tahun Trump. Di Inggris, National Hindu Council of Temples, sebuah badan amal Hindu, baru-baru ini menimbulkan kontroversi dengan mengundang seorang nasionalis Hindu sayap kanan Tapan Ghosh untuk berbicara di parlemen.

Di atas gerakan fobia Islam bersama mereka dan penghinaan terhadap struktur negara sekuler, tindakan merusak, protes dan kejengkelan kelompok nasionalis Hindu dan kelompok sayap kanan Barat juga sangat mirip. Kaum nasionalis Hindu di India, yang merasa kuat karena kemenangan partai BJP pada pemilu 2014, dan terinspirasi oleh etnonasionalisme dan fasisme Eropa, menolak sekularisme konstitusional negara India, dan mengusulkan bahwa India

pada dasarnya adalah negara Hindu, dan bersikeras bahwa kelompok minoritas, terutama Muslim dan Kristen, bukan bagian dalam "negara Hindu".

Dunia melihat ada banyak darah Muslim ditumpahkan para pembencinya. Sementara para penguasa kaum Muslim bergeming. Para penguasa kaum Muslim hanya puas dengan menggerakkan lidahnya, mereka tidak tergerak untuk menghentikan kejahatan genosida ini. Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasimi, misalnya mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai masih berlanjutnya serangan militer terhadap kaum Muslim Rohingya. Sementara yang Erdogan lakukan di Turki adalah menuduh Myanmar melakukan genosida, seolah-olah tragedi itu belum jelas! Sedang Sheikh Hasina menilai warga Rohingya sebagai ancaman potensial bagi keamanan Bangladesh, dan mengabaikan penderitaan mereka.

Sungguh, kaum Muslim yang tertindas tidak memiliki tempat yang aman dari teror kaum kafir. Dan solusi satu-satunya untuk krisis ini adalah menyingkirkan para pengkhinat, para penguasa negeri Islam, dan kemudian menggantikannya dengan kepemimpinan yang tulus ikhlas dan pemberani, di bawah naungan Khilafah Rasyidah 'ala minhajin nubuwah. Sebab Khilafah inilah satu-satunya yang bisa menyatukan kembali kaum Muslim, serta menjamin perlindungan terhadap semua kehormatan kaum Muslim dan non-Muslim yang menjadi warga negaranya.

"Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil). Sedangkan Kami memandanginya dekat (mungkin terjadi)" (TQS Al-Ma'arij [70]: 5-7).[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

40 Tahun Revolusi Iran Gagal Membangkitkan Dunia Islam

Meskipun relatif baik dibanding kondisi ekonomi negara-negara di dunia Islam lainnya, rakyat Iran hingga saat ini harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang sulit.



Iran memperingati 40 tahun revolusi-nya, yang sering diklaim sebagai revolusi Islam Iran. *Aljazeera.com* (12/2) menulis, seperti biasa dalam peringatan revolusi ini, rakyat Iran turun ke jalan-jalan di seluruh negeri untuk menandai peringatan 40 tahun revolusi 1979, memperbarui kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip Islam negara itu pada saat tekanan ekonomi dan politik meningkat di tengah dimulainya kembali sanksi AS.

Dalam pidatonya kepada para demonstran yang berkumpul di Lapangan Azadi (Kebebasan) Teheran pada Senin (11/2), Presiden Iran Hassan Rouhani menolak upaya AS untuk mengisolasi Teheran, dengan mengatakan sanksi AS tidak dapat menghancurkan Republik Islam.

"Kehadiran orang-orang hari ini di jalan-jalan di seluruh Negara Islam Iran... berarti bahwa musuh tidak akan pernah mencapai tujuan jahatnya," kata Rouhani, menambahkan bahwa negara itu akan terus mengejar program misilnya untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal.

"Kami belum meminta, dan tidak akan pernah meminta izin dalam mengembangkan persenjataan rudal kami saat kami terus mengejar jalan kami menuju kekuatan mili-

ter."

Iran menyelenggarakan rapat umum nasional setiap 11 Februari untuk menyoroti besarnya dukungan akar rumput untuk revolusi, yang menggantikan pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi dengan Republik Islam di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Di dalam negeri, acara ini juga dikenal sebagai Fajar Sepuluh Hari untuk memperingati periode protes kekerasan setelah 1 Februari 1979, kembalinya Khomeini dari pengasingan. Ini juga menandai akhir resmi 2.500 tahun Kekaisaran Persia. Dalam pidatonya, Presiden Rouhani menambahkan bahwa revolusi 1979 menyelamatkan negara "dari tirani, penjajahan, dan ketergantungan".

"Bangsa ini telah berhasil membangun sistem Republik Islam dan sistem pemerintahan yang independen," kata Rouhani, ketika ia menekankan bahwa negara itu juga telah berhasil "menggagalkan konspirasi" yang dipimpin oleh AS dan Israel.

Di tengah hujan dan salju yang menutupi sebagian ibukota Iran, para demonstran berbaris melalui jalan-jalan utama membawa spanduk dan tanda anti-AS dan Saudi. Demonstran juga meneriakkan, "Ke-

matian bagi Amerika", "Kematian bagi Israel" dan "Kematian bagi al-Saud" keluarga Arab Saudi.

Revolusi Gagal

Pada awalnya, banyak pihak di dunia Islam, berharap Revolusi Islam Iran akan bisa membangkitkan dunia Islam, mempersatukan negeri-negeri Islam yang tidak lagi memiliki pemimpin dunia yang legitimasi. Revolusi Iran ini juga diharapkan bisa memunculkan negara adi daya yang benar-benar bisa mengimbangi dominasi Barat di panggung internasional. Termasuk berharap, bisa membebaskan negeri-negeri Islam yang tertindas, terutama Palestina. Model revolusi ini juga memberikan contoh negara Islam yang mampu menyejahterakan rakyatnya, melepaskan ketergantungan ekonomi dan politik dari negara-negara lain terutama negara Barat.

Menurut, pengamat politik internasional Budi Mulyana, harapan itu tidak sepenuhnya berhasil, bahkan bisa disebut gagal. Menurutnya, meskipun relatif baik dibanding kondisi ekonomi negara-negara di dunia Islam lainnya, rakyat Iran hingga saat ini harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang sulit. Kesulitan ekonomi yang terus berlangsung telah membuat marah orang-orang berpenghasilan rendah di Iran, memicu protes sporadis dan pemogokan selama setahun terakhir.

"Beberapa aksi belakangan ini yang bermunculan di Iran, mencerminkan protes terhadap kondisi ekonomi yang sulit," ujarnya.

Tekanan Amerika, menurutnya, turut memengaruhi perekonomian rakyat Iran. Hal ini menunjukkan ekonomi Iran belum benar-benar independen. Penurunan dramatis nilai mata uang Iran akibat sanksi Amerika, membuat ekonomi negara ini cukup kelimpungan.

Meskipun Iran memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi, dengan cadangan minyak Iran sekitar 10 persen dari total cadangan dunia, dan memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, negara ini gagal menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat.

Kenyataannya di Iran, rakyat menderita krisis besar terkait bahan bakar mobil, dan berada pada tingkat yang mengerikan dalam hal pengangguran, kemiskinan, korupsi dan inflasi. Masyarakat Iran menderita akumulasi masalah sosial, yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan narkoba di kalangan anak muda, serta penyebaran prostitusi sebagai akibat langsung dari memburuknya kondisi perekonomian dan kehidupan di negara ini.

Budi menilai model revolusi Iran gagal total mencerminkan negara Islam adi daya yang membangkitkan, menyatukan dan membebaskan dunia Islam. Dalam isu Palestina, menurutnya, Iran lebih banyak terjebak pada retorika politik, tanpa ada aksi nyata yang benar-benar mengarah pada penghentian penjajahan entitas Yahudi itu di Palestina.

"Iran memang tiap tahun memperingati Hari Al Quds, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, namun Iran tidak pernah mengirim isyarat perang nyata kepada Israel. Iran tidak pernah mengirimkan pasukannya membebaskan Palestina. Padahal hanya perang nyata terhadap entitas penjajah inilah yang bisa mengakhiri penderitaan rakyat Palestina," tegasnya.

Menurut Budi, alih-alih menjadi pemersatu dunia Islam dan membebaskan negeri-negeri Islam yang terindas, Iran justru kerap menjadi alat politik internasional negara-negara Barat dengan memainkan isu sektarian Sunni-Syiah.

"Dukungan buta Iran terhadap rezim Bashar yang kejam dengan mengeksploitasi pembelaan terhadap kaum Syiah di sana, jelas tidak bisa diterima, Iran dengan slogan membebaskan rakyat yang tertindas, justru memperkuat rezim penindas yang telah membunuh rakyatnya sendiri dengan sangat kejam," tandas Budi.

Dalam berbagai isu, Iran justru memainkan peran sebagai alat politik Amerika. "Bukankah Iran menjadi salah satu pemain dalam perang Yaman yang sesungguhnya perang proxy demi persaingan Amerika-Inggris? bukankah Iran mendukung rezim bentukan Amerika di Irak dan Afghanistan?" ungkap Budi. **af**

Republik Sektarian, Bukan Islam

Pasal XIII dari Konstitusi Iran menyatakan bahwa "Agama resmi Iran adalah Islam, dan doktrinnya adalah Ja'fari Itsna Asyari. Pasal ini akan tetap tidak berubah selamanya..." Siapa pun yang mencermati Konstitusi Iran, yang menetapkan doktrin mayoritas, di samping menjadikan bahasa Persia sebagai bahasa resmi, maka ia akan meyakini bahwa konstitusi ini dibuat untuk sebuah negara sektarian, dan bukan negara Islam, sebagaimana yang diklaim oleh rezim penguasa.

Negara Iran adalah negara nasionalisme, bukan negara bagi seluruh kaum Muslim. Lebih dari itu, Iran didirikan sebagai negara sekuler yang diinginkan oleh sistem kapitalisme Barat. Sehingga konstitusi dan undang-undang yang dirancang tidak ada hubungannya dengan Islam, atau dengan doktrin Ja'fari. Bahkan Iran tidak memperlakukan sama antara pengikut doktrin mayoritas dan pengikut doktrin-doktrin Islam yang lain, bahkan Iran cenderung memecah-belah mereka daripada menyatukannya. **[Sumber: Al-Wa'ie (Arab), No. 345 Tahun XXX, Syawal 1436 H./Agustus 2015 M.**



Lagi, Politisi Anti Islam Belanda Masuk Islam

Van Klaveren yang berusia 40 tahun mengatakan bahwa ia telah mengubah pikirannya saat menulis buku anti-Islam.

Dulu sebut Islam adalah kebohongan dan Alquran adalah racun, kini mantan politisi anti Islam Belanda ini memeluk Islam. Joram van Klaveren pernah menjadi anggota parlemen sayap kanan Belanda dan tangan kanan politisi anti-Islam Geert Wilders. Kini van Klaveren mengungkapkan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Selama bertahun-tahun, saat menjadi anggota parlemen untuk Partai Kebebasan Wilders (PVV), Joram van Klaveren melakukan kampanye tanpa henti di Majelis Rendah melawan Islam di Belanda.

Joram van Klaveren, pernah menyebut Islam 'penyakit terbesar yang melanda negara Belanda dalam 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, menurut harian *Algemeen Dagblad* (AD), "garis keras memohon untuk melarang burqa dan minaret, dengan mengatakan 'kami tidak ingin ada Islam, atau setidaknya sesedikit mungkin di Belanda.'"

Namun, van Klaveren yang berusia 40 tahun mengatakan bahwa ia telah mengubah pikirannya saat menulis buku anti-Islam. Selasa (5/2), ia mengatakan kepada NRC Handelsblad, bahwa isi bukunya justru "menjadi bantahan atas keberatan yang dimiliki non-Muslim terhadap agama Islam.

Dalam wawancara dengan Tijs van den Brink di NPO Radio 1, van Klaveren menjelaskan perubahan hatinya. "Jika Anda percaya bahwa ada satu tuhan dan bahwa Muhammad adalah salah satu nabi, selain Yesus dan Musa, maka Anda secara resmi adalah seorang Muslim," kata van Klaveren. Dalam wawancara tersebut, NRC menambahkan bahwa van Klaveren masuk Islam 26 Oktober tahun lalu, menjelang rilis bukunya yang berjudul: *Murtad: Dari Kristen ke Islam di Masa Teror Sekuler*.

Dalam bukunya, yang berbalik arah membelah Islam, ia menjelaskan satu per satu tuduhan-tuduhan selama ini kepada Islam seperti kebenaran Yahudi, penindasan wanita, kekerasan. Sampai menurutnya tidak ada yang tersisa kecuali iman yang indah.

"Saya menemukan bahwa banyak dari kisah-kisah negatif ini berasal dari Eropa abad pertengahan. Orang-orang Kristen melihat Islam seba-

gai agama yang bersaing dan melakukan segalanya untuk mendiskualifikasi itu. Sebenarnya, kendala terbesar saya adalah Muhammad. Ada banyak kebohongan yang tersebar tentang dirinya," tambahnya.

Ketika ditanya apakah dia akan mengubah namanya? Van Klaveren menjawab, tidak. "Tidak, saya tidak merasa perlu mengubah nama saya. Saya juga tidak merasa bahwa saya telah dilantik dari tuhan. Sampai sekarang ini terutama latihan yang rasional. Jadi saya masih harus berlatih shalat. Alkohol, saya tidak minum terlalu banyak dan saya makan terutama ayam. Saya hanya tahu dua Surah [bab Alquran, ed.], Al-Fatihah dan Al-Ikhlaas, yang terpendek. Saya membeli sebuah buku kecil, yang disebut 'Saya Belajar Quran' dan itu sebenarnya buku untuk anak-anak usia 10 tahun, sebuah buku merah muda yang bagus," paparnya.

Van Klaveren berpisah dengan Wilders tahun 2014 setelah komentar kontroversial pemimpin PVV tahun itu ketika menanyakan kepada para pendukung apakah mereka menginginkan "lebih sedikit atau lebih banyak orang Maroko di kota Anda dan Belanda?" Ditanya dalam wawancara surat kabar apakah dia merasa bersalah tentang pernyataan ini, Van Klaveren mengatakan dia "salah," menambahkan bahwa itu adalah "kebijakan PVV: segala sesuatu yang salah harus dikaitkan dengan Islam dengan satu atau lain cara."

Joram Van Klaveren adalah politisi kedua dari partai anti-Islam pimpinan Greet Wilders yang menjadi mualaf. Arnoud van Doorn, mantan pejabat PVV, adalah orang yang sebelumnya masuk Islam. Van Doorn mengucapkan selamat kepada Van Klaveren atas keputusannya untuk memeluk Islam melalui Twitter, dengan menulis: "[Saya] tidak pernah berpikir bahwa PVV akan menjadi tempat berkembang biak bagi orang yang insaf."

Sekitar lima persen dari populasi Belanda yang berjumlah 17 juta orang adalah Muslim - sekitar 850.000 orang, menurut Biro Pusat Statistik Belanda (CBS). Meskipun Wilders menentang Islam, agama ini terus berkembang. Para ahli memperkirakan jumlah itu akan berlipat ganda pada tahun 2050. **af dari berbagai sumber**

KRONIK MANCANEgara

Bela Uighur, Cendekiawan Muslim Amerika Kutuk Cina



Lebih dari 130 pemimpin dan cendekiawan Muslim Amerika telah menandatangani surat terbuka yang diprakarsai Sound Vision Foundation untuk mengutuk pemerintah Cina yang terus melakukan penganiayaan dan penahanan terhadap Muslim Uighur.

Mereka juga menyerukan kepada konsumen AS untuk memboikot impor yang diproduksi oleh pekerja paksa para tahanan dan mengajak warga untuk mengikuti pawai pada 6 April di Washington, D.C untuk membela Muslim Uighur.

Para penandatangan pernyataan tersebut termasuk di antaranya aktivis hak-hak sipil terkemuka di Amerika seperti Imam Omar Suleiman, yang mengepalai Institut Yaqeen di Texas; Imam Yasir Qadhi dari Al-Maghrib Institute dan Islamic Seminary of America; Imam Muhammad Majeed, yang memimpin Masyarakat Muslim Wilayah Dulles di Virginia; serta beberapa perwakilan dari Dewan Hubungan Islam Amerika.

Suleiman mengatakan bahwa krisis Uighur merupakan pelanggaran paling terang-terangan di dunia terhadap rasa kebebasan beragama dan hak asasi manusia, namun belum mendapat perhatian yang layak dari para pemimpin dunia.

"Jika ini adalah kelompok agama lain, dunia akan bangkit," kata Suleiman kepada *Religion News Service*, Jumat (8/2/2019) dan dikutip *arrahmah.com* esoknya. **]**

Cegah Penyebaran HIV, Anggota Parlemen Tanzania Diminta untuk Sunat

Seorang anggota perempuan Parlemen Tanzania meminta kolega prianya untuk menjalani prosedur sunat. Dilaporkan *BBC*, Jumat (8/2/2019) dan dikutip *kompas.com* esoknya, usulan dari anggota bernama Jackline Ngonyani itu dimaksudkan untuk menangkai penyebaran HIV.

Situs lokal berbahasa Kiwashili Mwanachi melaporkan, Ngonyani mengungkapkan masih ada anggota parlemen pria yang belum disunat. Karena itu, dia mengusulkan adanya inspeksi untuk memeriksa apakah para anggota parlemen pria telah menjalani prosedur sunat.

HIV merupakan masalah utama di Tanzania, lima persen populasi dewasa di sana merupakan penderita menurut data 2016. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan dengan disunat, risiko pria menderita HIV menurun hingga 60 persen. Sejumlah negara Afrika yang melawan HIV mulai mengkampanyekan agar setiap pria bersedia menjalani prosedur pemotongan kulit khitan. **]**

Miliarder Cina Minta Partai Australia Kembalikan Donasi

Seorang miliarder Cina yang ditolak untuk kembali ke Australia telah meminta partai-partai politik Australia untuk mengembalikan donasi jutaan dolar yang ia berikan.

Seperti diberitakan *abc.net.au*, Jumat (8/2/2019) dan dikutip *republika.co.id* esoknya, Huang Xiangmo dengan cepat menjadi pelobi pro-Cina terkemuka, mendekati politisi dan menyumbangkan setidaknya 2 juta dolar AS (atau setara Rp20 miliar) kepada partai-partai politik Australia secara langsung dan melalui perusahaannya.

Tapi keputusan Departemen Dalam Negeri Australia untuk mencabut izin tinggal permanennya dan menolak permohonan kewarganegaraannya, yang dilakukan saat Huang berada di luar negeri, membuatnya tak bisa masuk kembali ke negara itu. Sejumlah lembaga keamanan telah menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan hubungan Huang dengan Partai Komunis Cina dan motivasi di balik sumbangannya yang dermawan.

Huang, yang menentang keputusan itu, mengatakan semua sumbangannya telah dilakukan secara patuh sesuai hukum Australia. "Jika donasi masa lalu saya yang manapun dianggap tak pantas oleh partai politik atau tokoh politik manapun, saya sekali lagi mengusulkan opsi agar mereka mengembalikan jumlah yang disumbangkan tanpa keharusan untuk membayar bunga apapun. Uang yang dikembalikan kemudian akan disumbangkan ke organisasi amal Australia." **]** **joy dari berbagai sumber**

Pemimpin Tak Adil Akan Celaka

*"Mâ min ahadin yuammaru 'alâ 'asyrati fashâ'idan lâ
yuqsithu fihim illâ jâ`a yawma al-qiyâmati fî al-
ashfâdi wa al-aghlâli*

Tidak seorang pun yang dijadikan pemimpin atas sepuluh orang atau lebih, dia tidak berlaku adil di tengah mereka, kecuali dia datang pada Hari Kiamat kelak dalam rantai dan belenggu” (HR Al-Hakim).

Al-Hakim mengatakan: “Ini adalah hadits shahih sanadnya meskipun al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Dan pada asalnya kita tidak dimaafkan dalam meninggalkan hadits-hadits Makhramah bin Bukair.” Adz-Dzahabi di dalam *at-Talkhish* mengomentari hadits ini sebagai hadits shahih.

Ada beberapa riwayat yang menegaskan hadits di atas. Di antaranya, Sa'ad bin Ubadah ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak ada seorang pemimpin atas sepuluh orang kecuali dia didatangkan pada Hari Kiamat kelak terbelenggu, tidak ada yang melepaskannya dari belenggu itu kecuali keadilan"* (HR Ahmad, at-Thabarani, al-Baihaqi, Ibn Abiy Syaibah).

Ath-Thabarani di *Mu'jam al-Kabir* meriwayatkan dari Abu Umamah ra, Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang Muslim yang mengurus urusan sepuluh orang atau lebih kecuali didatangkan pada Hari Kiamat tangannya terbelenggu ke tengkuknya, kebbaikannya akan melepaskannya atau dosanya justru mengencangkannya. (Kepemimpinan itu) awalnya ceriaan, pertengahannya penyesalan dan akhirnya azab di Hari Kiamat”.

Hadits-hadits di atas memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya: *Pertama*, hadits itu berlaku atas setiap pemimpin, meski pemimpin yang wewenangnya

paling terbatas sekali pun, yakni hanya mengurus urusan sepuluh orang.

Kedua, setiap pemimpin pasti diminta pertanggungjawaban atas pemeliharaan urusan orang-orang yang diurusnya, apakah dia berlaku adil di tengah mereka atau sebaliknya dia berlaku jahat dan zalim. Keadilannya itu akan menyelamatkan dia dari belenggu di Hari Kiamat. Sebaliknya setiap kejahatannya (*al-jawr*), kezaliman dan dosanya (*al-itsmu*) akan mencelakakannya. Keadilan, kejahatan, kezaliman dan dosa yang dimaksud di sini tentu dalam konteks kepemimpinan dan *r'ayah asy-syu'un*, bukan dalam konteks pribadinya atau urusan privatnya.

Ketiga, hadits di atas merupakan ancaman keras atas kejahatan, kezaliman dan dosa pemimpin dalam konteks kepemimpinannya. Ibn Bathal seperti dikutip oleh al-Manawi di *Faydh al-Qadir* menyatakan: “Ini ancaman keras atas dalalah kejahatan (*dalālah al-jawr*). Maka siapa saja yang menelantarkan orang yang dia diminta mengurusnya atau mengkhianatinya atau menzaliminya maka kepadanya akan diarahkan tuntutan atas kezaliman hamba pada Hari Kiamat kelak, lalu bagaimana dia mampu melepaskan diri dari kezaliman terhadap umat yang agung.”

Keempat, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai *syara'*. Jadi asal dari keadilan itu adalah kesesuaian dengan syariah. Maka kunci dari realisasi keadilan sekaligus menghindari kezaliman itu tidak lain adalah penerapan syariah dan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai hukum untuk memutuskan perkara apapun di tengah umat. Allah SWT di dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 dengan jelas mensifati siapa saja yang tidak memutuskan perkara sesuai hukum yang telah diturunkan oleh Allah adalah

sebagai orang yang minimal zalim, atau bahkan fasik dan malah bisa kafir jika disertai i'tiqad atau keyakinan. Maka siapapun pemimpin yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Islam, jelas dia terkena ancaman hadits-hadits di atas.

Kelima, siapapun yang mengurus urusan umat maka harus berlaku adil. Jika tidak dia akan bisa dijebloskan ke neraka. Ma'qil bin Sinan al-Asyja'iy menuturkan, Nabi SAW bersabda: *"mâ min ahadin yakûnu 'alâ syay'in min umûri hâdzihi al-ummati falâ ya'dilu fihim illâ kabbahullâhu ta'âlâ fi an-nâri* -Tidak seorangpun yang mengurus urusan umat ini lalu dia tidak berlaku adil di tengah mereka kecuali Allah jebloskan dia di neraka-" (HR Al-Hakim).

Kesadaran untuk berbuat adil dan menjauhi zalim itu harus terus ada pada diri pemimpin. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada amilnya: "*Amma ba'du*, sungguh kekuasaan telah memungkinkan engkau zalim terhadap hamba. Maka jika engkau terbersit untuk zalim atas seseorang maka ingatlah kekuasaan Allah atasmu. Ketahuilah bahwa tidaklah engkau mendatangkan sesuatu kepada manusia kecuali akan lenyap dari mereka dan tetap menjadi tanggung jawabmu, dan Allah menindak orang zalim untuk (keadilan) orang yang dizalimi, wa as-salam."

Pemimpin yang adil secara hakiki hanya akan ada dalam sistem Islam, sebab keadilan itu hakikatnya adalah sesuai dengan syariah dan diterapkan syariah. Penerapan syariah dan tegaknya sistem Islam, Khilafah Rasyidah 'ala minhaj an-nubuwwah adalah kunci terwujudnya pemimpin yang adil di tengah umat. *Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* **ya**



Penerimaan Peserta Didik Baru

PONPES

AL JAWAHIR



MEMBUKA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Tahun Ajaran 2019/2020

Menerima Lulusan SD/MI dan SMP/MTs (KHUSUS PUTRI)

aljawahir.id/ppdb



KH. Ruslan Gunawan Djawahir
Mudir Ponpes Al Jawahir

Kurikulum Pondok Pesantren Al Jawahir

Pondok Pesantren Al Jawahir memiliki kurikulum yang akan mempersiapkan para santri untuk bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Islam ternama khususnya di Mesir dan Timur Tengah.

- ☑ Bahasa Arab
- ☑ Tahfidz Al Qur'an
- ☑ Fiqh Dasar dan Lanjutan
- ☑ Tsaqofah Islam

Alamat:
 Jl. Otista Gg. Lurah No. 2 Sasakinggi Ciputat Tangerang Selatan 15411


[ponpes.aljawahir.id](https://www.facebook.com/ponpes.aljawahir.id)

[@aljawahir.id](https://www.instagram.com/aljawahir.id)


[aljawahir.id](mailto:info@aljawahir.id)

info@aljawahir.id


[0895 6152 20764](tel:0895615220764)

[aljawahir.id/maps](https://www.aljawahir.id/maps)

Proudly Present by :



RUMAHSYARIAHINSTITUTE.COM

UMROH AWAL RAMADHAN



Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
 ﻟﯿﺬا كان رَمَضَانُ اَعْتَمِرْ فِيهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَﺟَّةٌ
 “Jika Ramadhan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadhan senilai dengan haji.”
 (HR. Bukhari Muslim)

Inspirasi Trip Workshop Bisnis Syariah bersama 4 Ekspert Nasional



**KH. Muhammad Shiddiq
Al Jawi, S.Si, MSI**

Komisi Fatwa MUI Propinsi DIY,
 Mudir dan Pengasah Ma'had STE HAMBARA Yogyakarta,
 Penulis 6 buku keislaman & 400 artikel high muamalah,
 Penceramah 12 kota bahasa Arab
 Penyunting 10 buku terjemahan Bahasa Arab (editor),
 Mahasiswa doktoral prodi Studi Islam (Dirasah Islamiyah)



H. Dwi Condoro Triono, Ph.D

Direktur Keuangan dan Administrasi Syaria'at Marcom,
 Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta,
 Dosen STE Hambara Yogyakarta, Asosiasi Penulis pada
 Syariah Economic and Management Institute Jakarta,
 Penulis 6 buku best seller, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 Yogyakarta untuk bidang Ekonomi Islam



**Ust. H. Muhammad
Rosyid Aziz**

Founder dan CEO Developer
 Properti syariah, Koordinator Nasional
 Pengusaha Rindu Sya'rah (PRS),
 Trainer Bisnis Syariah,
 Multipreneur 43 Bisnis Syariah,
 Penulis buku Berkah Berlimpah
 dengan Bisnis Properti Syariah



**Ust. Ihsa Arifin Faiz, SE.,
M.Sc., CMA, CIBA**

Founder dan CEO Rumahsyariahinstitute.com,
 Pakar Akuntansi Management dan Analisis Business
 International (oleh ICMA Australia),
 Dosen Akuntansi UGM,
 Penulis 3 buku terbitan Gramedia UGM,
 Trainer Nasional Akuntansi sektor publik,
 Developer Properti Syariah (DPS) Yogyakarta.

Facilitas :

- ✕ Pesawat Garuda
- 📅 Paket 12 hari
- 🏨 Hotel Mekkah (Malak al taqwa/setaraf)
- 🏨 Hotel Madinah (Al syam/setaraf)

- ✓ Pendampingan Pembuatan Passport Meningitis dan Biometrik Area Yogyakarta Jateng
- ✓ Pendampingan Mulai Keberangkatan dari Yogyakarta (kota lain bagi group) Sampai Kembali lagi

Keberangkatan InsyaAllah :
4 Mei 2019

PROMO
 Hanya
 Rp 30.5 jt
 Rp 26.5 jt*

LIMITED SEAT
50 JAMA'AH

Note :
 izin Umroh : PT Cakra Mandiri Utama Madina Prima Group Tour Travel
 dan Rumah Syariah Institute
 dengan izin : PPIU (Umrah) : D/I/52 tahun 2014

***) Khusus utk pendaftaran maks. 28 Februari 2019**
 Setelah tgl 28 Februari promo jadi 28 juta
 Setelah Februari harga kembali normal
***) Belum termasuk tambahan 2 juta**
 (tax flight, handling, perkap ,dan porter)

Contact :

 0812 2611 5351

Visit :

 Rumah Syariah Institute

 @rumahsyariahinstitute

 Rumah Syariah Institute

 Rumahsyariahinstitute.com

ISLAMIC BOARDING SCHOOL
Mutiara Ummat
 Pesantren Tahfidz Plus Tingkat SMP dan SMA

MENCIPTAKAN GENERASI AL QUR'AN YANG CERDAS
 BERAKHLAQ MULIA, BERJIWA PEMIMPIN DAN TERAMPIL BERWIRSAUSAHA

TELAH DIBUKA

**Pendaftaran Peserta Didik Baru dan Pindahan
 Ikhwan dan Akhwat Tahun Pelajaran 2019 / 2020**

- Gelombang Pertama :
 19 November 2018 - 31 Januari 2019
 - Gelombang Kedua :
 1 Februari - 22 Juni 2019



FASILITAS
 Ruang Belajar Full AC, Perpustakaan, Masjid Luas,
 Lapangan Olahraga, Saung,
 Kantin Sekolah, UKS (Unit Kesehatan Sekolah),
 Catering, Laundry, Dll

Alamat Pesantren:
 Kav. Rawa Mulya, Ciketing Asem RT.13 RW.03,
 Mustika Jaya, Kota Bekasi

Profil Lulusan :
 - Hafal 30 Juz Al Qur'an
 - Mampu Berbicara Bahasa Arab
 - Memahami Kitab Gundul
 - Terampil Berwirausaha
 - Mendapat Sertifikat dari Sekolah Tahfidz
 - Mendapat Ijazah Legal Paket B dan C
 - Terampil Berwira Usaha
 - Mampu Berceramah / Orasi
 - Berkepribadian ISLAM

USIA CALON SANTRI 12 S/D 20 TAHUN (DIBAWAH 12 TAHUN JIKA ANAK SUDAH MANDIRI)

Tempat Pendaftaran
 1. Ponpes Mutiara ummat
 2. Kantor Pusat Yayasan Mutiara Ummat
 Jl. Tunas Kelapa No 160, Rawa Lumbu, Kota Bekasi

Contact Person
0852 1609 0469
0878 0995 6526
0857 1034 9334

DISKON 20% - 50%
 KHUSUS HAFIDZ 30 JUZ 100% FREE PSB

Instagram: @ponpestahfidz_mutiaraummat
Facebook: Mutiara Ummat
Website: mutiaraummat.sch.id
WhatsApp: 0857 1034 9334

LIVE ON AIR
DaktaFM

**Secretan
 Dunia Islam**

BERSAMA:
UST MUJIYANTO
 (REDAKTUR MEDIA UMAT)

**ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
 MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM
 SETIAP SENIN JAM 07.30-08.00 WIB**

ACARA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:

Dakta 107 FM
 bijak • cerdas

Media Umat
 tabloid
 www.mediaumat.com
 Memperjuangkan Kehidupan Islam

KUNJUNGI... STAND AL AZHAR PRESS
PAMERAN BUKU TERBESAR di Indonesia

18th Islamic Book Fair
 معرض الكتاب الإسلامي
 ١٤٤٠ / 2019

Jakarta Convention Center (JCC)
 Senayan Jakarta

27 Februari - 3 Maret 2019

No Stand 148

Kami juga hadir di IBF Surabaya,
Gedung Balai Pemuda Surabaya

28 Maret - 3 April 2019
No Stand B-12

Buku baru:
 • **Taqarrub Ilallah** // soft cover // 156 hlm // 13,5x20,5 cm // harga **Rp.45,000**
 • **Percikan Hikmah di Jalan Hijrah** // soft cover // 160 hlm // 12,5x17,5 cm // harga **Rp.35,000**



Al Azhar Fresh Zone
TOKO BUKU AL AZHAR

Kantor: Jl KS Tubun No 19, Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor, 16151
 Whatsapp & SMS Center : **0817 011 7771** | www.al-azharpress.com | FB page: AlAzharPress | e-mail: alazhar.fresh@gmail.com / alazhar_press@yahoo.com

**PPTQ DAARUL QUR'AN
 AL-ISTIQOMAH**
 Internasional Islamic Boarding School

**MEMBUKA PENDAFTARAN
 SANTRI BARU**
 Tahun Ajaran 2019/2020

**Menerima Lulusan
 SD/MI dan SMP/MTs
 Putra & Putri**

KH. Bahana Jaalhaq Taqwallah
 Pimpinan Ponpes

Syekh Manshur Al-Yamani
 Musyrif Tarbawi
 (Pemegang sanad riwayat 10 qiroat & Sanad Hadist Muslim)

KURIKULUM
 Kurikulum PPTQ Daarul Qur'an Al-Istiqomah Internasional Islamic Boarding School mengacu pada kurikulum Pondok Modern yang berbasis Tahfidzul Quran dan dipadukan dengan kurikulum standar Internasional

PROGRAM UNGGULAN

- ☑ Tahfidz Qur'an 30 (Bersanad)
- ☑ Kajian ilmu Tajwid (Bersanad)
- ☑ Hafalan Hadist Muslim (Bersanad)
- ☑ Kajian Ulumul Syar'i
- ☑ Bahasa Arab & Inggris aktif (Native speaker oleh Syekh dr Arab)
- ☑ Entrepreneurship
- ☑ Leadership
- ☑ Bimbingan UN
- ☑ Berijazah Resmi Negara & Pesantren

Fasilitas: Asrama full AC, Makan sehari 3x prasmanan, CCTV di asrama dan tempat- tempat kegiatan santri.

Jl. Majelis Taklim Al Mansyuriah, No. 88, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor.

INFO: 0852-1291-1217

f i Ma'had Daarul Qur'an Al-Istiqomah
www.istiqomah.or.id

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 237
10 - 23 Jumadil Akhir 1440 H
15 - 28 Februari 2019

Media ^{t a b l o i d} **umat**

m e d i a u m a t . n e w s

Memperjuangkan Kehidupan Islam

REZIM KIAN REPRESSIF

Semenjak berkuasa, pemerintahan Jokowi sudah beberapa kali mencokok kalangan yang berseberangan dengan kekuasaannya. Pernyataan Jokowi bahwa ia tidak punya 'tampang' diktator, bisa menjadi sebuah satire. Apakah seorang diktator ditentukan oleh wajahnya? Faktanya tidak.

